

BIARAWAN KATOLIK DAN POLITIK
Sebuah studi tentang diskursus politik dan agama

SKRIPSI

KEB
KK 2
Fis. S 83/18
Sus
b



Oleh:

Irene Indriana Susilowati
NIM : 079414550

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002



BIARAWAN KATOLIK DAN POLITIK
Sebuah studi tentang diskursus politik dan agama

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Oleh:

Irene Indriana Susilowati
NIM : 079414550

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Disetujui untuk diujikan

Surabaya, 21 Juni 2002

Dosen Pembimbing



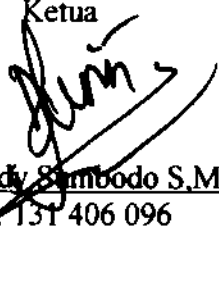
DR. Daniel Th. Sparringa

NIP. 131 558 575


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji pada
Tanggal 15 Juli 2002

Komisi Penguji,


Ketua

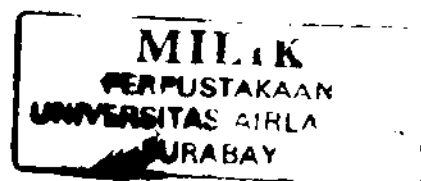

Drs. Doddy Sambodo S.MS
NIP. 131 406 096

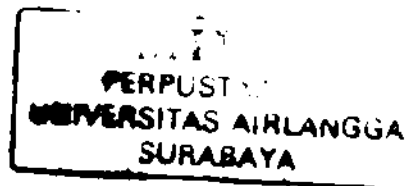
Anggota


DR. Daniel Th. Sparringa
NIP. 131 558 575

Anggota


Drs. J. Dwi Narwoko, MA
NIP. 130 355 365





ABSTRAK

Studi ini tentang wacana politik dan agama di kalangan biarawan Katolik. Studi bertujuan untuk mengetahui pandangan biarawan Katolik terhadap posisi agama dalam politik khususnya di Indonesia. Sejarah yang menunjukkan keterlibatan biarawan Katolik dalam politik menjadi pijakan pelarangan bagi biarawan Katolik untuk melakukan politik praktis di saat ini. Penelitian difokuskan bagaimana biarawan Katolik memandang kiprah biarawan dalam politik dikaitkan dengan pemahaman tentang agama.

Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Discourse untuk melihat bagaimana wacana politik dan agama di kalangan biarawan Katolik terwujud, Pandangan Sosiologis tentang Agama untuk melihat agama dari sudut pandang sosiologi, Toleransi Agama sebagai dasar penjabar pemahaman para biarawan Katolik tentang toleransi khususnya dengan umat beragama selain Katolik, serta Agama dan Negara untuk melihat praktek hubungan negara dan agama dibandingkan dengan wacana yang diungkap para biarawan Katolik.

Subyek penelitian ini adalah biarawan Katolik yang dipilih sebanyak lima orang. Jumlah ini dianggap sudah memenuhi data yang dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana (*discourse analysis*) dengan tipe penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini tidak ditetapkan untuk meliputi suatu daerah atau wilayah saja, melainkan akan disesuaikan dengan keberadaan obyek yang menurut kriteria tertentu dapat dijadikan penyumbang data atau informasi yang diinginkan. Teknik pengumpulan data menggunakan panduan wawancara (*guide interview*) yang dijadikan patokan peneliti ketika melakukan wawancara dengan biarawan Katolik. Data yang telah terkumpul dari panduan wawancara akan dianalisis sesuai kategori yang ditentukan dari panduan wawancara tersebut. Wacana biarawan Katolik tentang politik dan agama akan dipilih dalam beberapa kategori, yaitu pluralitas agama, agama dan negara, agama dan demokrasi, serta gereja Katolik dan politik.

Temuan data yang diperoleh menunjukkan bahwa wacana yang berkembang masalah agama tidak bisa dicampuradukkan dengan politik. Dalam arti, negara sebaiknya tidak mencampuri urusan agama. Demikian pula sebaliknya agama tidak ikut campur urusan negara. Wacana lain yang berkembang, biarawan tidak boleh berpolitik dalam arti berafiliasi dengan kekuasaan. Namun biarawan dapat berpolitik non-praktis dalam pengertian sebagai kekuatan moral seperti memberi opini tentang peristiwa politik. Biarawan Katolik hanya bisa mendorong umat untuk berpolitik dan tidak buta politik namun biarawan tidak berpolitik praktis. Kesimpulan yang diperoleh bahwa biarawan Katolik beranggapan bahwa politik dan agama tetap harus dibedakan. Agama tidak bisa digunakan untuk berpolitik.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	7
BAB II KERANGKA TEORI	9
11.1 Teori Discourse	9
11.2 Pandangan Sosiologis tentang Agama	12
11.3 Toleransi Agama	14
11.4 Agama dan Negara	16
BAB III METODOLOGI	24
111.1 Tipe Penelitian	24
111.2 Metode Penelitian	25
111.3 Jenis Penelitian	25
111.4 Subjek Penelitian	26
111.5 Operasionalisasi Konsep	26
111.6 Lokasi Penelitian	27
111.7 Teknik Pengumpulan Data	28
111.8 Teknik Analisis Data	28
BAB IV GEREJA KATOLIK, BIARAWAN DAN POLITIK	30
111.1 Arti dan Makna Gereja	30
111.2 Gereja yang Katolik	31
111.3 Keanggotaan Gereja	33
111.4 Hidup Bakti Biarawan	34
111.5 Gereja, Awam, dan Kehidupan Politik	37
BAB V TEMUAN DATA	42
111.1 Krisis Moralitas	42
111.2 Masyarakat Ideal	46
111.3 Pluralitas agama	49
111.4 Agama dan Negara	55
111.5 Agama dan Demokrasi	58
111.6 Gereja Katolik dan Politik	60

BAB VI	PENUTUP	65
	VI.1 Kesimpulan	65
	VI.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur akhirnya dapat merampungkan skripsi berjudul “Biarawan Katolik dan Politik, Sebuah Studi tentang Diskursus Politik dan Agama”. Segala lika-liku hidup selama masa kuliah menjadi pemicu bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi yang sempat tertunda ini.

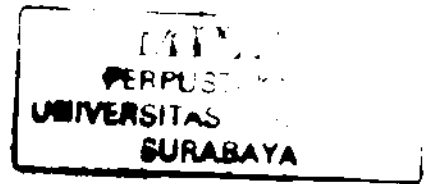
Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari bantuan yang diberikan semua pihak terkait. Untuk itu terima kasih terucapkan kepada:

1. Bapak DR. Daniel Th. Sparringa, selaku pembimbing skripsi yang telaten membimbing penulis selama masa studi.
2. Dosen-dosen Program Studi Sosiologi yang telah memberikan ilmunya sebagai bekal penulis mengerjakan skripsi.
3. Teman-teman semasa kuliah atas saran dan kritiknya terhadap penulisan skripsi ini.

Penulis berharap apa yang tertera dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkepentingan.

Juni 2002

Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri atau karakteristik yang unik. Secara vertikal, masyarakat ditandai oleh adanya pelapisan atas-bawah yang sangat tajam, sedangkan secara horisontal, kultur masyarakat Indonesia bisa dikenali oleh adanya keanekaragaman suku-suku bangsa, adat-istiadat, bahasa daerah serta oleh adanya keanekaragaman suku-suku bangsa, adat-istiadat, bahasa daerah serta agama dan kepercayaan. Furnivall seperti dikutip Budi Rajab dalam Prisma, menyebut masyarakat Indonesia dengan istilah masyarakat majemuk.¹

Clifford Geertz juga setuju dengan konsep masyarakat majemuk seperti diajukan Furnivall.² Hanya Geertz melihat pluralisme masyarakat tidak lagi bersifat vertikal. Karena situasi dan kondisi politik Indonesia telah berubah. Kekuatan politik yang ada tidak lagi menjaga *status quo* kemajemukan masyarakat Indonesia atas dasar perbedaan ras dan akses dan kontrol politik dan ekonomi. Sejak Indonesia merdeka, negara bangsa (*nation-state*) ini telah dihadapkan pada pluralisme horisontal, yaitu pengelompokan masyarakat Indonesia yang lebih diikat oleh, apa yang disebut Geertz, ikatan-ikatan primordial (*primordial attachment*), seperti ikatan kekerabatan, ras, bahasa, daerah asal, agama, dan suku bangsa. Primordialisme inilah yang merupakan pengikat asli masyarakat

¹ Rajab, Pluralitas Masyarakat Indonesia, Suatu Tinjauan Umum, *Prisma*, 6 Juni 1996, hlm. 3.

² Clifford Geertz, *The Integrative Revolution*, dalam Clifford Geertz (ed.), *Old Societies and New Nations*, Illinois: The Free Press of Glencoe, 1963. Seperti dikutip Rajab, *Ibid.*, hlm. 4.

Indonesia dan atas dasar ikatan itulah pengelompokan-pengelompokan masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang, baik dalam organisasi-organisasi sosial informal dan formal, asosiasi-asosiasi, organisasi massa, pemerintahan, partai politik, maupun pada organisasi-organisasi yang bertujuan ekonomi.

Pendekatan yang berkembang sejak lama di lingkungan ilmu-ilmu sosial dalam melihat kemajemukan cenderung untuk meletakkan suatu kelompok masyarakat sebagai suatu komunitas yang tertutup dan merupakan suatu entitas yang berbeda secara diametral dengan entitas lain sehingga sulit untuk dapat berhubungan. Masing-masing entitas dilihat memiliki kehendak untuk berdiri sendiri dan senantiasa mengabaikan dan menempatkan entitas lain sebagai "lawan". Masing-masing entitas dilihat memiliki kebudayaan yang secara absolut berbeda satu sama lain dan tidak bisa dipersatukan, memiliki kehendak dan daya hidupnya sendiri serta kebudayaan itu dianggap hanya dapat fungsional di dalam masyarakat pendukungnya sendiri. Sementara pada masyarakat lain kebudayaan itu akan disfungsional atau tidak relevan. Kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain dianggap berbeda dan sama sekali tidak bisa dijembatani.³

Agama sebagai salah satu sistem budaya mempunyai norma-norma, nilai-nilai, dan juga aturan-aturan tertentu yang sangat berarti bagi penganutnya. Seringkali, agama digunakan sebagai "pelarian" pada saat manusia merasa tidak mampu lagi melakukan suatu usaha dalam menyelesaikan problem kehidupannya. Tapi yang jelas agama mempunyai aspek lahiriah dan batiniah, dan keduanya saling melengkapi.

³ Rajab, *Op.cit.*, hlm. 6

Agama mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah: (1) Digunakan oleh warga masyarakat sebagai suatu cara memandang hidup (ideologi), yang berfungsi untuk menjelaskan keberadaan manusia di dunia, darimana ia berasal dan kemana ia akan menuju setelah meninggal, dan agama merupakan satu-satunya bagian kebudayaan yang mampu menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia. (2) Oleh karena agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi agama juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, hal itu berarti bahwa agama juga terikat erat dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia seperti kekerabatan, kehidupan sosial, ekonomi dan bahkan politik, dan lain sebagainya. Hal ini dikemukakan oleh Geertz, seperti yang dikutip oleh P. Ray Sudhiarsa, SVD dalam makalahnya yang tidak dipublikasikan. Sejahtera agama merupakan lembaga sosial, maka terdapat arus hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Ada beberapa peranan agama yang menonjol yaitu (1) pendorong perubahan sosial, (2) melaksanakan peranan propetik.⁴ Sentimen-sentimen, kepercayaan, dan organisasi-organisasi keagamaan, dari semua agama dunia, merupakan inti sejumlah transformasi sosial baik secara damai maupun kekerasan, baik yang bersifat liberal maupun konservatif, baik di negara-negara Barat maupun non-Barat. Keterlibatan agama dalam perubahan sosial menunjukkan berbagai arah dan tingkatan. Sejumlah keterlibatan agama ditujukan kepada perluasan sepenuhnya demokrasi dan kebebasan manusia, seperti pergerakan hak-hak sipil yang dimotori oleh berbagai gereja Kristen di Amerika Serikat, gerakan

anti-apartheid di Afrika Selatan, gerakan teologi pemerdekaan dan pemanusiaan yang dimotori gereja Katolik di Amerika Latin dan Eropa Selatan. Pada tahun 1950-an para ilmuwan sosial memandang gereja Katolik dan Katolikisme sebagai penghalang demokrasi. Namun sejak pertengahan 1970-an dua pertiga dari jumlah negara yang melakukan proses demokratisasi merupakan negara-bangsa yang penduduknya mayoritas Katolik.⁵

Tercatat pula peran agama sebagai pelopor konsolidasi identitas-identitas etnik tradisional dengan nilai-nilai agama yang konservatif sehingga memperkeras konflik antar-kelompok, seperti pertentangan antara Hindu dan Sikh di India, antara Protestan dan Katolik di Irlandia Utara, dan pertentangan golongan Islam (juga di antara golongan Islam), serta golongan Kristen (juga di antara golongan Kristen) di Libanon. Di samping itu, terdapat sejumlah pergerakan yang dilandasi agama yang hanya bertujuan untuk memperharui satu atau lebih lembaga atau kebijakan sosial di dalam suatu masyarakat tertentu, seperti Gerakan Dakwah di Malaysia. Sedangkan pergerakan lain, seperti revolusi Islam di Iran, berupaya menghancurkan seluruh struktur yang lama dan menciptakan suatu masyarakat yang baru sama sekali. Di sejumlah negara, dapat pula ditemui peranan agama bukan sebagai kekuatan perubahan melainkan tetap sebagai pemberi legitimasi bagi kekuasaan dan kebijakan penguasa, seperti di beberapa negara Arab di Timur Tengah.⁶

⁵ Ramlan Surbakti, Globalisasi, Sekularisasi, dan Bangkitnya Agama-agama, dalam Masyarakat Kebudayaan dan Politik, *Majalah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, No. 8, Th V, 1992, hlm 26

⁶ Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman, Ok. University of Oklahoma Press, 1991, hlm 72-74

⁷ Ramlan Surbakti, *Op.cit.*, hlm 27

Yang dimaksud dengan peranan propetik tidak semata-mata sebagai kegiatan untuk menumbangkan tata lama dan menggantinya dengan tata baru, tetapi juga harus diartikan sebagai kegiatan yang tidak hanya mempertanyakan kebijakan dan kekuasaan yang mapan, lebih dari itu juga berupaya menunjukkan alternatif lain. Peranan kenabian bukanlah gejala politik (dalam arti bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan). Pengaruh peranan kenabian bersifat tidak langsung, sehingga dampaknya juga tidak dapat dilihat dalam jangka pendek melainkan dapat dilihat dalam jangka panjang sebagai sumber bagi pembentukan budaya dan perubahan sosial melalui pengembangan wawasan keagamaan. Dengan kata lain, peranan kenabian memang berlangsung dalam panggung politik tetapi ia tidak berasal dari politik, dan dampak peranan kenabian bukanlah pertama-tama bersifat politik melainkan kultural.⁷

Franz Magnis-Suseno memandang ada dua macam wacana tentang agama.⁸ Pertama, agama-agama merupakan berkat bagi masyarakat. Agama diasosiasikan dengan gambaran orang yang berbudi luhur, lapang hatinya, baik hati, jujur, adil, tidak picik, tidak sempit, tidak dendam, yang menguasai emosi, yang membalas yang buruk dengan yang baik, berbelas kasih, berdamai. Kedua, agama dihubungkan dengan kepicingan, kebencian, pertikaian, perbuatan keji, pembunuhan, huru-hara, perusakan, kerusuhan, terorisme. Kedua wacana tersebut dapat dibenarkan jika mengingat pelbagai kerusuhan dan peristiwa di Indonesia, baik di Jawa maupun di daerah-daerah lain.

⁷ Ramlan Surbakti, *Ibid.*, hlm. 27

⁸ Franz Magnis-Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm.

Politik merupakan gejala yang serba hadir. Politik tidak saja hadir dalam kegiatan penyelenggaraan negara secara kelembagaan, melainkan menyeluruh dalam kehidupan ini. Secara historis, korelasi antara agama dan politik terkait secara erat. Di Indonesia sejarah pergerakan demi suatu kemerdekaan telah mencatat peranan agama dalam membentuk kohesi kelompok dan berjuang dalam percaturan politik di masa pendudukan rezim kolonial. Agama dijadikan dalih untuk menghimpun massa misalnya dalam kampanye menjelang pemilu untuk menggalang massa partai yang mengklaim berazaskan agama tertentu. Fenomena lain, adanya tokoh agama yang menjadi "corong" partai politik tertentu bahkan ikut bergabung dalam sebuah partai dengan memanfaatkan posisinya sebagai tokoh agama untuk menjaring pendukung partai.

Keterkaitan agama dengan politik juga terekam saat terjadi peristiwa kerusuhan sosial. Banyak orang, termasuk para pakar yang mengaitkan hal tersebut dengan pernik-pernik perpolitikan negara. Dalam kenyataannya, banyak kasus kerusuhan sosial tersebut membawa dampak yang lebih bersifat agamis dari pada bersifat politis, misalkan kerusuhan sosial yang terjadi di Situbondo, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu terjadi peledakan bom di beberapa tempat ibadah yang pada akhirnya menyebabkan rusaknya sejumlah tempat ibadah tersebut. Belum lagi masalah isu santet yang melanda Banyuwangi di tahun 1998 yang juga merembet hingga wilayah Jawa Barat. Demikian pula untuk kasus Ambon yang melibatkan umat Islam dan Kristen dalam medan pertikaian. Agama dijadikan kambing hitam pemicu persoalan. Untuk meredakan masalah itu, pemerintah daerah melakukan konsolidasi massa dan mengundang para tokoh-tokoh agama

untuk turut serta dalam usaha untuk meredakan kondisi yang disebut cukup rawan tersebut.

Saling keterkaitan antara agama yang satu dengan yang lain sebagai salah satu sistem budaya akan mempengaruhi nilai dan perilaku massa pendukungnya masing-masing, dan ketika hal tersebut dimanifestasikan ke arena politik maka korelasi antara agama dan politik akan semakin dipertegas.

Terfokus pada tokoh agama khususnya Katolik, ditegaskan bahwa tokoh agama Katolik tidak diperkenankan berpolitik. Dalam arti politik praktis, misalnya menjadi anggota DPR, anggota atau ketua partai politik. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan keterlibatan tokoh agama Katolik dalam politik sebagai penyumbang opini tentang suatu peristiwa yang terjadi. Terbukti dengan terbitnya Surat Gembala dalam Konferensi Waligereja Indonesia. Seperti yang terjadi di tahun 1997 ketika menghadapi pemilu.

Berangkat dari situ maka penelitian diarahkan untuk mengetahui wacana biarawan Katolik dalam menyuarakan pendapat mereka tentang peristiwa politik yang terjadi di Indonesia. Biarawan yang dimaksud adalah pastur dalam agama Katolik, tidak termasuk suster. Dengan demikian akan terlihat bagaimana para biarawan Katolik mewacanakan masalah agama dan politik dalam pengertian non praktis.

1.2 Perumusan Masalah

Melihat begitu banyak munculnya isu-isu politik dan agama yang beredar di masyarakat dan dalam berbagai fenomena sosial banyak terjadi kasus-kasus

yang secara implisit maupun eksplisit menunjukkan adanya korelasi antara politik dan agama. maka dalam penulisan ini akan dibahas bagaimana wacana (*discourse*) politik dan agama di kalangan biarawan Katolik. Hal ini berkaitan dengan sudut pandangan biarawan Katolik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan agama dan politik di Indonesia dengan segala konflik yang ada di dalamnya.

BAB II**KERANGKA TEORI**

Dalam penelitian *discourse* politik dan agama, yang merupakan sebuah studi yang diambil dari pendapat sejumlah biarawan Katolik ini, terdapat beberapa teori yang akan digunakan, diantaranya adalah :

II.1 Teori *Discourse*

Diane Macdonnel menulis dalam *Theories of Discourse: An Introduction*, bahwa *discourse* merupakan bentuk dialog sosial dalam menanggapi isu-isu tertentu. Tiap-tiap pihak yang terlibat menyuarakan opini yang mempunyai konteks tertentu. Seperti juga Foucault yang berpendapat bahwa wacana (*discourse*) adalah himpunan wicara yang mengandung penilaian, yang tidak selamanya berada di tingkat sadar (ideologi).⁹ Foucault (1972) juga menyebut wacana kadangkala sebagai bidang dari semua pernyataan (*statement*), kadangkala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan dan kadangkala sebagai praktek regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan.¹⁰

Dari dua pemikiran tersebut di atas, dapat dikatakan pula bahwa pengertian *discourse* secara lebih sederhana adalah suatu dialog, semua ucapan dan tulisan yang bersifat sosial. Artinya setiap pernyataan yang dibuat dan makna kata-kata yang digunakan tergantung pada dimana dan terhadap apa pernyataan tersebut dibuat atau dikemukakan. Sebuah teks pasti membahas tentang sesuatu.

⁹ Foucault, *Seks dan Keknasan, Sejarah Seksualitas*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 205

¹⁰ Sara Mills, *Discourse*, London and New York: Routledge, 1997, hlm. 1-8

dan setiap pernyataan itu mempunyai latar belakang historis tertentu. Disiplin ilmu sosiologi memandang wacana sebagai hubungan antara konteks sosial dari pemakai bahasa.

Michel Foucault memiliki beberapa pokok pikiran mengenai wacana. Wacana di sini tidaklah dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi mengikuti Foucault adalah sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep atau efek). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu.

Salah satu hal yang menarik dari Foucault adalah tesisnya mengenai hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Foucault mendefinisikan kuasa agak berbeda dengan beberapa ahli lain. Kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam term "kepemilikan", di mana seseorang mempunyai sumber kekuasaan tertentu. Kuasa, menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Kalau banyak teoretisi lebih memusatkan perhatian pada negara, maka Foucault meneliti kekuasaan lebih kepada individu, subjek yang kecil. Menurut Foucault, seperti dikutip Bartens, strategi kuasa berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dan dengan

¹¹ Sara Mills, *Ibid.*, hlm. 8-16 dan hlm. 131-153

dunia, di situ kuasa sedang bekerja. Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan-hubungan itu dari dalam.¹²

Bagi Foucault, kekuasaan selalu terakumulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan kekuasaan, menurut Foucault, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Hampir tidak mungkin kekuasaan tanpa ditopang oleh suatu ekonomi politik kebenaran.¹³ Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Kuasa memproduksi pengetahuan dan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.¹⁴ Konsep Foucault ini membawa konsekuensi, untuk mengetahui kekuasaan diperlukan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, diamankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu.¹⁵

Studi analisis wacana menurut Foucault bukan sekadar pernyataan, tetapi juga struktur dan tata aturan dari wacana.¹⁶ Perlu dipahami keterkaitan antara wacana dan realitas. Realitas dipahami sebagai seperangkat konstruk yang dibentuk melalui wacana. Realitas itu sendiri, menurut Foucault, tidak bisa didefinisikan jika kita tidak mempunyai akses dengan pembentukan struktur diskursif tersebut. Kita mempersepsi dan bagaimana kita menafsirkan objek dan

¹² K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid II (Prancis), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985, hlm. 487.

¹³ George Junus Aditjondro, "Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas," *Kalam*, No. 1, 1994, hlm. 58.

¹⁴ K. Bartens, *op. cit.*, hlm. 488.

¹⁵ George Junus Aditjondro, *op. cit.*, hlm. 59-60.

peristiwa dalam sistem makna tergantung pada struktur diskursif. Struktur diskursif ini, oleh Foucault, membuat objek atau peristiwa terlihat nyata oleh kita

Menurut Foucault, ciri utama wacana ialah kemampuannya untuk menjadi suatu himpunan wacana yang berfungsi membentuk dan melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana yang berbeda satu sama lain, namun kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan, sedangkan wacana-wacana lainnya akan “terpinggirkan” (*marginalized*) atau “terpendam” (*submerged*).

II.2 Pandangan Sosiologis tentang Agama

Durkheim mengulas arti penting agama dalam masyarakat dan mengenalnya sebagai sumber orisinal dari semua gagasan moral, filsafat, ilmu pengetahuan dan keadilan. Di dalam *The Division of Labor*, Durkheim menggarisbawahi tesis bahwa kepercayaan apa pun, yang membentuk bagian dari *conscience collective* cenderung untuk mengasumsikan sifat agama, meskipun di dalam karya itu hal ini hanya dikemukakan sebagai suatu “dugaan yang sangat mungkin”, yang memerlukan penelitian lanjut.¹⁶ Akan tetapi pengakuan Durkheim tentang kemungkinan adanya arti penting dari agama dalam kaitannya dengan pengaruh *conscience collective* dalam masyarakat, diimbangi oleh suatu kesadaran tentang adanya kenyataan bahwa perubahan-perubahan yang menonjol

¹⁶ Bimo Nugroho, Eriyanto, Frans Surediasis, *Politik Media Mengemas Berita*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999, hlm. 73

¹⁷ George Junus Aditjondro, *op cit*, hlm. 58-59

telah terjadi dengan munculnya jenis masyarakat yang modern. Durkheim secara konsisten mendukung kesimpulan, bahwa baik "orang-orang yang mempertahankan teori-teori ekonomi lama keliru dalam berpikir bahwa sekarang tidak perlu ada pengaturan", dan bahwa "pembela lembaga-lembaga keagamaan salah dalam mempercayai bahwa pengaturan waktu yang lalu bisa berguna bagi masa sekarang".¹⁹ Arti penting agama yang mulai menurun dalam masyarakat-masyarakat kontemporer, merupakan akibat yang tidak bisa dielakkan dari arti pentingnya solidaritas mekanis yang makin menurun. Durkheim menyatakan:

Dengan demikian segi penting, yang kita kaitkan dengan sosiologi agama, sedikit pun tidak mempunyai implikasi bahwa agama itu harus memainkan peran yang sama dalam masyarakat-masyarakat sekarang, seperti yang dimainkannya pada waktu-waktu lain. Dalam suatu segi, kesimpulan yang bertentangan akan lebih sehat. Mengingat agama adalah suatu fenomena kuno, maka agama makin lama makin harus mengalah kepada bentuk-bentuk sosial baru yang telah dilahirkannya.²⁰

Baru setelah 1895, Durkheim mengakui bahwa dia sepenuhnya menyadari arti penting pada agama sebagai suatu fenomena sosial. Arti penting dari pengertian Durkheim yang baru tentang agama, seperti dikembangkan dalam *The Elementary Forms*, bahwa pengertiannya yang baru itu membimbing ke arah penjelasan sifat dari kesinambungan ini antara bentuk-bentuk masyarakat tradisional dan modern.

Agar bisa memahami bentuk-bentuk baru itu, orang harus menghubungkannya dengan asal mula masing-masing agamanya, akan tetapi dalam melakukan penghubungan itu tanpa mengacau-balaukan asal mula agama dengan fenomena-fenomena agama, demikian bila dikatakan secara tepat.²¹

¹⁸ Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, suatu analisis karya-karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 130

¹⁹ Anthony Giddens, *Ibid.*, hlm. 130

²⁰ Kata pendahuluan untuk AS, jilid 2, 1897-1898, dalam karya Kurt H. Wolf *Emile Durkheim et al., Essays on Sociology and Philosophy*, New York, 1964, hlm. 352-353. Seperti dikutip Anthony Giddens, *Ibid.*, hlm. 130

²¹ Kata pendahuluan untuk AS, Anthony Giddens, *Ibid.*, hlm. 132

Salah satu hal yang ditekankan Durkheim ialah sifat dari kepercayaan-kepercayaan yang 'kudus', yang berada dalam masyarakat-masyarakat tradisional. Tampak jelas, bahwa satu tema utama dari *The Elementary Forms* adalah identifikasi dari arti penting fungsional agama sebagai dasar yang menentukan dari solidaritas di dalam masyarakat tradisional.

II.3 Toleransi Agama

Toleransi berasal dari bahasa Latin "tolerare" artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, berhati lapang terhadap orang-orang yang berlainan aliran.²² Seseorang yang toleran menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, berhati lapang terhadap orang-orang berlainan aliran. Sikap toleran tidak berarti membenarkan pandangan aliran yang dibiarkan itu, akan tetapi mengakui kebebasan serta hak-hak azasi penganutnya.²³

Istilah toleransi terutama digunakan dalam hubungan dengan masalah agama atau terhadap orang-orang beragama lain. Berarti toleransi merupakan suatu tata tindak laku (*gedragsregel*) dengan mana kita membiarkan orang lain hidup dan menjalankan agamanya, melakukan kegiatan-kegiatan menurut agamanya, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat serta keyakinan agamanya yang berbeda-beda ataupun yang bertentangan dengan agamanya.²⁴

²² AP. Budiyo, HD. *Membiina Kerukunan Hidup Antar Umat Beriman*, jilid 3, Yogyakarta: Kanisius, 1983, hlm. 140.

²³ *Ensiklopedi Populer tentang Gereja*, hlm. 280.

²⁴ Piet Maku Woso, Toleransi, *Bimas Katolik*, No. 7, Triwulan IV Th. IV, 1973, hlm. 9.

Ada bermacam-macam toleransi, yaitu (1) toleransi negatif, toleransi yang isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai, tetapi dibiarkan saja karena terpaksa, (2) toleransi positif, toleransi yang isi ajarannya ditolak, tetapi penganutnya diterima serta dihargai, dan (3) toleransi ekumenis, toleransi yang isi ajaran serta penganutnya dihargai, karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam kepercayaan sendiri.

Mengenai perlunya sikap lapang dada dalam membina kerukunan hidup beragama, Prof Dr. A. Mukti Ali antara lain mengatakan “kerukunan hidup beragama hanya akan bisa dicapai apabila tiap-tiap golongan bersikap lapang dada satu sama lain.”²⁵ Dan lapang dada kehidupan beragama akan mempunyai makna bagi kehidupan dan memajukan masyarakat majemuk, apabila ia diwujudkan dalam:

1. Lapang dada dalam sikap, meliputi: (a) sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan golongan agama lain yang berbeda atau mungkin berlawanan dengan keyakinan, ajaran dan kebiasaan sendiri, (b) sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh keyakinan agamanya, dan (c) sikap saling mempercayai atas itikad baik golongan agama lain.
2. Lapang dada dalam perbuatan, meliputi: (a) usaha untuk memahami ajaran dan keyakinan agama orang lain, (b) usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri dengan sebijaksana mungkin untuk tidak menyinggung keyakinan agama lain, (c) usaha saling membantu dalam kegiatan-kegiatan

²⁵ AP Budiono HD, *Op cit*, hlm. 145

sosial untuk mengatasi keterbelakangan bersama, dan (d) usaha untuk saling belajar dari keunggulan dan kelebihan pihak lain sehingga terjadi saling tukar pengalaman untuk mencapai kemajuan bersama.

Untuk menciptakan kerukunan hidup beragama atas dasar kelapangan dada itu, maka bukan semangat untuk menang sendiri yang perlu dikembangkan melainkan prinsip "setuju dalam perbedaan. Artinya mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh totalitasnya, menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasannya untuk menganut agamanya sendiri.

II.4 Agama dan Negara

J. Soejati Djiwandono²⁰ berpendapat bahwa agama tidak berpengaruh atau berperan secara langsung dalam negara Pancasila, melainkan secara tidak langsung melalui peranan umat beragama dalam negara Pancasila, yaitu peranannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agama merupakan pedoman hidup pemeluknya. Ia memberi pemeluknya pedoman atau petunjuk yang menyangkut segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan bernegara atau kehidupan politik. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang posisi agama dalam negara Pancasila, hubungan agama dan ideologi Pancasila, atau peranan agama dalam negara Pancasila, berarti berbicara juga tentang peranan atau partisipasi umat beragama dalam kehidupan politik.

²⁰ J. Soedjati Djiwandono, *Gereja dan Politik: Dari Orde Baru ke Reformasi*, Yogyakarta, Kanisius, 1999, hlm 92

Agama tidak memerlukan pengakuan restu dari negara. Negara tidak mempunyai hak untuk menentukan suatu bentuk *worship* atau kepercayaan sebagai agama atau bukan. *Mutatis mutandis*, negara juga tidak berhak menilai apakah sesuatu aliran agama itu sesat, tidak sesuai, atau bertentangan dengan *the mainstream*, yang dianggap aliran yang baku. Hak seperti itu mengandung klaim monopoli atas kebenaran, dan hendak memaksakannya pada orang lain. Selama ini hanya kaum komunis atau para penganut ideologi tertutup lainnya saja yang mengklaim monopoli atas seluruh kebenaran. Jika negara berhak memberikan pengakuan itu, secara logis negara juga berhak menariknya kembali, apa pun alasannya. Memeluk agama merupakan salah satu hak asasi manusia. Ia tak terpisahkan (*inalienable*) dari jati diri manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Namun, adalah tugas dan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan dalam kehidupan beragama dan menciptakan iklim yang sehat yang memungkinkan dan mendukung dilaksanakannya kebebasan beragama itu dalam suasana kerukunan, saling pengertian, saling menghormati, dan bahkan kerja sama.

Ajaran agama memang menjadi petunjuk bagi tingkah laku seseorang secara pribadi, termasuk dalam bidang politik, tetapi tidak untuk mengusahakan ajaran agamanya menjadi sumber hukum dan kebijakan negara. Negara tidak mendasarkan sistem hukum dan perundang-undangannya pada ajaran agama tertentu. Kebijakan negara seharusnya tidak dipengaruhi oleh *fatwa* sesuatu agama, karena *fatwa* itu tidak berlaku umum. *Fatwa* seharusnya hanya berlaku untuk pengikut agama yang bersangkutan, itu pun tanpa sanksi hukum

sipil. Dengan demikian, tidak terjadi perpaduan antara kewajiban warga negara (*civil obligation*), yang diatur oleh negara, dan kewajiban keagamaan (*religious obligation*), yaitu kewajiban sebagai umat beragama yang diatur oleh agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara.

Gereja Katolik mempunyai pengalaman dari sejarahnya sendiri, ketika terjadi pemaduan kekuasaan agama dan kekuasaan politik di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Penyatuan kekuasaan itu menimbulkan malapetaka dan penderitaan, bukan bagi pemeluk agama-agama lain, melainkan justru bagi umat Katolik sendiri karena kesewenang-wenangan yang mengakibatkan penganiayaan, penindasan, dan kekejaman. Semuanya itu dilakukan atas nama Kristianitas dan demi kemurniannya, yang berarti atas nama Tuhan, dengan kelembagaan khusus untuk itu yang disebut *Inkuisisi* dan diberlakukan dengan sanksi hukum negara. Memang Kepala Gereja Roma tidak memiliki kekuasaan politik itu sendiri, tetapi Kristianitas dilihat sebagai jaminan tatanan sosial. Dan sebagai simbol atau perwujudan Kristianitas itu Kepala Gereja Roma dilihat sebagai sumber legitimasi kekuasaan politik Kaisar, yang dengan demikian juga dianggap menjadi perwujudan Kristianitas. Dalam zaman itu, sistem pemerintahan di Eropa mengambil bentuk monarki absolut. Tetapi beberapa negara republik atau kerajaan yang mengaku demokrasi dalam zaman ini pun masih melakukan perpaduan kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Ini sebenarnya merupakan kontradiksi dan melanggar hak asasi manusia.

Masalah keyakinan tidak dapat dipaksakan sekalipun oleh kekuasaan mayoritas yang menjadi inti sistem demokrasi karena demokrasi merupakan

sistem politik yang menjamin hak asasi manusia. Pengalaman pahit selama beberapa abad telah memberi pelajaran berharga bagi kemajuan Gereja Katolik. Umat beragama lain dapat mengambil hikmahnya juga, tanpa harus menempuh pengalaman itu sendiri. Dalam perpaduan kekuasaan agama dan politik, agama diperalat demi kepentingan politik yang sempit, dan sebaliknya, kekuasaan politik dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok agama yang sempit. Agama menjadi ideologi politik dan dengan demikian mengalami degradasi nilai dan makna spiritualnya.

II.4.1 Hubungan antara Negara dan Agama

Ada dua bentuk ekstrem hubungan negara dan agama, yaitu negara sekularistik dan negara agama. Penolakan dua bentuk negara itu diharapkan dapat menghasilkan patokan-patokan untuk mencari secara positif bagaimana sebaiknya negara berhubungan dengan agama dalam suatu masyarakat tertentu.

- (1) Negara sekularistik adalah negara yang menganggap sepi adanya agama-agama dalam masyarakat. Agama-agama dipandang tidak berbeda dari perkumpulan dan organisasi swasta lain yang dibentuk oleh warga atas inisiatif pribadi mereka. Agama tidak ditindas, tetapi juga tidak didukung dan sama sekali tidak diikutsertakan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara, misalnya sebagai kekuatan-kekuatan rohani istimewa yang diperhatikan negara karena peranan mereka dalam pembentukan sikap-sikap masyarakat. Negara diselenggarakan seakan-akan tidak ada agama-agama dalam masyarakat.

(2) Negara agama adalah negara yang diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama. Tetapi karena semua agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana agama harus dijalankan, maka negara agama dengan sendirinya selalu merupakan negara yang dikuasai oleh salah satu agama tertentu. Negara tidak mungkin dikuasai oleh agama pada umumnya, melainkan hanya oleh salah satu saja. Agama-agama lain dikucilkan dari pengaruh atas penyelenggaraan negara itu.

II.4.2 Wewenang Negara terhadap Agama

Wewenang negara terhadap agama meliputi tiga hal²⁷, yaitu (1) Kewajiban agama-agama terhadap negara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa agama-agama, sama seperti semua kelompok lain dalam masyarakat, wajib untuk taat terhadap hukum yang berlaku dalam negara. Diandaikan bahwa hukum itu 'baik', artinya adil dan sesuai dengan hak-hak asasi, (2) Sikap negara yang wajib terhadap agama-agama. Negara wajib di satu pihak menjamin kondisi-kondisi sosial agar agama-agama dapat hidup dan berkembang, di lain pihak untuk menghormati kebebasan beragama. Kebebasan beragama memiliki dua segi, yaitu hak setiap orang untuk hidup sesuai dengan keyakinan-keyakinannya dan kebebasan masing-masing agama untuk mengurus diri sendiri.

Jadi negara tidak berhak untuk memaksa orang untuk percaya atau tidak percaya, untuk beragama atau tidak beragama. Negara wajib menghormati hak setiap orang atas "kebebasan pikiran, suara hati, dan agama. Hak ini akan termasuk kebebasan untuk memiliki atau menerima sebuah agama atau

²⁷ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1988, hlm. 363

kepercayaan yang dipilihnya sendiri, dan kebebasan untuk, atau secara pribadi atau bersama dengan orang lain, dan di tempat umum atau sendirian, memperlihatkan agama atau kepercayaannya dalam bentuk ibadat, ketaatan, praktek, dan pengajaran. Siapa pun tidak akan ditempatkan di bawah paksaan yang dapat mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau menerima sebuah agama atau kepercayaan yang dipilihnya sendiri.²⁸

II.4.3 Dilema antara Agama dan Negara

Seorang warga kerap dihadapkan pada loyalitas pada agama atau pada negara. Dualisme semacam ini memunculkan dilema antara agama dan negara yang disebabkan beberapa hal berikut:

1. Eksklusivisme agama.

Eksklusivisme mempunyai beberapa bentuk. Misalnya, sekelompok penganut agama hanya memperhatikan diri sendiri. Kenyataan bahwa ada agama-agama dan aliran-aliran lain tak dianggap. Dengan sendirinya mereka akan merasa tidak puas dengan penyelenggaraan negara, karena negara juga memberikan perhatian pada kelompok-kelompok lain. Negara mengakui adanya pluralitas dalam masyarakat dan dengan demikian tidak dapat memenuhi semua harapan kelompok itu. Maka kelompok itu merasa dilalaikan atau bahkan dimusuhi oleh negara dan dengan demikian tidak mengidentifikasikan diri dengannya. Lebih gawat lagi apabila eksklusivisme berdasarkan pendapat, bahwa kelompok-kelompok lain tidak berhak atas perlakuan yang sama.

²⁸ *International Covenant on Civil and Political Right*, pasal 18, yang diterima oleh Sidang Umum PBB 1996. Seperti dikutip Franz Magnis-Suseno, *Ibid.*, hlm. 364

2. Puritanisasi agama.

Puritanisasi agama berarti usaha untuk membersihkan kehidupan beragama dari semua unsur yang tidak berasal dari dasar agama itu sendiri. Puritanisasi dapat berkembang dari suatu usaha yang wajar dan hakiki bagi setiap agama wahyu, yaitu bahwa umat itu senantiasa akan kembali ke paham-paham asalnya untuk memastikan bahwa masih setia pada Sabda Allah.

3. Dilema solidaritas

Apabila rasa persatuan sebagai umat beragama sedunia sangat kuat, dapat terjadi dilema loyalitas antara agama dan negara. Hal ini terjadi jika negara mengambil suatu kebijakan nasional yang tidak sesuai dengan harapan umat agama sedunia itu.

4. Dilema kepatuhan

Negara dan agama merasa berhak bahkan berkewajiban untuk menuntut kepatuhan mutlak dan untuk tidak membiarkan ketidakkepatuhan. Dengan demikian akan terjadi dilema kepada siapa seseorang beragama harus patuh, kalau negara memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan sebaliknya.

5. Dilema wewenang ideologis

Dilema kepatuhan antara agama dan negara dapat menjadi tajam apabila negara diselenggarakan berdasarkan sebuah ideologi yang harus dianut oleh semua anggota masyarakat. Karena ideologi adalah sesuatu yang di samping kepatuhan juga mau menuntut kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah

wewenang khas agama. Maka masalah ideologi negara juga merupakan masalah hubungan antara agama dan negara.

BAB III

METODOLOGI



III. 1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang analisisnya menekankan pada **analisis kualitatif**. Salah satu dari bentuk analisis kualitatif adalah "*case-study*", yaitu metode penelitian yang mempelajari salah satu gejala nyata yang terdapat dalam kehidupan masyarakat secara mendalam dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif**, yaitu penelitian yang mendekatkan hasil analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tak menggunakan dukungan data kualitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal yang merupakan penelitian sampel kecil.²⁹

Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³⁰

Tipe penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan akhir penelitian, yakni bahwa karena masalah ini cukup menarik dan hanya dapat diperoleh

²⁹ Julia Brannen, *Memilih Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 13

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998, hlm. 3

penyelesaiannya dengan mencari informasi dari obyek yang dipilih untuk diketahui pendapatnya melalui dialog secara mendalam.

III.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana (*discourse analysis*). Wacana disini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Akan tetapi bahasa yang dianalisis disini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktek tertentu. Bahasa juga dipahami dalam situasi dan masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini situasi ketika wacana dipertanyakan pada para biarawan Katolik

III. 3 Jenis Penelitian

Berdasarkan tataran analisisnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian yang melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

III.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah biarawan Katolik yang dimintai pendapatnya tentang wacana mereka berkaitan dengan agama dan politik. Para biarawan Katolik yang diwawancarai berjumlah 5 orang. Jumlah ini telah dianggap cukup mewakili untuk mengetahui wacana politik dan agama di kalangan biarawan Katolik

III.5 Operasionalisasi Konsep

Untuk mempermudah analisis, penulis akan mengemukakan beberapa konsep yang perlu dioperasionalisasikan, yaitu sebagai berikut :

a. Masyarakat majemuk

Masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk seperti yang dikemukakan oleh Furnivall³¹, karena masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bahasa dan juga agama. Keanekaragaman tersebut dikhususkan pada agama yang di Indonesia terdapat lima agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Selain itu masih terdapat agama dan kepercayaan yang jumlahnya juga beragam alias tidak sedikit

b. Agama

Agama merupakan bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti yang tercantum dalam Pancasila pada sila yang pertama. Agama di Indonesia

³¹ J S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1944. Seperti dikutip Budi Rajab, *Op.cit.*, hlm. 3

diidentikkan dengan kepercayaan dan budaya menyembah Tuhannya dalam suatu upacara ritual tertentu.

c. Negara

Negara Indonesia merupakan sekelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan teritorial tertentu yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan negara yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang mengandung dasar, tujuan dan cita-cita bangsa.

d. Politik

Politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk yang menyangkut persoalan demokrasi, birokrasi, dan juga pemerintahan.

e. Demokrasi

Demokrasi merupakan wahana bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pembangunan bangsa yang dalam kenyataannya membutuhkan peran serta masyarakat. Demokrasi juga dapat dianggap sudah terlaksana atau sudah tercapai apabila dalam negara yang menganut sistem demokrasi, masyarakatnya diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan ikut serta dalam penentuan kehidupan bangsanya (misalnya dalam pemilihan calon pemimpin atau presiden)

III. 6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tidak ditetapkan untuk meliputi suatu daerah atau wilayah saja, melainkan akan disesuaikan dengan keberadaan obyek yang

menurut kriteria tertentu dapat dijadikan penyumbang data atau informasi yang diinginkan.

III.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan panduan wawancara (*guide interview*) yang dijadikan patokan peneliti ketika melakukan wawancara dengan biarawan Katolik. Data kualitatif berupa hasil wawancara mendalam yang diperoleh dari biarawan Katolik (*purposive sampling*) baik yang pernah terlibat langsung dalam percaturan politik di Indonesia (misalnya pernah ikut serta dalam dialog atau seminar politik, menulis artikel di majalah maupun surat kabar) ataupun yang hanya merasa tertarik untuk membicarakan masalah politik. Wawancara juga diarahkan untuk menjangkau dialog dengan biarawan Katolik yang belum pernah melakukan kegiatan politik praktis namun bersedia dimintai komentar atau pendapatnya berkenaan dengan topik penelitian dimaksud.

Pengumpulan data akan dihentikan apabila terjadi perulangan-perulangan informasi (telah mencapai titik kejenuhan).

III.8 Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul dari panduan wawancara akan dianalisis sesuai kategori yang ditentukan dari panduan wawancara tersebut. Wacana biarawan Katolik tentang politik dan agama akan dipilih dalam beberapa kategori, yaitu pluralitas agama, agama dan negara, agama dan demokrasi, serta gereja Katolik dan politik.

Analisis diarahkan dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi wacana yang dikembangkan oleh biarawan Katolik tentang politik dan agama.

BAB IV

GEREJA KATOLIK, BIARAWAN KATOLIK, DAN POLITIK

IV.1 Arti dan Makna Gereja

IV.1.1 Asal Usul dan Arti Katanya

Kata gereja berasal dari kata "igreja" dibawa ke Indonesia oleh para misionaris Portugis. Kata tersebut adalah ejaan Portugis untuk kata Latin *ecclesia*, yang berasal dari bahasa Yunani, *ekklesia*. Kata Yunani itu sebetulnya berarti "kumpulan" atau "pertemuan", "rapat". Namun gereja atau *ekklesia* bukan sembarang kumpulan, melainkan kelompok orang yang sangat khusus. Untuk menonjolkan kekhususan itu dipakailah kata asing itu. Kadang-kadang dipakai kata "jemaat" atau "umat". Tetapi perlu diingai bahwa jemaat ini sangat istimewa. Maka barangkali lebih baik memakai kata gereja saja, yakni *ekklesia*. Kata Yunani itu berasal dari kata yang berarti "memanggil". Gereja adalah umat yang dipanggil Tuhan. Itulah arti sesungguhnya kata gereja.³²

IV.1.2 Pengertian Gereja dalam Kitab Suci dan Ajaran Gereja

Kata gereja bukanlah semacam batasan atau definisi. *Ekklesia* adalah kata yang biasa saja pada zaman para rasul. Dari cara memakainya, kelihatan bagaimana jemaat perdana memahami diri dan merumuskan karya keselamatan Tuhan di antara mereka. Kadang-kadang mereka berkata "gereja Allah" atau juga "jemaat Allah" (1 Korintus 10:32; 11:22; 15:9, dan seterusnya), yang kiranya

³² Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik, Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta. Kanisius, 1996, h. 332

sesuai dengan cara berbicara orang Yahudi (Ulangan 23:1.2; Hakim-hakim 20:2, dan seterusnya).³³ Maksud sebutan itu dapat menjadi jelas dari I Korintus 11:77-22. Di situ Paulus berbicara mengenai jemaat yang berkumpul untuk perayaan Ekaristi. Mereka menjadi "jemaat" atau "gereja" karena iman mereka akan Yesus Kristus, khususnya akan wafat dan kebangkitan-Nya. Gereja adalah "jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus" (I Korintus 1:2). Maka sebetulnya ada tiga "nama" yang dipakai untuk gereja dalam Perjanjian baru. "Umat Allah", "Tubuh Kristus", dan "bait Roh Kudus". Ketiga-tiganya berkaitan satu sama lain.

IV.2 Gereja yang Katolik

Kata Katolik adalah kata yang sulit. Secara harfiah dengan kata itu dinyatakan bahwa gereja berkembang "di seluruh dunia". Gereja tersebar ke mana-mana, namun tidak benar bahwa tidak ada tempat yang tidak ada gereja. Banyak daerah dan negara tidak mengenal gereja St. Ignatius dari Antiokhia, yang untuk pertama kalinya memakai kata ini, berkata "Di mana ada uskup, di situ ada jemaat, seperti di mana ada Kristus Yesus, di situ ada gereja Katolik". Yang dimaksudkan adalah dalam perayaan Ekaristi, yang dipimpin oleh uskup, hadir bukan hanya jemaat setempat tetapi juga seluruh gereja. Jadi, gagasan pokok bukanlah bahwa gereja telah tersebar ke seluruh dunia, melainkan bahwa dalam setiap jemaat setempat hadir gereja seluruhnya. "Gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam gereja-gereja setempat dan terhimpun daripadanya" (Lumen Gentium 23).³⁴

³³ Konferensi Waligereja Indonesia. *Ibid.*, h. 332

³⁴ Konferensi Waligereja Indonesia. *Ibid.*, h. 349

Kata Katolik selanjutnya juga dipakai untuk menyebut gereja yang benar, gereja universal yang dilawankan dengan sekte-sekte. Dengan demikian kata Katolik mendapat arti yang lain: "Gereja disebut Katolik, karena tersebar di seluruh muka bumi dan juga karena mengajarkan secara menyeluruh dan lengkap segala ajaran iman tertuju kepada semua manusia, yang mau disembuhkan secara menyeluruh pula" (St Sirilus dari Yerusalem).³⁵ Sejak itu kata katolik tidak hanya mempunyai arti geografis, tersebar ke seluruh dunia, tetapi juga menyeluruh, dalam arti lengkap, berkaitan dengan ajarannya, serta terbuka dalam arti tertuju kepada siapa saja.

Pada zaman reformasi kata Katolik muncul lagi untuk menunjuk pada gereja yang tersebar ke mana-mana, dibedakan dengan gereja-gereja Protestan, yang pada waktu itu masih terbatas pada daerah-daerah Eropa tertentu. Sejak itu dengan kata Katolik secara khusus dimaksudkan umat Kristen yang mengaku paus sebagai pemimpin gereja universal, tetapi dalam syahadat kata Katolik masih mempunyai arti asli "universal" atau "umum". Ternyata universal pun mempunyai dua arti, yang kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dalam arti geografis, bahwa umat Allah hidup di tengah segala bangsa serta memperoleh warganya dari semua bangsa. Sedangkan kualitatif merujuk bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak diterima oleh gereja. Gereja disebut Katolik karena dengan perantaraannya Roh Kudus hadir di seluruh dunia.

Konsili Vatikan II tidak lagi memusatkan perhatiannya pada gereja sebagai sekelompok manusia terbatas, melainkan kepada gereja sebagai sakramen Roh

³⁵Konferensi Waligereja Indonesia, *Ibid.*, h. 349

Kristus “Kekatolikan” gereja berarti bahwa pengaruh dan daya pengudus Roh tidak terbatas pada para anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Dengan sifat Katolik dimaksudkan bahwa gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri karena Roh yang berkarya di dalamnya. Yang pokok bukanlah bahwa gereja merengkul atau menerima segala sesuatu, melainkan bahwa ia dapat menjiwai seluruh dunia dengan semangatnya. Oleh karena itu, yang Katolik bukan hanya gereja universal, melainkan juga setiap anggotanya, sebab di dalam setiap jemaat hadirilah seluruh gereja.

Gereja Katolik memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan gereja Protestan berdasarkan penghayatan masing-masing, antara lain: (1) tekanan ada pada sakramen dan pada segi sakramen (manusiawi-kelihatan) karya keselamatan Allah, (2) agama adalah kontemplasi (memandang), (3) bersifat kultis yang mementingkan kurban (Ekaristi), (4) perasaan, kesenian, dan kehangatan cukup dipentingkan, (5) hubungan dengan gereja menentukan hubungan dengan Kristus, (6) gereja secara hakiki (dari Kristus) bersifat hirarkis, dan (7) Kitab suci dibaca dan dipahami di bawah pimpinan hirarki.

IV.3 Keanggotaan Gereja

Gereja adalah persekutuan yang semua anggotanya sungguh-sungguh sederajat martabatnya, sederajat pula kegiatan umum dalam membangun Tubuh Kristus (Lumen Gentium 31).³⁰ Ada fungsi khusus dalam gereja yang diemban oleh hirarki, ada corak hidup khusus yang dijalani oleh biarawan-biarawati, ada

³⁰ Konferensi Waligereja Indonesia, *Ibid.*, hlm. 362

fungsi dan corak hidup keduniaan yang menjadi medan khas para awam. Tetapi yang pokok adalah iman yang sama akan Allah dalam Kristus oleh Roh Kudus. Yang umum lebih penting daripada yang khusus.

IV.3.1 Hirarki

Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik “di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat”. Lebih khusus lagi sebagai suatu “serikat resmi yang dilengkapi dengan jabatan hirarkis” (Lumen Gentium 8).³⁷ Menurut ajaran resmi gereja struktur hirarkis termasuk hakikat kehidupannya juga. Maka Konsili mengajarkan bahwa “atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja” (Lumen Gentium 20).³⁸ Para pengganti mereka, yakni para uskup, dikehendaki-Nya menjadi gembala dalam gereja-Nya hingga akhir zaman. (Lumen Gentium 18) ³⁹

IV. 3.2 Struktur Hirarki Gereja

Struktur hirarkis gereja sekarang terdiri dari dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya, dan para imam serta diakon sebagai pembantu para uskup. Dalam kitab suci belum ada struktur kepemimpinan yang terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Peranan Petrus di antara para rasul tidak sama dengan kuasa dan kedudukan paus sekarang ini.

IV.4 Hidup Bakti Biarawan

Hakikat hidup membiara sering juga disebut “hidup bakti” untuk menonjolkan pembaktian diri yang dilakukan oleh biarawan-biarawati. Namun

³⁷ Konferensi Waligereja Indonesia. *Ibid.*, hlm. 363

³⁸ Konferensi Waligereja Indonesia. *Ibid.*, hlm. 363

perlu disadari, bahwa setiap orang kristiani juga dibaktikan kepada Tuhan dengan baptis. Yang khusus pada para biarawan-biarawati adalah bahwa mereka mau menuruti nasihat Injil secara istimewa dengan mengucapkan kaul dan memilih suatu gaya hidup tertentu dalam kehidupan bersama yang tetap. Gaya hidup mereka yang secara sadar dan resmi menyatakan miskin, taat dan wadat demi Kerajaan Allah merupakan suatu nilai tersendiri dan menjadi sumbangan berharga baik bagi gereja maupun bagi masyarakat. Sejarah hidup bakti di Indonesia menunjukkan arah yang makin jelas merakyat.³⁹

Biarawan tidak termasuk hirarki. Hanya saja ada biarawan yang ditahbiskan imam. Mereka sekaligus anggota kebiaraan dan pembantu uskup, tetapi hidup membiara sendiri bukan fungsi gerejawi, melainkan corak kehidupan. Oleh karena itu, Konsili Vatikan II mengajarkan, "Meskipun status yang terwujudkan dengan pengikraran nasihat-nasihat Injil, tidak termasuk susunan hirarkis gereja, namun juga tidak dapat diceraikan dari kehidupan dan kesucian gereja" (Lumen Gentium 44), sebab hidup membiara berkembang dari kehidupan gereja sendiri, bahkan "nasihat-nasihat Injil didasarkan pada sabda dan teladan Tuhan" (Lumen Gentium 43).⁴⁰ Tetapi apa yang berupa nasihat dari Yesus, oleh usaha "pimpinan gereja, dibawah bimbingan Roh Kudus" berkembang menjadi "bentuk-bentuk penghayatan nasihat Injil yang tetap".

Hidup membiara tidak ditentukan oleh fungsi atau pekerjaan, melainkan oleh corak atau cara kehidupan, khususnya kehidupan yang di dalamnya orang "dengan kaul-kaul atau ikatan suci lainnya mewajibkan diri untuk hidup menurut

³⁹ Konferensi Waligereja Indonesia, *Ibid.*, hlm 363

⁴⁰ Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, 1996, hlm 363

tiga nasihat Injil⁴¹, yaitu selibat atau keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan (Lumen Gentium 44).⁴² Selibat atau keperawanan memang merupakan inti atau hakikat hidup bakti, sebab dengan kaul itu orang membaktikan diri secara total dan menyeluruh kepada Kristus. Kebaktian permandian, yang merupakan sikap penyerahan setiap orang Kristen, dengan kaul keperawanan atau selibat dinyatakan dalam seluruh hidup dan setiap seginya sebagai bentuk atau corak kehidupan. Akibat pembaktian total itu adalah “kewajiban bertarak sempurna dalam selibat” (Kitab Hukum Kanonik Kanon 599). Namun selibat tidak sama dengan tidak kawin. Itu bukan inti-pokok hidup membiara. Yang pokok adalah penyerahan total kepada Kristus, yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan juga dengan terus-menerus semakin mengarahkan diri kepada Kristus, khususnya dalam hidup doa.

IV.4.1 Sumbangsih Biarawan-Biarawati Bagi Masyarakat

Sumbangan dasar yang dapat diberikan biarawan-biarawati adalah kesaksian hidup dan sikap kenabian yang mengungkapkan nilai-nilai yang makin dibutuhkan dunia modern, khususnya masyarakat Indonesia dalam pembangunan yang semakin cepat. Kesaksian itu mengajak orang mengalami bahwa tujuan hidup tidak terbatas pada hal-hal yang duniawi, manusiawi, yang materiil saja, melainkan menjangkau pada yang adi-kodrati, abadi, dan ilahi. Dengan gaya hidup itu biarawan-biarawati menggarisbawahi sifat setiap hidup manusia menuju Tuhan. Maka hidup biarawan-biarawati menjadi tanda yang memberi peringatan

⁴¹ Konferensi Waligereja Indonesia. *Ibid.*, hlm. 375

⁴² Konferensi Waligereja Indonesia. *Ibid.*, hlm. 376

kepada setiap umat kristiani dan seluruh bangsa. agar menjadikan Tuhan sebagai isi hidup dan tujuan hidup.

Sumbangan biarawan-biarawati juga diungkapkan dalam pelayanan-pelayanan terutama di bidang-bidang yang lebih langsung menyangkut nilai-nilai kemanusiaan seperti pendidikan, sosial, kesehatan, pastoral. Di sana biarawan-biarawati menyapa manusia sebagai manusia, pribadi sebagai pribadi, masyarakat sebagai persekutuan manusia-manusia. Dalam semangat kerasulan yang murni, biarawan-biarawati dapat menolong sesamanya mengejar cita-cita kesejahteraan bersama dan mengatasi pelbagai egoisme yang sering menjamur di dalam masyarakat dan gereja.

Komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan seperti kesamaan, kejujuran, keadilan semestinya juga disebarluaskan, misalnya lewat pelbagai sarana komunikasi sosial. Biarawan-biarawati mau membagikan keyakinan bahwa nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi secara tetap dan konsisten.

IV.5 Gereja, Awam, dan Kehidupan Politik

“Apa sikap gereja terhadap kemungkinan lahirnya kembali partai Katolik?” Itulah salah satu contoh jenis pertanyaan yang sering terdengar dari berbagai kalangan umat Katolik awam. Gereja yang dimaksud dalam pertanyaan itu jelas berarti pimpinan hirarki gereja, khususnya pimpinan KWI. Itulah batasan pemahaman banyak orang Katolik awam tentang gereja. Mereka tidak selalu menyadari bahwa bagian terbesar gereja adalah orang awam.

Lebih sempit lagi, apa pun jabatan seorang rohaniwan, sebagai pastor paroki atau kepala sekolah, bahkan seorang biarawan atau biarawati yang kebetulan menjabat sebagai kepala sekolah, sikap dan tingkah lakunya tidak jarang dianggap sebagai mewakili sikap atau tingkah laku gereja. Kekecewaan terhadap salah seorang dari mereka dapat menyebabkan kekecewaan terhadap gereja.

Dalam bidang politik, tugas dan wewenang utama pimpinan gereja adalah mengungkapkan dasar-dasar iman dan nilai-nilai moral Kristiani yang harus melandasi praktek kehidupan politik di lapangan yang menjadi wewenang awam Katolik. Tidak mudah menarik batas antara keduanya. Pimpinan gereja mungkin juga tidak selalu siap menyatakan sikap dan pendiriannya yang jelas dalam waktu singkat mengenai suatu hal.

Salah satu bentuk keterlibatan para tokoh Katolik dalam politik seperti pernah terjadi di tahun 1957 tentang konsepsi Presiden yang merupakan persiapan ke arah "demokrasi terpimpin" di era Soekarno. Waktu itu terjadi perbedaan pendapat antaran Uskup Jakarta, Mgr. A. Djajaseputra, S.J. yang menentang dan uskup Semarang, Mgr. A. Soegijapranata, S.J., yang mendukungnya. Namun perbedaan diantara keduanya tidak tampak menggoyahkan I.J. Kasimo, pemimpin Petai Katolik yang dengan tegas menolak "konsesi Presiden". Dia lebih mandiri daripada orang-orang awam Katolik zaman sekarang.

Bentuk keterlibatan lain adalah munculnya Surat Gembala Prapaskah 1997, pada bagian awalnya disebutkan: "kemelut yang melanda partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang memuncak dengan 'Peristiwa 27 Juli', mempunyai banyak

muatan sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Kejadian itu ditandai oleh kekerasan yang memakan korban jiwa dan harta benda. Terasa adanya kecenderungan untuk main hakim sendiri tanpa menghormati hak dan martabat manusia, hukum dan asas keadilan pada berbagai pihak." Surat Gembala itu mengacu pada "berbagai pihak". Dapat dimengerti bahwa pimpinan gereja tampaknya mereka tidak berwenang menghakimi pihak yang mana memulai kekerasan, "main hakim sendiri tanpa menghormati hak dan martabat manusia, hukum dan asas keadilan". Di pihak lain, banyak petunjuk bahwa semua itu akibat rekayasa pemerintah Soeharto secara terang-terangan. Yang terlibat bukan sekadar "oknum-oknum" ABRI, melainkan pemerintah, termasuk khususnya ABRI, secara struktural.

Ketidakjelasan itu bisa dimanfaatkan oleh sejumlah orang Katolik yang terlibat dalam rekayasa itu secara langsung ataupun tidak langsung, atau sekurang-kurangnya membiarkan atau mendukungnya, untuk mempertahankan bahkan mungkin membenarkan sikap dan tindakannya karena gereja terkesan membiarkannya. Mungkin sekali pihak pimpinan gereja ingin menghindari perpecahan diantara umat Katolik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, sekurang-kurangnya diantara kalangan tertentu.

Pimpinan gereja tidak bisa dan tidak perlu menyikapi setiap masalah, tetapi gereja tidak tinggal diam dan tidak selalu lamban dalam masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan. Atas dasar pengungkapan terjadinya kemerosotan moral di segala bidang dalam Surat Gembala Prapaskah KWI 1997, Surat Gembala KWI pada peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan 1998, meskipun

mungkin tampak lambat, namun telah mengungkapkan landasan moral bagi gerakan dan tuntutan reformasi.

Keterlibatan umat Katolik dalam politik hendaknya merasa wajib untuk menjadi warga negara yang aktif, tidak menghindari kehidupan politik aktif. Sebagai orang beriman kristiani, orang Katolik diutus ke dalam masyarakat dan itu berarti ia juga diutus untuk ikut berpartisipasi dalam dimensi politik.

Keterlibatan itu merupakan suatu panggilan yang mulia karena demi kesejahteraan umum. Umat Katolik wajib dengan jujur dan tanpa pamrih memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam cara bangsa Indonesia dipimpin. Prinsip yang harus dipegang teguh adalah "salus populi suprema lex" (keselamatan rakyat itulah hukum paling dasar). Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa dan secara khusus membangun solidaritas dengan warga masyarakat yang miskin tertinggal dan tersingkir.

Untuk meningkatkan partisipasi umat Katolik dalam kehidupan sosial-politik bangsa Indonesia, Sidang Agung mengajukan beberapa harapan.⁴³ Umat Katolik, terutama generasi muda, perlu disiapkan untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan sosial politik dengan cara:

- Menanamkan dan memperkuat penghayatan perpaduan iman kristiani dan wawasan kebangsaan sebagai motivasi dasar;
- Memperluas dan memperdalam pemahaman perkembangan kehidupan politik di tanah air dengan segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi dari waktu ke waktu;

⁴³ Konferensi Waligereja Indonesia, *Op.cit.*, 1996, hlm. 140

- Mendorong berkembangnya pemikiran kritis dan kreatif serta integritas kepribadian untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi.
- Mendorong partisipasi lebih luas dan aktif dalam kehidupan sosial politik bersama dengan golongan agama lain demi persatuan bangsa Indonesia dan kesejahteraan umum.

Dalam rangka itu pembinaan kader-kader Katolik perlu ditingkatkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku.

Satu hal yang patut dipegang bahwa dalam berpolitik umat Katolik tidak diperkenankan mengatasnamakan gereja.⁴⁴ Seorang politisi Katolik dalam berpolitik tidak bicara dan tidak bertindak atas nama gereja dan tidak mewakili umat Katolik. Ia bertindak atas nama dan tanggung jawabnya sendiri, dan tanggung jawabnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dalam berpolitik, umat Katolik tidak berada di bawah wewenang pimpinan gereja. Uskup dan Sri Paus pun tidak dapat memerintahkan kepadanya apa yang harus dilakukannya. Mereka dapat, kalau ada alasan kuat, mengeluarkan kritik atau harapan – hal yang sama juga dapat mereka lakukan terhadap politisi bukan Katolik – tetapi mereka tidak berhak untuk memberikan perintah. Politisi bertanggung jawab terhadap kesadaran dan suara hatinya sendiri. Dalam arti itu ia otonom.

⁴⁴ Franz Magnis-Suseno, *Beriman Dalam Masyarakat, Butir-Butir Teologi Kontekstual*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 139.

BAB V TEMUAN DATA



Di Indonesia, agama seringkali tunduk pada kemauan manusia. Subordinasi agama pada berbagai kepentingan, penempatan agama sebagai legitimasi, bahkan sekularisasi dan pemisahan tegas antara agama dan politik, kesemuanya terjadi di Indonesia. Ini menodai idealitas agama.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang posisi agama dan politik dalam wacana yang berkembang di Indonesia terutama di kalangan biarawan Katolik akan dijelaskan dalam uraian berikut. Uraian dibagi dalam sub-sub bahasan, yaitu: krisis moralitas, masyarakat ideal, pluralitas agama, serta agama dan negara.

V.1 Krisis Moralitas

Wacana politik dan agama di kalangan biarawan Katolik menonjolkan wacana tentang moralitas sebagai masalah-masalah yang sering dihadapi oleh bangsa Indonesia. Wacana paling menonjol adalah kemerosotan moral. Hal ini sesuai dengan keluarnya Surat Gembala Prapaskah 1997 yang menyatakan bahwa terjadi kemerosotan di hampir semua bidang kehidupan.

Kita disadarkan bahwa kita sedang menghadapi suatu masalah serius, yang sangat mendasar dan berdampak amat luas. Kita semakin yakin bahwa kita sedang menghadapi kemerosotan moral hampir di semua bidang kehidupan masyarakat yang dapat membahayakan, bahkan menghancurkan persatuan, masa depan dan keselamatan bangsa kita.⁴⁵

⁴⁵ Surat Gembala Prapaskah 1997, hlm. 4

Kemerosotan moral terjadi karena pembangunan selama ini ditekankan pada pembangunan fisik dan ekonomi. Akibatnya menghancurkan segala aspek kehidupan karena adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyebab lain kemerosotan moral adalah pendangkalan penghayatan religiusitas. Terjadi reduksi atas esensi penghayatan terhadap agama. Agama hanya dihayati sebatas aktivitas liturgis-ritualistik serta menekankan faktor institusi seperti jumlah anggota, jumlah gedung ibadah, dan sebagainya.

Terjadinya pendangkalan penghayatan religiusitas yang ada dalam setiap agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME hanya dihayati sebatas aktivitas liturgis-ritualistik serta menekankan faktor institusi: jumlah anggota, jumlah gedung ibadah, dan sarana yang lain, dll.

Kemerosotan moral sendiri merupakan akibat dari perubahan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan sosial itu saling berkaitan erat satu sama lain, mendukung dan menunjang. Seperti jumlah penduduk, pengaruh teknologi modern dan kekuatan-kekuatan ekonomi internasional, lalu lintas komunikasi internasional yang menghubungkan semua daerah, sistem pendidikan dan sebagainya di dunia dalam sekejap.

Agama dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang akan menjadikannya mampu mempertahankan diri menghadapi perubahan sosial secara positif. Agama diharapkan memelopori terbentuknya masyarakat yang terbuka. Namun selama masyarakat belum bisa memaknai perubahan yang ada, apalagi perubahan sosial dianggap sebagai hal yang justru menimbulkan semacam *culture lag* maka kemerosotan moral akan merajalela di Indonesia.

Kemerosotan moral juga dapat dimaknai sebagai hasil dari gejala negatif perubahan sosial, yakni pembongkaran dari lingkungan-lingkungan sosial asli dan

individualisasi proses kerja, pembangunan yang semakin tidak merata, masyarakat semakin terpecah dalam lingkungan-lingkungan primordial, dan pembongkaran nilai-nilai asli masyarakat Indonesia.

Wacana lain yang mengemuka adalah tentang budaya politik. Ada kecenderungan dalam upaya menegakkan demokrasi justru mempergunakan kekerasan sebagai pedoman hidup (*violence as a way of live*). Makin kerasnya lingkaran kekerasan di masyarakat merupakan akibat pendekatan militeristik dalam hidup kemasyarakatan. Bahkan telah memunculkan tindakan anarkis yang tak terkendali di mana-mana.

Semakin ketatnya lingkaran kekerasan memeluk warga masyarakat sebagai akibat pendekatan militeristik dalam hidup kemasyarakatan. Bahkan sudah melahirkan anarki yang tak terkendali di mana-mana.

Penyelesaian masalah cenderung menggunakan kekuatan otot daripada otak. Pengalaman di masa orde baru, kekerasan menjadi alat untuk mencapai keinginan dan kekuasaan. Militer bertindak sebagai *back up* kekuasaan.

Selain itu terjadi pula *power abuse in justice* misalnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tak serius sehingga jurang antara kaya dan miskin makin lebar. Budaya demokrasi tak berjalan. Kedaulatan rakyat yang dimandatkan kepada pemerintah belum dapat dinikmati rakyat. Suara rakyat baru didengar dan ditampung, sedangkan tindak lanjutnya belum terealisasi. Misalnya pemilu yang diharapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik belum terwujud. Pemerintahan masih berpola feodalis dan berorientasi pada kekuasaan.

Sumber masalah dalam bidang politik juga ditengarai terjadi akibat jumlah partai yang bertambah banyak selain dipengaruhi pula oleh faktor kolusi dan korupsi yang merajalela.

Kemudian di bidang politik dulu partainya sedikit sekarang partainya banyak. Itu kan menjadi masalah besar. Ya orang tidak terbiasa berdemokrasi di situ untuk menghargai pendapat. Itu kan sulit disini, di Indonesia harus belajar. Kemudian juga masalah tadi di seputar korupsi, kolusi. Nah, itu menjadi masalah yang luas sekali. Dan saya lihat juga ada ini sekarang masalah beragama yang juga ada kaitannya dengan politik juga, ekonomi, dan sebagainya karena dulu kan sering pemerintah kan menggunakan agama untuk diperalat. Jadi masalahnya kompleks sekali kira-kira. Saya kira itulah masalah-masalah yang akan menjadi masalah besar di tahun-tahun mendatang.

Disharmoni antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat merupakan sumber masalah yang ditengarai akan muncul di kemudian hari. Orang jadi mudah terpancing untuk melakukan kerusuhan. Emosi didahulukan daripada rasionalitas.

Krisis besar. Orang begitu mudah terpancing untuk bikin kacau. Jadi masa tidak stabil. Dan kita bisa lihat, sudah lihat jelas sekali. Dari kami Antropolog sudah lihat itu nama. Boleh omong pada masa Soeharto. Semua menuju ke desintegrasi. Dan bahwa tidak ada harmoni antara kelompok etnis, kelompok agama, sekurang-kurangnya di beberapa daerah itu tidak umum. Dan segala yang terjadi sekurang-kurangnya dalam satu tahun terakhir ini (1999) menunjukkan bahwa krisis makin mendalam. Selain itu ada orang yang mempunyai niat mengacaukan negara ini. Siapa? Tidak jelas. Tetapi saya pernah baca artikel di *Republika*, saya kira 3 atau 6 Maret tahun ini (1999), waduh itu di sana dia menulis, itu seorang sejarawan yang menganalisis metode pada masa Mojopahit. Nah, itu metode dari Mojopahit itu persis sama seperti sekarang. Orang tidak berani menolak sesuatu, juga tidak berani membunuh orang secara langsung yang tidak disukai. Jadi dibuat dengan cara ada kacau. Dikorbankan sekian banyak umat sendiri supaya kebetulan yang lain juga mati. Itu dibuat begitu. Apa yang tidak alami bulan Mei tahun lalu (1998). Nah itu identik. Jadi rezim Soeharto itu begitu. Jadi sejarawan itu menulis bahwa yang ditulis dalam buku sejarah untuk sekolah itu mitos. Sejarah di sekolah itu mitos mengenai Mojopahit. Mojopahit itu ada bersifat imperial.

Kerusuhan-kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia dianggap sebagai pemicu terjadinya desintegrasi bangsa di masa depan jika tidak ditangani secepat

mungkin. Kerusuhan dianggap sebagai sumber masalah dalam kehidupan bangsa Indonesia

Berbagai kejadian seperti aksi demonstrasi, kerusuhan, nira, penjarahan dan sebagainya yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia saat ini hanyalah sketsa dari sebuah gambaran permasalahan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Permasalahan mendasar yang sebenarnya tengah dihadapi bangsa-bangsa yang ditengarai dengan banyaknya pelanggaran atas HAM. Akibat serius bila krisis moneter, ekonomi, dan politik yang terjadi ini tidak segera diselesaikan secara tuntas bisa jadi ancaman disintegrasi bangsa (krisis persatuan)

V.2 Masyarakat Ideal

Wacana yang berkembang di kalangan biarawan Katolik tentang masyarakat ideal yang semestinya diwujudkan di masa depan Indonesia terfokus pada kesamaan martabat manusia. Prinsip-prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia serta penghargaan terhadap keberagaman menjadi ciri masyarakat ideal yang diidamkan. Kesamaan martabat antara manusia, dianggap bersumber dari pemahaman terhadap agama masing-masing pihak. Ketika seorang warga negara Indonesia memiliki tingkat religiusitas tinggi dalam arti memahami nilai-nilai yang diajarkan dalam agamanya, dengan sendirinya ia akan mau menghargai orang lain sebagaimana ajaran agamanya. Mengembangkan prinsip solidaritas menjadi syarat lain dari masyarakat ideal. Solidaritas yang terbentuk menjadi perekat kehidupan bermasyarakat antar warga negara Indonesia. Nantinya akan terbentuk kesatuan dan persaudaraan tanpa lagi memandang perbedaan agama, suku, ras, dan sebagainya.

Masyarakat yang sangat menghargai kesamaan martabat manusia yang bersumber dari religiusitas agama masing-masing. Ada tiga nilai yang hendaknya diwujudkan bersama: egalitas (kesamaan martabat), solidaritas dan unitas (kesatuan-persaudaraan)

Bentuk masyarakat yang diidamkan seperti halnya *civil society* yang mengembangkan pola demokrasi, menghormati kedaulatan rakyat, mampu bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat yang diidamkan adalah yang memahami kebhinekaan sebagai keunikan bangsa Indonesia dan mau menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa yang menjunjung kejujuran, keadilan, serta berupaya untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang sejahtera, damai, dan saling mengasihi.

Hidup dalam harapan merupakan wacana lain yang berkembang di kalangan biarawan Katolik. Artinya keberagaman penduduk Indonesia seperti terdapat dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika akan bermanfaat sekali jika benar-benar dapat dilaksanakan.

Nah, hidup dalam harapan. Motto utama yang ada dalam lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jelas ada perbedaan, seperti di setiap bangsa ada perbedaan. Cuma karena Indonesia itu bangsa besar, terdiri dari sekian banyak suku dan kelompok etnis, sekian banyak kelompok agama. Jelas sekali belum terintegrasi seperti negara yang sudah merdeka sejak 1.000 – 2.000 tahun. Itu jelas. Jasanya Soekarno saya lihat. Sekurang-kurangnya dan sejarah saya tahu bahwa dia mempersatukan. Tetapi terkesan sekali pada awal saya baru tiba di Indonesia, baru 2-3 tahun saya sering ketemu dengan guru yang sudah pensiun di Flores. Dan kebanyakan mereka memuji Indonesia Serikat. Ya memuji bukan main. Saya tanya, "Lho, apa kelebihan Indonesia Serikat?" "Romo, jelas sekali bisa urus diri sendiri." Sekarang kita diurus oleh Jawa. Tidak diperhatikan beda budaya antara Jawa dan sini (Flores). Tidak diperhatikan *interest* kami di sini, kebutuhan dan kepentingan lokal. Semuanya sesuai politik Jakarta. Bagaimana Jakarta melihat kami. Selama saya disini 34 tahun itu makin jelas. Sebelum 34 tahun yang lalu saya tak ada disini tapi dari cerita orang itu ada begitu. Di masa Soeharto, awalnya bagus pembangunan. Tapi kian lama kita lihat korupsi dan apa saja itu muncul.

Perbedaan tak lagi dianggap sebagai unsur pemecah kesatuan namun justru digunakan untuk lebih merekatkan satu sama lain demi terwujudnya masyarakat ideal yang diidamkan. Faktor pemimpin negara dijadikan alasan untuk lebih

mewujudkan rekatnya perbedaan-perbedaan yang ada. Perbandingan kala Soekarno menjadi presiden yang tidak menerapkan sentralistik dalam pemerintahan seperti dilakukan dalam masa Republik Indonesia Serikat menjadikan ada keleluasaan dalam bertindak pada masing-masing daerah. Pada saat ini, sebelum otonomi daerah diberlakukan, segala urusan terpusat ke Jakarta. Daerah-daerah tidak dibiarkan mengurus dirinya sendiri tapi terus dikontrol oleh pusat. Bahkan sumber penghasilan daerah yang semestinya dikembalikan daerah bisa jadi terserap ke pusat karena ada kontrol terpusat.

Penghargaan terhadap manusia menjadi kunci dari terbentuknya masyarakat ideal. Namun hal ini belum dapat terwujud karena masih sebatas slogan tanpa ada realisasi tindakan nyata yang mengarah pada penghargaan terhadap manusia. Misalnya permasalahan HAM yang belum juga mendapat proporsi utama dalam kehidupan berbangsa. Seperti halnya terjadi dalam kasus Timor-Timur yang diduga banyak terjadi pelanggaran HAM. Para tersangka pelanggaran HAM masih saja bisa lolos dari jeratan hukum.

Sebenarnya kalau sudah dilaksanakan semua sudah ideal sekali sebenarnya. Sekarang ini pengertian dalam persepsi saja. Dengan adanya penghargaan pada manusia. Tadi soal kehidupan, soal HAM ya tadi dalam politik. Jadi kalau itu dilaksanakan sudah baik itu ya. Saya kira tidak akan jauh beda dari itu kalau itu benar dilaksanakan. Sekarang ini karena hanya dilaksanakan sebagai slogan tidak dilaksanakan karena bahayanya nilai itunya. Yang saya takutkan muncul ide jadi negara Islam, terkadang ide itu muncul. Jadi bahayanya sekarang kalau itu hanya dipakai kedok saja, hanya dipakai untuk stempel tapi tidak di... dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan pemerintahan yang masih bertumpu pada kekuasaan presiden bahkan melebihi MPR yang semestinya memegang kedaulatan tertinggi negara. Pemisahan tugas eksekutif dan legislatif maupun yudikatif belum nampak jelas. Lembaga yang satu masih ikut campur dalam urusan lembaga yang lain.

Pada dasarnya sudah mawadahi kemudian tadi kan sikap belum jelas, seperti presiden harus dibatasi itu kan belum jelas. Belum dirumuskan dengan baik, kalau dibatasi mungkin dia bisa baik. Kemudian juga pemilahan fungsi kekuasaan dia antara eksekutif, yudikatif, legislatif sekarang kan campur-campur ya. Legislatif dicampuri eksekutif. Yudikatif juga tidak mandiri dia. Dan kemudian kekuasaan lebih bertumpu pada presiden. Atur semuanya dia. Padahal teorinya kan presiden dibawah MPR tapi kan MPR tak berdaya.

V.3 Pluralitas Agama

Wacana tentang pluralitas agama meliputi tiga hal, yaitu: keanekaragamaman agama dan kepercayaan, tanggapan atas isu mayoritas-minoritas, dan hubungan antara mayoritas-minoritas. Dalam memahami keanekaragaman agama dan kepercayaan di Indonesia, biarawan Katolik cenderung menganggap sebagai sebuah realitas yang tak dapat dipungkiri. Namun, di balik itu terselip sebuah potensi menjadi kekuatan destruktif. Penyebabnya antara lain masih adanya sikap primordial-eksklusivistik, yang memandang agama-agama lain sebagai "sub human".

Kondisi pluralistik ini jelas tidak dapat ditolak. Ini merupakan sebuah realitas yang memiliki sumber keberadaannya secara illahi. Kondisi pluralistik yang seharusnya menjadi kekuatan positif ternyata telah menjadi kekuatan destruktif. Karena ternyata masing-masing pemeluk agama masih terjebak dalam sikap primordial-eksklusivistik sehingga memandang yang lain sebagai "sub human". Sikap primordial-eksklusivistik inilah yang menjadi rumput kering yang dengan mudah dibakar oleh api konflik.

Agama sendiri dianggap paling benar dan paling baik dibandingkan dengan agama dan kepercayaan lain yang ada. Jika sikap ini dikembangkan maka perpecahanlah yang akan terjadi. Pluralitas justru dijadikan sebagai alat untuk memecah belah, untuk mengadu domba antar pemeluk agama untuk melanggengkan kekuasaan.

Pluralitas sering dijadikan alat untuk mengadu domba. Ciri-ciri yang berbeda dari tiap-tiap kelompok masyarakat dijadikan pemicu pertikaian. Sehingga keberagaman tidak dihayati sebagai suatu anugerah melainkan sebagai suatu ancaman bagi kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Padahal "keanekaragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia harus dilihat sebagai keumikan yang semakin memperkaya budaya bangsa yang saling melengkapi." Akibatnya muncul orang-orang yang menjadi pemicu pertikaian atau konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan ciri-ciri baik agama, suku, ras, maupun etnis.

Sejak awal berdirinya negara Indonesia, sudah mempunyai beraneka ragam agama. Dengan adanya beberapa agama, akan menjadikan masyarakat menghormati perbedaan-perbedaan, dan hal tersebut juga merupakan pendidikan demokrasi. Tetapi kenyataan pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia ini dijadikan alat untuk memecah-belah, untuk adu domba oleh pribadi yang menginginkan kekuasaannya langgeng. Di masyarakat kelas bawah, sebenarnya soal agama tidak menjadi masalah, mereka bisa hidup berdampingan dan rukun. Yang perlu diwaspadai adalah orang-orang yang sering menjadi pemicu

Pluralitas agama menghasilkan tiga tema dan prinsip umum¹⁶: (1) bahwa pluralisme keagamaan dapat dipahami dengan paling baik dalam kaitan dengan sebuah logika yang melihat Satu yang berwujud banyak - realitas transenden yang menggejala dalam bermacam-macam agama; (2) bahwa ada suatu pengakuan bersama mengenai kualitas pengalaman agama partikular sebagai alat; dan (3) bahwa spiritualitas dikenal dan diabsahkan melalui pengenalan kriteria sendiri pada agama-agama lain.

Pluralitas juga dijadikan alat politis. Agama dipolitisasi oleh orang yang menggunakan agama demi kepentingan kelompoknya. Misalnya dalam kasus

Situbondo dimana memunculkan peluang agar orang Islam menyalahkan orang Kristen, kasus Ambon yang melibatkan dua pemeluk agama Islam dan Kristen

Wacana yang muncul tak hanya memandang sebelah mata pluralitas. Ada pula wacana yang berkembang yang menganggap pluralitas sebagai suatu keunikan yang makin memperkaya budaya bangsa. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak dianggap sebagai pemicu konflik melainkan menjadi unsur-unsur yang melengkapi hidup bangsa. Misalnya dengan melakukan dialog-dialog antar agama.

Nah, seharusnya bangsa yang berbudaya itu menghormati kevakiman orang lain. Itu dasar. Kalau saya betul-betul mempunyai kebudayaan yang tinggi, saya menghormati klainan orang lain. Apakah itu etnis, agama, saya menghormati. Saya bisa mengatakan sebagai orang asing, banyak hal di Indonesia itu goblok. Saya sebagai orang Eropa, saya harus menyesuaikan diri. Empati. Saya sampai sekarang menyesuaikan diri. Nah, itu adalah minimum yang seharusnya ada dalam pengertian antar kelompok-kelompok, juga antara kelompok agama. Itu penyelesaian, kalau mau betul-betul integrasi, ya harus diakui. Tak ada orang lain dari mata saya. Maksudnya menghormati. Itu waktu saya dengar pemboman di Istiqlal. Itu kawan-kawan dan kami semua disini dan saya juga dapat telepon dari kawan, pastor semuanya. Bagaimana pun itu rumah ibadah. Bukan rumah ibadah saya, tapi rumah ibadah. Karena itu sesuatu yang suci dan tak dihormati. Nah, itu suatu tanda bahwa budaya Indonesia atau budaya, katakanlah budaya kekerasan, daripada akarnya atau kebudayaan Indonesia begitu merosot sehingga ada yang terciptanya situasi macam ini.

Tentang isu mayoritas-minoritas, ada wacana tentang penolakan resistensi terhadap wacana dominan mengenai mayoritas. Misalnya: penyangkalan terhadap Islam sebagai agama mayoritas. Pembanding yang digunakan adalah data BPS yang menyebut bahwa 90 persen penduduk Indonesia beragama Islam dibandingkan dengan kondisi riil yang berjumlah kurang dari 90 persen.⁴⁷

Islam 90%, saya meragukan pertanyaan tersebut. Karena masih ada kaum 'abangan' Islam yang *beneran* menurut saya kurang lebih 40 - 60% dari jumlah

⁴⁶ Coward Harold, *Pluralisme, Tantangan Bagi Agama-Agama*, Yogyakarta, Kanisius, 1989, hlm. 168-169.

⁴⁷ J. Soedjati Djiwandono dalam bukunya "Gereja dan Politik", "Dari Orde baru ke Reformasi" menyebutkan bahwa perkiraan jumlah penganut Islam hanya sekitar 40 persen.

penduduk. Namun karena sudah ada pernyataan bahwa masyarakat Indonesia 90% dari jumlah penduduknya adalah Islam, ada istilah kaum minoritas, mayoritas berdasar agama. Dan istilah ini menurut saya tidak tepat. Mengapa harus berdasar agama? Mengapa tidak berdasar suku? Mengapa tidak berdasar jenis kelamin? Kalau berdasar suku, kaum mayoritas adalah Jawa, kalau berdasar jenis kelamin ya, perempuan. Jadi istilah tersebut di atas adalah *'salah kaprah'*.

Penyangkalan wacana mayoritas dilakukan dengan menggugat dasar penentuan mayoritas pada kuantitas bukan kualitas yang lebih berkaitan dengan keimanan yang diamanatkan oleh penganutnya. Jadi tidak cukup hanya beragama, namun harus disertai iman.

Yang terjadi bagi saya bukan soal mayoritas dan minoritas pemeluk agama secara kuantitatif, namun soal mayoritas dan minoritas kepentingan secara kualitatif. Militer itu jumlahnya berapa sih, kok begitu berkuasanya? Mengapa tidak mempersoalkan itu saja? Jadi yang menjadi soal pokok sebenarnya adalah kepentingan.

Asumsi adanya kaum mayoritas dan kaum minoritas yang diperoleh dari data BPS 1997 memang nyata. Menanggapi isu tersebut, evaluasi yang perlu dilakukan bukan terhadap kuantitas pemeluk agama melainkan pada kualitas yang telah dicapai pemeluk agama, sejauh mana pemeluk agama beriman jadi tidak cukup hanya beragama.

Wacana penyangkalan atas penentuan mayoritas-minoritas dilandasi dari kejadian dalam politik yang selalu berupaya memenangkan kelompok yang dianggap mayoritas. Akibatnya terbentuk in-group dan out-group dari kelompok minoritas yang berasa terancam. Kekhawatiran yang juga di kalangan mayoritas terhadap kelompok minoritas dianggap sebagai bentuk kelucuan yang mengada-ada.

Biasanya kalau anda tahu dari Sosiologi, dari Antropologi mahi Psikologi itu kelompok minoritas gampang sekali rasa terancam. Itu gampang kok, sebab terbentuk in-group, out group. Out-group selalu dicurigai. Ada sesuatu yang aneh sekali kalau mayoritas menganggap diri terancam. Ada satu artikel bagus, saya dapat dari internet, dari seorang kawan kirim. Itu interest sekali, orang Islam sebagai tuan rumah di Indonesia itu interest sekali. Untuk apa ribut-ribut bikin partai memperjuangkan Islam karena sama sekali tidak diperhatikan. Masa tidak diperhatikan. Diperhatikan? Malah diatur mereka sebagai mayoritas tidak perlu bikin kongres bahwa presiden itu mesti Islam, mesti laki, mesti ini, mesti itu. Lho, rasa diri terancam itu pendiri partai Bulan Bintang militan. Ini karena Islam terancam. Islam terancam? Memang 'tunjukkan'. Apakah orang

Kristen membakar mesjid? Jadi Timtim karena mereka sudah jengkel. Tapi kenapa gereja itu dibakar sekaligus Situbondo Jakarta Barusan ini di Sulawesi Selatan Ujungpandang Gereja dengan paroral seluruhnya dibakar. Tak ada dalam berita, sama sekali tidak. Di lain tempat itu di Solo, gereja-gereja dilempai dengan batu. Pada hal pemuka agama sudah bilang, jangan pakai istiqlal sebagai alasan. Karena justru orang mau buat kacau. Itu saja tujuannya. Supaya orang Islam boleh hantam. Siapa ada di belakangnya? Kurang jelas. Tapi dari apa yang dikatakan oleh ahli bom itu saya jelas. Dia tidak sebut nama. Pertama, siapa punya akses ke bahan peledak TNT? Siapa? Kedua, bom itu ditaruh begitu bagus, bukan di mesjid karena kalau ditaruh di mesjid sendiri itu tidak memiliki efek seperti ada sekarang. Kalau mau merusak mesjid, dia bilang mesti ada 200 kilo. Jadi mesti bawa truk. Tapi mereka memperhitungkan persis efek ruang kosong. Dipasang di atas. Ruang kosong itu menimbulkan resonance dan efeknya dilipatgandakan. Sama seperti anda punya gitar atau apa atau biola. Itu bunyinya kecil sekali, tapi karena ada resonance itu kekuatannya puluhan kali lipat. Itu yang dipergunakan. Jadi itu mestinya ahlinya. Menurut ahli bom itu. Menurut saya itu cukup jelas. Provokatornya ada di luar negeri tapi orangnya ada di sini.

Untuk memahami hubungan mayoritas-minoritas. Dikembangkan wacana saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi kebebasan beragama dan martabat manusia tanpa ada upaya yang kuat menindas yang lemah. Harus dikembangkan pula kebiasaan pergaulan, hubungan, dan kerja sama dengan semua golongan pada semua tingkatan dan dalam semua bidang kehidupan, termasuk wilayah tempat tinggal, lapangan kerja, pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian, akan dapat mengurangi prasangka, kecemburuan dan ketegangan, serta sebaliknya mengembalikan komunikasi ke arah saling pengertian, saling menghargai dan menghormati.

Menghormati, saling menghormati. Khususnya mayoritas harus menghormati minoritas karena mereka berkuasa. Minoritas tidak bisa buat apa-apa. Mayoritas bisa mengancam minoritas. Nah itu, jadi dalam artikel yang saya sebut, orang Islam sebagai tuan rumah di Indonesia menunjukkan sikapnya terhadap yang bukan Islam dalam perilaku. Kalau saya terima seorang tamu, itu saya terima dengan ramah atau saya usir.

Upaya mewacanakan bentuk hubungan mayoritas dan minoritas dilakukan dengan mencontohkan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Flores dan Sampit.

Nah, kalau saya betul, ada pendidikan yang betul, saya terima dengan ramah. Tapi kalau mayoritas menganggap diri terancam, menganggap bahwa dia mesti dominasi dalam segala hal, ya eksisnya begitu. Ngambek. Barisan ada diskusi beberapa hari lalu. Masalahnya apa? Pendarang menguasai orang asli. Di Flores situasinya ada 20 tahun lalu kira-kira waktu saya ada di sana itu identik. Sama, invasi orang BIM (Bugis, Buton, Makassar). Timor-Timur sama. Itu ada politik untuk mengislamkan Indonesia secara paksa. Saya tahu teknikanya di sana. Mendirikan mesjid di tempat dimana tidak ada satu orang muslim. Hanya tunjuk pada dunia, di Indonesia, tidak ada tempat dimana Islam tidak ada. Di Flores itu ada begitu banyak orang Bugis dari dhulu kala mungkin 200-300 tahun itu damai satu sama lain. Hidup berdamaian. Di Sampit, tidak ada masalah. Datang pendatang bikin kacau. Waktu sesudah gempa kami itu begitu. Banyak orang dari luar masuk, sebagai tukang jual bakso, macam-macam. Tapi tujuannya hanya membikin kacau karena mereka mengamati-amati dan dimana kita bisa. Akibatnya apa, satu orang dibunuh karena pelecehan. Karena sudah terus, terus, terus, jadi satu orang dibunuh, sebetulnya kebetulan. Pastor, sama pastor dapat juga karena membela orangnya. Besoknya satu orang pun tak ada dan yang mengusir mereka itu orang Katolik sama muslim setempat. Muslim setempat usir mereka. Karena bilang, lho kita hidup di sini sudah per generasi tidak ada apa-apa, kita punya relasi baik, kenapa mesti kacau? Kamu datang bikin kacau, kami tidak mau.

Dari uraian berikut terlihat jelas bahwa konflik seputar mayoritas dan minoritas dianggap muncul ketika pergerakan bangsa Indonesia

Dari dulu saya masih ingat. Saya tinggal di seminari jadi orangnya banyak. Terakhir itu ada sampai 700 kira-kira, 700 mahasiswa. Tapi kalau makan? Jadi kami selalu pesan beras secukupnya. Yang membawa beras itu yang jadi leveran itu kebanyakan siapa, bapak haji. Iya, bapak haji dari pantai. Saya sendiri ngomong dengan dia. Saya ada bersama dia satu kali di kapal. Dia bawa kami ke daerah-daerah, keliling. Tak ada permusuhan sedikitpun. Dia malah jadi baik untuk kami karena darah kami mau itu pulau-pulau diduduki oleh orang-orang muslim, orang Bugis. No problem. Kami diterima disana dengan mulia sekali. Memang, orang kebanyakan baru pertama kali ketemu dengan pastor-pastor Katolik. Jadi heran melihat kita. Bagaimana ya? Tapi bagus sekali, bagus sekali. Beliau sendiri bapak haji cerita pada saya "Kalau saya jatuh sakit, saya tidak pergi ke dokter atau ke puskesmas, saya pergi ke suster, yang punya poliklinik". Kenapa? Karena selain itu dia punya pasti bukan obat palsu masih dia doakan obat itu, sehingga pasti saya sembuh. Nah, begitu relasinya antara seorang haji dan rohaniwan Katolik. Kami juga tidak ada masalah Cina-pribumi, tidak ada itu. Cina keriasama dengan Bugis, no problem. Nah, semestinya begitu. Karena misalnya di Flores itu mayoritasnya Katolik atau NTT umumnya mayoritasnya Kristen, ya Islam yang ada di sana sebaiknya menghormati. Kami minoritas, kami tidak agama Katolik tapi jangan kamu mengganggu kami. 14 tahun mereka adadi sana dan 14 kali jadi kacau. Sehingga sekarang orang Islam sendiri setempat, tidak mau terima orang Bugis lagi. Kenapa? Ya karena mereka omong terus terang, kalau kami ada masalah, terus terang omong, menghadap. Kalau orang Madura datang, itu hanya dari belakang, dengan pisau tusuk di punggung. Dan mereka menguasai segala-galanya. Misalnya, di Ambon, itu gubernur baru buat kebodohan yang amat sangat besar. Yang dari segi sosiologis dan politis, itu kebodohan, dia harus dipecat. Semua pegawai Kristen diusir dan masuk semua Islam. Padahal mayoritasnya Kristen. Itu seperti bensin yang hanya tunggu. Di NTT setelah saya memang pegawainya mayoritas Kristen, entah Katolik entah Protestan. Mayoritasnya orang setempat. Tapi tidak berarti Islam tidak ada, tidak

jadi pegawai di situ, ada. Kalau menganggap agama sebagai pesaing, itu tidak sehat

Gambaran hubungan mayoritas-minoritas juga dilakukan dengan memberi ilustrasi tentang kondisi di Eropa tentang apa yang selayaknya dilakukan di Indonesia terkait perlakuan terhadap mayoritas maupun minoritas.

Coba lihat di Eropa sekarang. Hampir sama banyak mesjid daripada gereja. Padahal itu daerah Kristen. Cuma penderitanya banyak sekali orang Turki, orang Afrika utara, di Perancis. Di lain tempat itu orang Turki, muslim. Negara mengakui bahwa mereka ada hak mempunyai tempat ibadah. Waktu belum ada tempat ibadah. Pada waktu ramadhan, gereja di... atau sebagian dijadikan tempat ibadah. Iya, silakan. Anda bisa berdoa di situ. Saya masih ingat cerita seorang pastur yang kunjungi umat di NIT. Kunjungi umat di satu daerah, dimana umatnya sedikit sekali, umat Katolik. Mayoritasnya Islam. Ia tidak ada gereja di sana, tidak ada sekolah, tidak ada tempat dimana bisa beribadah. Rumah itu terlalu kecil. Jadi apa, dia punya relasi baik sekali pemimpin umat Islam, pemuka umat Islam di tempat. Ini ketua tidak mempunyai kesulitan. Bapak pastur kumpulkan umatnya di mesjid. Pastur buat misa di mesjid. Nggak ada masalah. Ibadah sama ibadah, tidak menyembah berhala. Ini menyembah Tuhan yang sama. Cuma caranya lain. Itu, itu seharusnya begitu.

V.4 Agama Dan Negara

Hubungan ideal antara agama dan negara memunculkan wacana penolakan terhadap campur tangan negara dalam agama. Ada prinsip-prinsip yang semestinya dilakukan dalam interaksi agama dan negara. Secara umum wacana yang berkembang agama harus terpisah dari negara.

Agama dan negara sama-sama mengabdikan masyarakat yang sama. Negara ada demi kesejahteraan umum. Dan oleh karena itu, negara tidak dapat diidentikkan dengan masyarakat. Meski agama memperhatikan transendensi manusia, namun agama juga terikat tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, meski di satu sisi agama merupakan bagian dari masyarakat, namun di sisi lain agama tidak dapat diidentikkan dengan masyarakat. Dalam perjuangan mewujudkan kesejahteraan umum, agama hendaknya menjadi pembela dan pelindung mereka yang miskin lemah tidak berdaya. Maka jika terjadi ketidakadilan terhadap martabat manusia, khususnya mereka yang lemah miskin tidak berdaya, agama harus tampil sebagai pelindung dan pembela, meski harus berhadapan dengan negara. Jika terjadi ketidakadilan terhadap martabat manusia dan agama diam saja, maka agama telah melakukan kekerasan diam. Karena diam merupakan sikap yang mendukung ketidakadilan. Jadi antara agama dan negara harus terpisah.

Agama dan negara harus kerjasama tanpa mencampuri urusan masing-masing. harus saling mengetahui batas masing-masing. Selain itu agama harus mandiri tidak boleh memasuki daerah negara. Negara diharapkan tidak ikut mengatur masalah-masalah agama.

Hubungan negara dan agama menurut saya bagaikan dua sisi mata uang. Negara dan agama tidak bisa dipisahkan tetapi harus dibedakan. Karena negara menguasai manusia, agama juga mengurus manusia. Adanya negara agar manusia hidup sejahtera, agama mengajarkan bagaimana manusia itu hidup damai, bertakwa. Jadi sebenarnya harus ada kerja sama, tetapi negara tidak boleh mencampuri urusan agama, demikian juga agama harus mandiri, tak boleh masuk ke 'daerah' negara. Antara negara dan agama harus tahu batasnya masing-masing.

Gambaran ideal mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia belum tercermin. Agama masih menjadi alat legitimasi negara, terutama oleh agama yang dianggap mayoritas. Negara juga masih mencampuri urusan agama. Kondisi ini dirasakan makin lama makin buruk. Sentimen agama jadi mengedepan terhadap agama tertentu.

Nah, ini sering di Indonesia dikatakan bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Ini nggak jelas mau ke mana. Saya pikir negara itu banyak mencampuri urusan agama. Jadi biarkan agama itu berkembang. Nah, itu tadi gagasan bukan negara agama, bukan negara sekuler, itu nggak jelas sebenarnya. Ada kecenderungan negara itu mau mengatur agama dalam berbagai hal. Saya kira biarkan saja. dalam arti negara itu menjamin, melindungi tapi tidak perlu banyak mengatur. Banyak aturan-aturan. Memang itu sering mungkin karena demi umat Islam mayoritas itu. Katanya negara Pancasila itu bukan negara agama juga bukan negara sekuler. Tapi kan nggak jelas ya. Itu yang sering dikatakan pejabat ya. Kadang-kadang saya juga tidak tahu juga. Pokoknya asal bukan negara sekuler juga bukan negara agama. Kayak apa itu? Iya malah kekaburan nilai ya yang menyebabkan. Justru lebih dekat ke negara agama. Itu kesan saya. Dimana ada

Nilai-nilai demokratis yang semestinya memberi penghargaan, perlindungan, dan pembelaan terhadap adanya perbedaan termasuk upacara ritual keagamaan belum sepenuhnya terwujud. Ada kalanya pemeluk agama masih menerapkan eksklusivisme-primordialistik, merasa diri dan agamanya paling

superior. Seorang pemeluk agama semestinya tak perlu merasa terganggu dengan ritual yang dilakukan pemeluk agama lain. Namun sikap penghargaan atas agama yang dianut orang lain tidak serta merta menyebabkan sikap mendua dengan ikut melaksanakan aktivitas keagamaan yang dianut orang lain sebagai dalih toleransi. Hal itu sudah menyimpang dari pakem agama. Penghargaan atas agama orang lain dalam konteks demokrasi diarahkan untuk menganggap perbedaan sebagai sesuatu untuk melengkapi kehidupan.

Ritus-ritus dalam masing-masing agama berbeda-beda, dan setiap ritus mempunyai arti dan makna sendiri, yang hanya bisa diketahui dan dihayati oleh masing-masing pemeluk agama. Maka supaya tidak menjadi masalah, sebaiknya, pemeluk agama yang satu tidak ikut-ikutan menjalankan ritus-ritus agama yang lain. Misalnya, seorang Katolik yang mengikuti sholat temanya di masjid, berarti dia bisa dikategorikan sebagai Islam, dan berarti mendua, ini yang menjadi masalah. Atau sebaliknya.

Dalam menjalankan kebebasan beragama, posisi negara seringkali menjadi alat legitimasi. Ada wacana korporatisme, segala sesuatunya bersumber dari negara. Agama digunakan untuk menopang superioritas negara. Misalnya pemimpin negara harus dari agama tertentu. Jika menentang kebijakan pemimpin negara diartikan sebagai upaya menentang agama yang dipeluknya. Negara masih sering bersikap tak adil dalam mengembangkan toleransi beragama. Negara dirasakan masih memihak agama yang dianggap mayoritas. Kebebasan beragama yang didengungkan dan dituangkan dalam UUD 1945 seringkali tak sesuai dengan praktek kesehariannya.

Wacana korporatisme kembali mencuat ketika negara menggunakan agama untuk mensukseskan program-programnya. Misalnya ketika pemerintah mencanangkan program KB Nasional, pemerintah menggunakan tokoh-tokoh

agama agar ikut mensosialisasikan program KB tersebut. Agama juga dijadikan alat politik untuk mensukseskan program pemerintah. Jika ditelusuri lebih lanjut tindakan pemerintah ini dapat tergolong pelanggaran HAM. Karena masalah privat seperti pemilikan anak jadi dibatasi dengan adanya program KB.

Posisi negara dalam kontroversi yang ada terkait isu Konghucu, perkawinan antara agama maupun pendirian tempat ibadah memunculkan wacana bahwa negara tak usah turut campur masalah-masalah itu. Keyakinan bahwa sesuatu dianggap sebagai agama atau kepercayaan, yang lebih memahami adalah penganutnya sendiri. Bukan hak negara untuk menyatakan sesuatu bisa dikatakan sebagai agama atau kepercayaan atau sebaliknya. Negara diharapkan bisa bersikap kompromis terhadap agama atau aliran sepanjang tidak mengacau atau membuat resah. Perlakuan negara diharapkan bias adil terhadap agama atau aliran yang ada.

Hubungan antara negara dan agama berkembang hingga isu sektarian. Wacana yang muncul di kalangan biarawan Katolik, penentu sektarian tidaknya negara adalah pemimpin negara. Jika pemimpin negara terjebak dalam kepentingan sektarian atau kepentingannya sendiri terutama kepentingan agamanya, kondisi pecah belah akan mudah terjadi. Isu sektarian sendiri sebenarnya muncul karena masyarakat belum bisa menerima perbedaan. Yang pada akhirnya akan memunculkan desintegrasi bangsa.

V.5 Agama Dan Demokrasi

Salah satu bentuk keterkaitan antara agama dan demokrasi adalah ketika muncul berbagai macam partai politik yang mengklaim berbasis agama.

Kecenderungan munculnya beragam partai politik berbasis agama dikarenakan sejak Pemilu 1955 kebebasan berserikat seakan dipasung. Semenjak reformasi yang membolehkan partai politik tumbuh subur, seakan ada beban yang terlepas. Tak ada lagi kekangan terhadap pendirian partai politik. Hal ini juga menunjukkan tak adanya kebebasan berpolitik di masa orde baru. Di masa orde baru jumlah partai politik yang diakui hanya tiga partai yang kemudian berkembang menjadi banyak partai di masa reformasi hingga saat ini di penghujung tahun 2002.

Berbagai macam partai politik yang muncul setelah berakhirnya rezim orde baru menunjukkan tidak adanya kebebasan berpolitik pada masa orde baru. Hal ini positif sejauh pendirian partai-partai politik tersebut konsisten dan tulus memperjuangkan kepentingan bersama untuk penyelenggaraan negara yang lebih demokratis terlepas basis-asas dari partai politik yang didirikan tidak menjadi masalah.

Banyaknya partai politik berbasis agama cenderung menunjukkan bahwa kepentingan lebih utama daripada visi agama. Agama hanya ditempatkan sebagai label dari kepentingan. Tujuan utamanya tak lebih untuk menjaring massa agar memilih partai yang bersangkutan dengan dalih simpati agama. Agama hanya sekadar tempelan untuk mendapat legitimasi dari pendukung partai.

Ya setelah sekian tahun, mulai tahun 1955, kebebasan berserikat dipasung. Ya seperti anak yang kehilangan mainannya dan sekarang mendapatkan mainan tersebut bisa dibayangkan pasti senang sekali. Lebih dari itu, ada banyak partai yang berbasis sosial agama menunjukkan dengan jelas bahwa kepentinganlah yang jauh lebih utama dari pada visi agamanya. Karena satu agama bisa sekian partai. Dengan demikian agama sebenarnya hanya menjadi *label name* dari kepentingan.

Banyaknya partai berbasis agama yang satu sama lain saling mengklaim menjadi pelaksana agama yang paling benar makin menumbuhkan iklim persaingan tidak sehat diantara partai-partai berbasis agama itu sendiri. Agama

dijadikan dalih untuk mengalahkan partai lain baik yang sama-sama berbasis agama maupun yang berbasis lain

Dari pihak gereja tak ada kebijakan melarang tumbuhnya partai politik dengan basis agama. Hanya saja partai tersebut tidak boleh mengatasnamakan gereja. Bahkan penggunaan Katolik sebagai label partai sebenarnya tidak diperkenankan karena seolah-olah partai tersebut merupakan wakil dari umat Katolik.

Kalau saya lebih baik tidak usah menggunakan basis agama, yang luas saja ya saya pikir. Karena kalau agama digunakan itu bisa menyebabkan perombakan dalam agama. Kalau partai kan kita bicara untuk kepentingan umum ya tidak usah berdasar agama. Itu kalau partai berbasis agama akan mengkotak-kotakkan. Pada dasarnya partai-partai tersebut akan hilang. Pada akhirnya masyarakat akan menilai sendiri. Partai tidak boleh mengatasnamakan gereja dalam berpolitik. Menggunakan label Katolik jug enggak boleh.

Wacana yang dikembangkan di kalangan biarawan Katolik, fungsi gereja hanya mendorong umatnya untuk aktif berpolitik. Gereja tak berpolitik secara langsung namun melalui umatnya. Peran gereja hanya menjadi pendorong umat agar tidak buta politik.

V.6 Gereja Katolik Dan Politik

Secara umum berpolitik berarti ikut serta atau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam negara demokratis, kehidupan politik menyangkut hidup dan kesejahteraan semua warga negara. Sebab itu, ada kemungkinan pada dasarnya berpolitik menjadi hak dan tanggung jawab semua warga negara.

Partisipasi dalam kehidupan politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Orang dapat berpolitik praktis, yaitu ikut serta dalam usaha memperoleh

kekuasaan politik. Hal itu dapat dilakukan baik bagi dirinya sendiri sebagai perseorangan atau atas nama partainya, atau sekurang-kurangnya membantu orang lain atau partai yang didukungnya memperoleh kekuasaan sesuatu dengan aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada. Politik praktis itu akan berlanjut dalam lembaga-lembaga negara apabila orang terpilih untuk duduk di dalam salah satu lembaga negara, sebagai perseorangan ataupun atas nama kelompok atau partainya. Namun, berpolitik praktis dapat juga berlangsung di luar lembaga-lembaga demokrasi ataupun lembaga-lembaga negara, terutama manakala lembaga-lembaga itu dipersepsikan sebagai tidak sewajarnya atau tidak sepenuhnya menyalurkan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, mereka yang merasakan aspirasinya tidak tersalurkan itu tetap berhak untuk menyatakan atau mengungkapkannya. Disinilah mereka dapat berpolitik praktis di luar lembaga negara resmi misalnya melalui unjuk rasa secara damai. Jika ini yang terjadi sudah menyangkut hak asasi tiap orang.

Di kalangan gereja Katolik, politik praktis bukanlah menjadi prioritas utama. Wacana menonjol dalam kaitan gereja Katolik dan politik adalah keterlibatan non politik praktis. Sumbangan gereja Katolik terhadap kehidupan politik di Indonesia terlihat ketika kalangan gereja mendidik kaum awam supaya paham hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada keseimbangan antara kehidupan bernegara dan gereja. Posisi gereja sekadar mendorong dan memajukan umat untuk ikut berpolitik. Sedangkan pihak gereja sendiri tidak diperkenankan untuk terjun langsung ke dunia politik dalam artian praktis, seperti menjadi anggota partai politik, anggota badan

legislatif, eksekutif, dan sebagainya. Peran gereja adalah ketika dimintai pendapat/opini tentang peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Keterlibatan kalangan gereja dalam politik dapat ditelusuri dari beberapa nama tokoh agama seperti Soegijapranata, van Lith, I.J. Kasimo, Romo Mangun. Konteks keterlibatan mereka sebatas memperjuangkan HAM.

Biarawan wati tidak boleh berpolitik dari arti praktis, yaitu mengejar kekuasaan dan memihak kelompok tertentu. Misalnya dengan menjadi anggota atau pengurus partai, atau menjadi anggota eksekutif, yudikatif dan legislatif. Namun biarawan wati harus ikut serta terlibat dalam kehidupan tata politis dalam arti perjuangan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini yang dipihaki haruslah yang benar, adil dan memihak mereka yang miskin lemah menderita. Benar, adil menurut siapa? Ya menurut prinsip-prinsip kristiani serta hati nurani. Dalam hal ini tidak jarang harus membela kelompok tertentu. Jika kelompok itu benar. Jadi bukan kelompoknya yang dibela, namun kebenarannya. Tidak jarang pula dalam memihak yang benar, adil dan mereka yang miskin lemah tidak berdaya harus berhadapan dengan kekuasaan yang korup, tidak adil dan represif. Ya itu sebuah resiko. Dari sini mungkin biarawan wati dituduh berpolitik praktis ya nggak apa-apa. Misalnya dalam surat Gembala Paskah KWI 1999 tentang Pemilu KWI menyatakan "sejujurnya kami berpendapat bahwa partai-partai yang tidak secara tulus mendukung reformasi karena kepentingan kelompok yang sempit, atau karena beban masa lalu yang telah menimbulkan kesengsaraan dan kerusakan bangsa ini selayaknya tidak dipilih". Pernyataan ini sangat jelas sekali, partai mana yang dimaksud. Apakah ini politik praktis? Bagi saya tidak! Karena suara KWI ini tegas membela kepentingan kesejahteraan hukum.

Keterlibatan biarawan Katolik dalam politik terbatas pada non politik praktis. Artinya kegiatan politik itu ditujukan untuk kepentingan umum. Misalnya ketika muncul Surat gembala prapaskah 1997. Ada kalangan Katolik yang merasa bangga dengan pimpinan gereja yang tegas, berani dan berprinsip jelas. Tetapi ada pula keluhan dan sedikit ketakutan di sebagian kalangan umat Katolik termasuk rohaniwan, apakah pimpinan gereja perlu bersikap begitu keras dan konfrontatif terhadap pemerintah.

Surat Gembala itu menegaskan bahwa tidak memilih dalam pemilu tidak berdosa. Secara eksplisit dijelaskan "Sejujurnya kami berpendapat bahwa partai-

partai yang tidak secara tulus mendukung reformasi karena kepentingan kelompok yang sempit, atau karena beban masa lalu yang telah menimbulkan kesengsaraan dan kerusakan bangsa ini selayaknya tidak dipilih". Pernyataan ini jelas sekali menunjuk partai politik mana yang dimaksud. Namun bukan berarti pihak gereja mendukung salah satu partai. Himbauan yang disebarkan lewat Surat Gembala 1997 tersebut cenderung merupakan ungkapan keprihatinan gereja atas fakta politik yang terjadi ketika itu. Gereja hanya berupaya memihak ada kepentingan dan kesejahteraan umatnya, bukan bermaksud berpolitik.

Pimpinan Gereja tidak bisa dan tidak perlu menyikapi setiap masalah, tetapi gereja tidak tinggal diam dan tidak selalu lamban dalam masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan. Atas dasar pengungkapan kemerosotan moral dalam Surat Gembala Prapaskah KWI 1997, Surat Gembala KWI pada peringatan hari Kemerdekaan 1998. Meskipun tampak lambat, juga telah mengungkapkan landasan moral bagi gerakan dan tuntutan reformasi.

Sebagai pernyataan kekuatan moral, gereja juga dapat berpolitik dalam konteks sebagai kekuatan moral. Dalam pengertian seperti itu, para rohaniwan, biarawan, dan biarawati juga berhak berpolitik. Larangan Vatikan atas para pastor berpolitik praktis perlu dipahami dalam pengertian "berusaha mencari kekuasaan politik". Oleh sebab itu, mereka itu dapat saja ikut serta dalam unjuk rasa, yang jelas-jelas tidak ditujukan untuk memperoleh kekuasaan.

Jadi, keterlibatan biarawan dalam politik dapat diakui bila inti gerakannya memperjuangkan keadilan yang mengarah pada kekuatan moral, bukan kekuatan politik. Misalnya dengan memberi ceramah atau diskusi tentang masalah-masalah

seperti kependudukan, aborsi, hak asasi, keadilan, rekonsiliasi, dan perdamaian. Keikutsertaan dalam politik non praktis dapat pula berwujud upaya membantu menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara, akan masalah-masalah politik yang dihadapi, serta alternatif-alternatif cara penyelesaiannya. Melalui berbagai bentuk partisipasi dalam kehidupan politik itu, akan mewujudkan kepedulian dan komitmen pada usaha menciptakan kesejahteraan umum. Dengan demikian jelas terlihat bedanya antara politik non praktis biarawan dengan politik praktis yang menginginkan kekuasaan.

BAB VI PENUTUP



VI.1 Kesimpulan

Wacana tentang agama dan politik di kalangan biarawan Katolik sebenarnya tidak asing lagi. Dari hasil wawancara yang dilakukan, para biarawan Katolik tidak menutup kemungkinan untuk terlibat dalam politik. Namun ada batasan yang diterapkan, yaitu politik yang dilakukan lebih bersifat non praktis. Dalam arti kegiatan politik yang dilakukan bukan dalam rangka mendapatkan kekuasaan seperti halnya ketika masuk menjadi anggota atau ketua partai politik maupun anggota DPR MPR. Konsep politik yang diterapkan oleh para biarawan Katolik dalam rangka kekuatan moral yang mengarahkan para umatnya untuk lebih memahami politik atau memberikan pandangan/opini tentang peristiwa-peristiwa politik. Hal ini dikarenakan ada wacana yang mengharapakan agama tidak dicampurkan dengan urusan negara. Implikasi lanjut adalah agama dan negara tidak dapat disatukan, harus dibedakan. Agama tidak seharusnya mencampuri urusan negara, dan sebaliknya negara tidak mencampuri urusan agama.

Intinya politik harus dipisahkan secara tegas dari agama. Pelaksanaan agama menjadi tanggung jawab tiap individu. Pun ketika individu itu terjun ke politik, tanggung jawab ada di pundaknya, tidak lagi mengatasnamakan agama untuk keterlibatannya dalam politik.

VI.2 Saran

Penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi meskipun dengan subyek yang sama, misalnya dengan mengambil topik selain agama dan politik. Dengan demikian akan diketahui pandangan biarawan Katolik tentang berbagai macam hal yang diwacanakan dalam kesehariannya sebagai variasi penelitian tentang kehidupan biarawan Katolik di masa datang



DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus, "Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas", *Kalam*, No. 1, 1994.
- Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, suatu analisis karya-karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 130.
- AP Budiyo HD, *Membina Kerukunan Hidup Antar Umat Beriman*, jilid 3, Yogyakarta: Kanisius, 1983, hlm. 140.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid II (Prancis), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Coward, Harold, *Pluralisme, Tantangan Bagi Agama-Agama*, Yogyakarta: Kanisius: 1989.
- Djiwandono, J. Soedjati, *Gereja dan Politik; Dari Orde Baru ke Reformasi*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Foucault, Michel, *Seks dan Kekuasaan, Sejarah Seksualitas*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik, Buku Informasi dan Referensi*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, 1996.
- Mills, Sara, *Discourse*, London and New York: Routledge, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Nugroho Bimo; Eriyanto; Frans Surdiansis, *Politik Media Mengemas Berita*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999.
- Rajab, Pluralitas Masyarakat Indonesia, Suatu Tinjauan Umum, *Prisma*, 6 Juni 1996.
- Ramlan Surbakti, Globalisasi, Sekularisasi, dan Bangkitnya Agama-agama, dalam Masyarakat Kebudayaan dan Politik, *Majalah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, No. 8, Th. V, 1992.
- Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman, Ok.: University of Oklahoma Press, 1991.
- Surat Gembala Prapaskah 1997.

Suseno, Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia, 1986.

Suseno, Franz Magnis-, *Mencari Makna Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Suseno, Franz Magnis-, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1988.

Suseno, Franz Magnis-, *Beriman Dalam Masyarakat, Butir-Butir Teologi Kontekstual*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Woso, Piet Maku, Toleransi, *Bimas Katolik*, No. 7, Triwulan IV Th. IV, 1973.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut Anda masalah-masalah apa sajakah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa "saat ini"?
2. Masyarakat ideal macam manakah yang Anda bayangkan yang semestinya diwujudkan di masa depan?

PLURALITAS AGAMA

3. Pluralitas agama merupakan tantangan khusus yang dihadapi negara-negara di dunia dewasa ini (tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan). Bagaimana pendapat Anda dengan kondisi keanekaragaman agama dan kepercayaan di Indonesia?
4. Di Indonesia, pemeluk agama Islam mencapai 90%, dan sisanya adalah pemeluk agama lainnya termasuk aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (BPS 1997). Angka tersebut memunculkan asumsi bahwa terdapat kaum mayoritas dan kaum minoritas dalam kehidupan beragama di Indonesia. Bagaimana evaluasi Anda terhadap isu ini?
5. Bagaimanakah hubungan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini semestinya dilaksanakan?

AGAMA DAN NEGARA

6. Bagaimana sifat hubungan antara agama dan negara yang ideal menurut anda?
7. Seberapa jauhkah gambaran ideal tersebut tercermin dalam kenyataannya di Indonesia?
8. Agama sebagai suatu bentuk kepercayaan dan budaya menyembah Tuhan mempunyai upacara ritual tertentu yang berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Perbedaan ini kadangkala secara tidak sadar menjadi persoalan antara pemeluk agama. Dengan mendasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang demokratis, bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut?
9. Kebebasan beribadah sering dianggap sebagai bagian dari hak yang paling asasi, bagaimanakah posisi negara selama ini tentang hal itu? Bagaimanakah dengan sekarang?
10. Pada masa lalu (bahkan beberapa orang percaya bahwa hal ini masih bertahan), pemerintah sering menggunakan agama sebagai alat untuk mensukseskan berbagai programnya. Di antaranya adalah persoalan Keluarga Berencana, kewajiban mencoblos, dan sebagainya. Dalam hal ini bagaimana pendapat Anda?
11. Bagaimanakah semestinya negara menempatkan posisinya dalam kontroversi di sekitar isu aliran kepercayaan, Kong Hu Chu, perkawinan antar agama, pendirian tempat ibadah?
12. Bagaimanakah Anda merespon klaim yang mengisyaratkan adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih sektarian?

AGAMA DAN DEMOKRASI

13. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, sekarang ini banyak muncul berbagai macam partai politik dengan berbagai basis sosial yang salah satunya menggunakan basis agama. Bagaimana Anda memahami hal ini?

GEREJA KATOLIK DAN POLITIK

14. Menurut Anda, apakah yang sudah diberikan oleh gereja Katolik sebagai sumbangan kepada kehidupan politik Indonesia?
15. Bagaimana Anda memandang keterlibatan biarawan Katolik dalam kehidupan politik di Indonesia?
16. Sampai sejauh mana keterlibatan tersebut diakui sebagai usaha mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat?
17. Bagaimanakah semestinya gereja Katolik menempatkan posisinya dalam perubahan yang sangat cepat yang terjadi belakangan ini?

WAWANCARA I

1. Menurut Anda masalah-masalah apa sajakah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa “saat ini”?

Ada 6 masalah mendasar:

- ❑ Terjadinya pendangkalan penghayatan religiusitas yang ada dalam setiap agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME hanya dihayati sebatas aktivitas liturgis-ritualistik serta menekankan faktor institusi: jumlah anggota, jumlah gedung ibadat, dan sarana yang lain, dll.
- ❑ Penghinaan terhadap martabat manusia yang dalam dirinya memiliki hak-hak asasi semakin hari semakin parah penghinaan ini justru dilakukan oleh mereka yang sebenarnya menjadi pelindung utama penghormatan martabat manusia.
- ❑ Masih kuatnya sikap primordial-eksklusivistik atas dasar suku, agama, etnis, golongan dan ideologi serta budaya.
- ❑ Kedaulatan rakyat yang dipinjamkan kepada penguasa belum dikembalikan kepada rakyat. Suara rakyat masih belum didengarkan, baru didengar dan ditampung.
- ❑ Pemberantasan keserakahan melalui praktek korupsi, kolusi dan nepotisme masih sebatas kata-kata kosong. Danjurang kaya miskin semakin menganga dengan lebarnya.
- ❑ Semakin ketatnya lingkaran kekerasan memeluk warga masyarakat sebagai akibat pendekatan militeristik dalam hidup kemasyarakatan. Bahkan sudah melahirkan anarkhi yang tak terkendali di mana-mana.

2. Masyarakat ideal macam manakah yang Anda bayangkan yang semestinya diwujudkan di masa depan?

Masyarakat yang sangat menghargai kesamaan martabat manusia yang bersumber dari religiusitas agama masing-masing. Ada tiga nilai yang hendaknya diwujudkan bersama: egalitas (kesamaan martabat), solidaritas dan unitas (keatuan-persaudaraan).

PLURALITAS AGAMA

3. Pluralitas agama merupakan tantangan khusus yang dihadapi negara-negara di dunia dewasa ini (tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan). Bagaimana pendapat Anda dengan kondisi keanekaragaman agama dan kepercayaan di Indonesia?

Kondisi pluralistik ini jelas tidak dapat ditolak. Ini merupakan sebuah realitas yang memiliki sumber keberadaannya secara illahi. Kondisi pluralistik yang seharusnya menjadi kekuatan positif ternyata telah menjadi kekuatan destruktif. Karena ternyata masing-masing pemeluk agama masih terjebak dalam sikap primordial-eksklusivistik sehingga memandang yang lain sebagai “sub human”. Sikap primordial-eksklusivistik inilah yang menjadi rumput kering yang dengan mudah dibakar oleh api konflik.

4. Di Indonesia, pemeluk agama Islam mencapai 90%, dan sisanya adalah pemeluk agama lainnya termasuk aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (BPS 1997). Angka tersebut memunculkan asumsi bahwa terdapat kaum mayoritas dan kaum minoritas dalam kehidupan beragama di Indonesia. Bagaimana evaluasi Anda terhadap isu ini?

Yang terjadi bagi saya bukan soal mayoritas dan minoritas pemeluk agama secara kuantitatif, namun soal mayoritas dan minoritas kepentingan secara kualitatif. Militer itu jumlahnya berapa sih, kok begitu berkuasanya? Mengapa tidak mempersoalkan itu saja? Jadi yang menjadi soal pokok sebenarnya adalah kepentingan.

5. Bagaimanakah hubungan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini semestinya dilaksanakan?

Yang mayoritas hendaknya dengan sadar memikul tanggungjawab utama dalam menjamin perwujudan hidup bersama penuh persaudaraan yang bersumber dari penghargaan terhadap kesamaan martabat manusia. Ini tidak berarti yang minoritas lepas tanggung jawab. Mayoritaslah yang memiliki panggilan menjamin kesejahteraan, kebebasan dan kesamaan hak serta kewajiban mereka yang minoritas lepas tanggungjawab. Tentu saja ini harus diperjuangkan dengan semangat solidaritas. Jika baik yang mayoritas maupun yang minoritas masih terjangkit penyakit "mayoritas atau minoritas syndrome" maka ya... sulit untuk sampai pada persaudaraan kebangsaan sejati. Karena mayoritas maupun minoritas sindrom selalu menjadikan kepentingan diri sendiri menjadi tolok ukurnya. Jika kepentinganku dirugikan, aku marah. Jika kepentingan orang lain... ya biar saja.

AGAMA DAN NEGARA

6. Bagaimana sifat hubungan antara agama dan negara yang ideal menurut anda?

Agama dan negara sama-sama mengabdikan masyarakat yang sama. Negara ada demi kesejahteraan umum. Dan oleh karena itu, negara tidak dapat diidentikkan dengan masyarakat. Meski agama memperhatikan transendensi manusia, namun agama juga terikat tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, meski di satu sisi agama merupakan bagian dari masyarakat, namun di sisi lain agama tidak dapat diidentikkan dengan masyarakat. Dalam perjuangan mewujudkan kesejahteraan umum, agama hendaknya menjadi pembela dan pelindung mereka yang miskin lemah tidak berdaya. Maka jika terjadi ketidakadilan terhadap martabat manusia, khususnya mereka yang lemah miskin tidak berdaya, agama harus tampil sebagai pelindung dan pembela, meski harus berhadapan dengan negara. Jika terjadi ketidakadilan terhadap martabat manusia dan agama diam saja, maka agama telah melakukan kekerasan diam. Karena diam merupakan sikap yang mendukung ketidakadilan. Jadi antara agama dan negara harus terpisah.

7. Seberapa jauhkah gambaran ideal tersebut tercermin dalam kenyataannya di Indonesia?

Di Indonesia, negara mengklaim dirinya identik dengan masyarakat. Demikian kuatnya negara sehingga agamapun ditentukan oleh negara. Bahkan gama "dibeli" dengan berbagai fasilitas yang akhirnya memandulkan fungsi profetiknya. Agama menjadi salah satu alat legitimasi negara. Misalnya, presidennya agamanya Islam, lalu kalau mengkritik presiden berarti melawan agama Islam.

8. Agama sebagai suatu bentuk kepercayaan dan budaya menyembah Tuhan mempunyai upacara ritual tertentu yang berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Perbedaan ini kadangkala secara tidak sadar menjadi persoalan antara pemeluk agama. Dengan mendasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang demokratis, bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut?

Demokrasi sumbernya adalah penghargaan terhadap martabat manusia. Dan meski manusia memiliki martabat yang sama, namun manusia diciptakan tidak seragam. Manusia yang satu dengan yang lain berbeda. Oleh karena itu, dalam demokrasi harus ada keterbukaan penghargaan, perlindungan dan pembelaan terhadap adanya perbedaan, termasuk di dalamnya perbedaan dalam menjalankan upacara ritual agama yang dianutnya. Perbedaan masih menimbulkan persoalan di antara para pemeluk agama karena para pemeluk agama masih terjebak dalam kubangan eksklusivisme-primordialistik yang intinya adalah superioritas diri sendiri. Dari sini muncul sikap bahwa yang berbeda dengan dirinya adalah salah atau sesat atau dalam bahasa agamanya kafir. Bahkan dalam masyarakat yang demokratis harus dihargai, dilindungi dan dibela mereka yang tidak beragama. Harus ada "tempat" bagi yang tidak beragama. Karena meski tidak beragama mereka tetap memiliki martabat yang sama sebagai manusia.

9. Kebebasan beribadah sering dianggap sebagai bagian dari hak yang paling asasi, bagaimanakah posisi negara selama ini tentang hal itu? Bagaimanakah dengan sekarang?

Negara seharusnya melindungi kebebasan menjalankan ibadat bagi semua rakyatnya. Namun dalam perjalanan waktu ternyata negara membutuhkan legitimasi dari salah satu agama. Di sinilah terjadi soal dalam menjalankan ibadat bagi pemeluk agama yang lain. Karena negara membutuhkan legitimasi maka agama tersebut juga menggunakan negara untuk menopang superioritasnya. Itu wajar saja, meski tidak tepat. Nah sekarang... belum ada perkembangan yang berarti karena masih ribut terus.

10. Pada masa lalu (bahkan beberapa orang percaya bahwa hal ini masih bertahan), pemerintah sering menggunakan agama sebagai alat untuk mensukseskan berbagai programnya. Di antaranya adalah persoalan Keluarga Berencana, kewajiban mencoblos, dan sebagainya. Dalam hal ini bagaimana pendapat Anda?

Agama merupakan salah satu kekuatan legitimasi yang sering digunakan negara atau lebih tepatnya orang-orang yang berkuasa untuk menguasai rakyatnya. Jika keluarga berencana sepi peminat, mereka yang mengatasnamakan negara bisa kehilangan muka. Atau jika pemilu sedikit yang mencoblos, orang-orang yang berkuasa bisa kehilangan kekuasaannya. Pendapat saya, dua hal itu sungguh keputusan privat. Jadi negara atau mereka yang mengatasnamakan negara tidak dapat ikut campur. *Mosok*, soal ranjang saja *kok* negara ikut campur tangan. Jika ada yang menolak, kemudian dilihat sebagai melawan agama atau tidak tunduk kepada ajaran agama. Agama seharusnya melindungi umatnya dari campur tangan yang bersifat represif. Agama harus menjadi pelindung dan pembela umatnya agar mereka dapat mengambil keputusan yang bebas sesuai dengan hati nuraninya.

11. Bagaimanakah semestinya negara menempatkan posisinya dalam kontroversi di sekitar isu aliran kepercayaan: Kong Hu Chu, perkawinan antar agama, pendirian tempat ibadah?

Yang pertama perlu disadari bahwa siapa yang boleh mengatakan bahwa X itu agama dan Y itu bukan? Ya umatnya sendiri, bukan negara. Jika umat Kong Hu Chu yakin bahwa Kong Hu Chu adalah agama, ya sudah. Negara harus mengakui itu. Dari para pengikutnya sendiri, aliran kepercayaan memang bukan agama ... ya sudah. Mereka hanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biarlah mereka hidup dengan apa yang mereka yakini. Tentang perkawinan antar agama ini tidak dapat dihindari. Biar diatur sesuai dengan agama masing-masing.

12. Bagaimanakah Anda merespon klaim yang mengisyaratkan adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih sektarian?

Klaim itu bisa datang dari para pemimpinnya atau elitnya. Jelas bergantung dari para pemimpinnya. Jika para pemimpinnya terjebak dalam kepentingan sektarian atau lebih tepatnya kepentingannya sendiri, ya akan terpecah belah. Saya rasa yang dipikirkan rakyat adalah hidup yang adil dan damai. Rakyat tidak memikirkan siapa yang menjadi pemimpin.

AGAMA DAN DEMOKRASI

13. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, sekarang ini banyak muncul berbagai macam partai politik dengan berbagai basis sosial yang salah satunya menggunakan basis agama. Bagaimana Anda memahami hal ini?

Ya setelah sekian tahun, mulai tahun 1955, kebebasan berserikat dipasung. Ya seperti anak yang kehilangan mainannya dan sekarang mendapatkan mainan tersebut ... bisa dibayangkan ... pasti senang sekali. Lebih dari itu, ada banyak partai yang berbasis sosial agama menunjukkan dengan jelas bahwa kepentinganlah yang jauh lebih utama dari pada visi agamanya. Karena satu agama bisa sekian partai. Dengan demikian agama sebenarnya hanya menjadi *label name* dari kepentingan.

GEREJA KATOLIK DAN POLITIK

14. Menurut Anda, apakah yang sudah diberikan oleh gereja Katholik sebagai sumbangan kepada kehidupan politik Indonesia?

Sumbangan yang paling khas adalah bahwa agama (Gereja) harus dipisahkan dari politik dalam arti mencari kekuasaan. Namun agama (Gereja) tidak dapat dipisahkan dari politik dalam arti memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan umum.

15. Bagaimana Anda memandang keterlibatan biarawan Katholik dalam kehidupan politik di Indonesia?

Biarawan/wati tidak boleh berpolitik dari arti praktis, yaitu mengejar kekuasaan dan memihak kelompok tertentu. Misalnya dengan menjadi anggota atau pengurus partai, atau menjadi anggota eksekutif, yudikatif dan legislatif. Namun biarawan/wati harus ikut serta terlibat dalam kehidupan tata politis dalam arti perjuangan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini yang dipihaki haruslah yang benar, adil dan memihak mereka yang miskin lemah menderita. Benar, adil menurut siapa? Ya menurut prinsip-prinsip kristiani serta hati nurani. Dalam hal ini tidak jarang harus membela kelompok tertentu. Jika kelompok itu benar. Jadi bukan kelompoknya yang dibela, namun kebenarannya. Tidak jarang pula dalam memihak yang benar, adil dan mereka yang miskin lemah tidak berdaya harus berhadapan dengan kekuasaan yang korup, tidak adil dan represif. Ya ...itu sebuah resiko. Dari sini, mungkin biarawan/wati dituduh berpolitik praktis...ya nggak apa-apa. Misalnya dalam surat Gembala Paska KWI 1999 tentang Pemilu, KWI menyatakan : "sejujurnya kami berpendapat bahwa partai-partai yang tidak secara tulus mendukung reformasi karena kepentingan kelompok yang sempit, atau karena beban masa lalu yang telah menimbulkan kesengsaraan dan kerusakan bangsa ini selayaknya tidak dipilih". Pernyataan ini sangat jelas sekali, partai mana yang dimaksud. Apakah ini politik praktis? Bagi saya tidak! Karena suara KWI ini tegas membela kepentingan kesejahteraan hukum.

16. Sampai sejauh mana keterlibatan tersebut diakui sebagai usaha mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat?

Sama dengan jawaban nomor 15

17. Bagaimanakah semestinya gereja Katholik menempatkan posisinya dalam perubahan yang sangat cepat yang terjadi belakangan ini?

Posisi gereja adalah penjaga suara hati masyarakat yang membela martabat manusia di atas segalanya

WAWANCARA II

1. Menurut Anda masalah-masalah apa sajakah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa “saat ini”?

- a. Kemorosotan moral, karena pembangunan selama ini sangat ditekankan pada pembangunan fisik, dan ekonomi. Akibatnya menghancurkan segala aspek kehidupan, karena ada kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Budaya Feodal.
Para pelaku penyelenggara negara sampai saat ini masih berpola feodalis dan kekuasaan

2. Masyarakat ideal macam manakah yang Anda bayangkan yang semestinya diwujudkan di masa depan?

Civil society masyarakat sipil yang mengemabngkan pola demokrasi, menghormati kedaulatan rakyat, tidak feodal, disiplin, tanggung jawab, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan menghormati hak asasi manusia.

PLURALITAS AGAMA

3. Pluralitas agama merupakan tantangan khusus yang dihadapi negara-negara di dunia dewasa ini (tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan). Bagaimana pendapat Anda dengan kondisi keanekaragaman agama dan kepercayaan di Indonesia?

Sejak awal berdirinya negara Indonesia, sudah mempunyai beraneka ragam agama. Dengan adanya beberapa agama, akan menjadikan masyarakat menghormati perbedaan-perbedaan, dan hal tersebut juga merupakan pendidikan demokrasi. Tetapi kenyataan pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia ini dijadikan alat untuk memecah-belah, untuk adu domba oleh pribadi yang menginginkan kekuasaannya langgeng. Di masyarakat kelasbawah, sebenarnya soal agama tidak menjadi masalah, mereka bisa hidup berdampingan dan rukun. Yang perlu diwaspadai adalah orang-orang yang sering menjadi pemicu.

4. Di Indonesia, pemeluk agama Islam mencapai 90%, dan sisanya adalah pemeluk agama lainnya termasuk aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (BPS 1997). Angka tersebut memunculkan asumsi bahwa terdapat kaum mayoritas dan kaum minoritas dalam kehidupan beragama di Indonesia. Bagaimana evaluasi Anda terhadap isu ini?

Islam 90%, saya meragukan pertanyaan tersebut. Karena masih ada kaum ‘abangan’. Islam yang *benaran* menurut saya kurang lebih 40 – 60% dari jumlah penduduk. Namun karena sudah ada pernyataan bahwa masyarakat Indonesia 90% dari jumlah penduduknya adalah Islam, ada istilah kaum minoritas, mayoritas berdasar agama. Dan istilah ini menurut saya tidak tepat. Mengapa harus berdasar agama? Mengapa tidak berdasar suku? Mengapa tidak berdasar jenis kelamin? Kalau berdasar suku, kaum mayoritas adalah

Jawa, kalau berdasar jenis kelamin ya, perempuan. Jadi istilah tersebut di atas adalah '*salah kaprah*'.

5. Bagaimanakah hubungan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini semestinya dilaksanakan?

Hubungan itu semestinya ya saling menghormati, menghargai dan seterusnya, ketentuannya ya memakai prinsip-prinsip umum seperti biasa orang berhubungan. Jadi tidak ada mayoritas menguasai minoritas, mau menang sendiri. Sedangkan di dalam keluarga saja yang kuat harus melindungi yang lemah, ini prinsip umum. Suami melindungi istri, tidak suami menindas istri.

AGAMA DAN NEGARA

6. Bagaimana sifat hubungan antara agama dan negara yang ideal menurut anda?

Hubungan negara dan agama menurut saya bagaikan dua sisi mata uang. Negara dan agama tidak bisa dipisahkan tetapi harus dibedakan. Karena negara menguasai manusia, agama juga mengurus manusia. Adanya negara : agar manusia hidup sejahtera, agama mengajarkan bagaimana manusia itu hidup damai, bertakwa. Jadi sebenarnya harus ada kerja sama, tetapi negara tidak boleh mencampuri urusan agama, demikian juga agama harus mandiri, tak boleh masuk ke 'dacrah' negara. Antara negara dan agama harus tahu batasnya masing-masing.

7. Seberapa jauhkah gambaran ideal tersebut tercermin dalam kenyataannya di Indonesia?

Ada salah satu agama yang mau mencampuri urusan negara. Ada upaya-upaya menjadikan hukum agama, menjadi hukum-hukum negara ini. Ini sudah tidak benar. Di negara majemuk masyarakatnya hukum harus diatur dengan hukum positif. Demikian sebaliknya negara ingin mencampuri urusan agama. Ada departemen agama, -yang di negara lain tidak ada-, bahkan negara memainkan agama untuk kepentingan negara.

8. Agama sebagai suatu bentuk kepercayaan dan budaya menyembah Tuhan mempunyai upacara ritual tertentu yang berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Perbedaan ini kadangkala secara tidak sadar menjadi persoalan antara pemeluk agama. Dengan mendasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang demokratis, bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut?

Ritus-ritus dalam masing-masing agama berbeda-beda, dan setiap ritus mempunyai arti dan makna sendiri, yang hanya bisa diketahui dan dihayati oleh masing-masing pemeluk agama. Maka supaya tidak menjadi masalah, sebaiknya, pemeluk agama yang satu, tidak ikut-ikutan menjalankan ritus-ritus agama yang lain. Misalnya : seorang katholik yang mengikuti sholat temanya di masjid, berarti dia bisa dikategorikan sebagai Islam, dan berarti mendua, ini yang menjadi masalah. Atau sebaliknya.

- 9. Kebebasan beribadah sering dianggap sebagai bagian dari hak yang paling asasi, bagaimanakah posisi negara selama ini tentang hal itu? Bagaimanakah dengan sekarang?**

Di Indonesia sudah diatur UUD 1945, pasal 29 ayat 2. Sebenarnya negara telah meletakkan pondasi yang benar dalam UUD 1945. Tetapi kenyataannya lain dengan dasar hukum, orang sering merasa ditekan, tidak bisa naik jabatan, tidak bisa dipromosikan karena tidak menganut agama tertentu. Melihat fakta itu ya seakan tak ada kebebasan beragama. Apalagi bila kita melihat kenyataan di lapangan untuk membangun rumah ibadat kristiani sering kesulitan.

- 10. Pada masa lalu (bahkan beberapa orang percaya bahwa hal ini masih bertahan), pemerintah sering menggunakan agama sebagai alat untuk mensukseskan berbagai programnya. Di antaranya adalah persoalan Keluarga Berencana, kewajiban mencoblos, dan sebagainya. Dalam hal ini bagaimana pendapat Anda?**

Sejauh masih dalam koridor, hubungan kerjasama tidak ada masalah. Tetapi yang kita lihat pemerintah menggunakan agama untuk menyukseskan program-programnya itu dengan pengaruh kekuasaan, dengan uang, dengan tekanan-tekanan. Karena memang masyarakat kita masih mempunyai budaya sangat menghargai para pemimpin agama. Apa yang dikatakan oleh pemimpin agama sering diikuti, ketimbang apa yang diomongkan oleh para pemimpin pemerintahan. Sehingga agama sering dijadikan 'stempel', alat legitimasi pemerintah. Dan itu saya tidak setuju. Pemerintah seharusnya melindungi agama dari hal-hal seperti itu.

- 11. Bagaimanakah semestinya negara menempatkan posisinya dalam kontroversi di sekitar isu aliran kepercayaan: Kong Hu Chu, perkawinan antar agama, pendirian tempat ibadah?**

Negara melindungi agama apapun, kepercayaan apapun, memberikan sarana dan prasarana, kepada agama apapun. Tetapi kalau ada aliran-aliran agama yang membuat resah, mengacau, negara bisa berunding atau melarangnya.

- 12. Bagaimanakah Anda merespon klaim yang mengisyaratkan adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih sektarian?**

Saya memang orang yang termasuk khawatir bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih sektarian. Karena masyarakat kita sampai saat ini masih belum mampu menerima adanya perbedaan. Hal itu semakin dipicu dengan pendidikan-pendidikan, yang mendorong untuk bangga hanya sebagai kelompok. Itu kebanggaan yang sempit. Misalnya, kelompok kristiani hanya bangga sebagai kelompok kristiani. Ini bisa menjadikan fanatik buta. Kalau ada istilah demokrasi proporsional, ini juga mengarah ke sektarian. Ada perkumpulan Jawa, perkumpulan Madura, dll.

AGAMA DAN DEMOKRASI

- 13. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, sekarang ini banyak muncul berbagai macam partai politik dengan berbagai basis sosial yang salah satunya menggunakan basis agama. Bagaimana Anda memahami hal ini?**
Partai-partai berbasis agama menurut saya adalah sah-sah saja. Tetapi mengingat kemajemukan masyarakat bangsa kita, kita harus mencari nilai-nilai universal yang bisa menjadi pemersatu - pengikat bangsa ini.

GEREJA KATOLIK DAN POLITIK

- 14. Menurut Anda, apakah yang sudah diberikan oleh gereja Katholik sebagai sumbangan kepada kehidupan politik Indonesia?**

Gereja Katolik memberi sumbangan kehidupan politik di Indonesia. Lewat umat/kaum awam. Gereja mendidik kaum awam supaya paham betul akan hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; supaya mereka menjadi warga negara 100% dan juga awarga gereja 100%.

- 15. Bagaimana Anda memandang keterlibatan biarawan Katholik dalam kehidupan politik di Indonesia?**

Biarawan Katolik tak bisa terlibat langsung dalam politik praktis. Se jauh memberikan motivasi, animasi, tidak dilarang. Biarawan Katolik dan gereja harus menempatkan diri sebagai kekuatan moral, bukan kekuatan politik.

- 16. Sampai sejauh mana keterlibatan tersebut diakui sebagai usaha mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat?**

Tak dijawab

- 17. Bagaimanakah semestinya gereja Katholik menempatkan posisinya dalam perubahan yang sangat cepat yang terjadi belakangan ini?**

Memang tidak mudah untuk mengikuti perubahan yang amat cepat, tetapi Gereja Katolik selalu berusaha untuk memantau perubahan, sehingga kita bisa menyesuaikan ajaran kepada masyarakat dengan benar. Gereja Katolik memantau perubahan agar bisa memotivasi umat dengan benar.

WAWANCARA III

1. Menurut Anda masalah-masalah apa sajakah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa “saat ini”?

Berbagai kejadian seperti: aksi demonstrasi, kerusuhan, ninja, penjarahan dan sebagainya yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia saat ini, hanyalah sketsa dari sebuah gambaran permasalahan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Permasalahan mendasar yang sebenarnya tengah dihadapi bangsa-bangsa yang ditengarai dengan banyaknya pelanggaran atas HAM. Akibat serius bila krisis moneter, ekonomi, dan politik yang terjadi ini tidak segera diselesaikan secara tuntas bisa jadi ancaman disintegrasi bangsa (krisis persatuan).

2. Masyarakat ideal macam manakah yang Anda bayangkan yang semestinya diwujudkan di masa depan?

Masyarakat yang menyadari kebhinekaan sebagai keunikan bangsa Indonesia dan mampu mengakui kekurangannya serta mau menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk kebersamaan dalam kehidupan berbangsa yang menjunjung kejujuran, keadilan serta berupaya untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang sejahtera, damai, dan saling mengasihi.

PLURALITAS AGAMA

3. Pluralitas agama merupakan tantangan khusus yang dihadapi negara-negara di dunia dewasa ini (tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan). Bagaimana pendapat Anda dengan kondisi keanekaragaman agama dan kepercayaan di Indonesia?

Keanekaragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia harus dilihat sebagai keunikan yang semakin memperkaya budaya bangsa yang saling melengkapi.

4. Di Indonesia, pemeluk agama Islam mencapai 90%, dan sisanya adalah pemeluk agama lainnya termasuk aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (BPS 1997). Angka tersebut memunculkan asumsi bahwa terdapat kaum mayoritas dan kaum minoritas dalam kehidupan beragama di Indonesia. Bagaimana evaluasi Anda terhadap isu ini?

Asumsi adanya kaum mayoritas dan kaum minoritas yang diperoleh dari data BPS 1997 memang nyata. Menanggapi isu tersebut, evaluasi yang perlu dilakukan bukan terhadap kuantitas pemeluk agama melainkan pada kualitas yang telah dicapai pemeluk agama: sejauh mana pemeluk agama beriman jadi tidak cukup hanya beragama.

5. **Bagaimanakah hubungan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini semestinya dilaksanakan?**

Hubungan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat plural yang ada di Indonesia semestinya dilaksanakan dengan saling menghormati serta menjunjung hak kebebasan beragama.

AGAMA DAN NEGARA

6. **Bagaimana sifat hubungan antara agama dan negara yang ideal menurut anda?**

Hubungan antara agama dan negara yang ideal bilamana korelasi dari keduanya selaras.

7. **Seberapa jauhkah gambaran ideal tersebut tercermin dalam kenyataannya di Indonesia?**

Kenyataan yang terjadi di Indonesia gambaran ideal itu masih belum tercermin dalam kehidupan berbangsa.

8. **Agama sebagai suatu bentuk kepercayaan dan budaya menyembah Tuhan mempunyai upacara ritual tertentu yang berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Perbedaan ini kadangkala secara tidak sadar menjadi persoalan antara pemeluk agama. Dengan mendasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang demokratis, bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut?**

Perbedaan yang ada kadangkala secara tidak sadar menjadi suatu persoalan antara pemeluk agama. Hal ini terjadi karena kesadaran akan nilai-nilai masyarakat yang demokratis belum dilaksanakan secara sadar. Bilamana pemeluk agama menyadari perbedaan-perbedaan yang ada sebagai sesuatu yang saling melengkapi dalam kehidupan bersama konflik antara pemeluk agama tidak akan terjadi.

9. **Kebebasan beribadah sering dianggap sebagai bagian dari hak yang paling asasi, bagaimanakah posisi negara selama ini tentang hal itu? Bagaimanakah dengan sekarang?**

Posisi negara selama ini masih kurang tegas dalam menghormati kebebasan beribadah bahkan adakalanya tidak adil.

10. **Pada masa lalu (bahkan beberapa orang percaya bahwa hal ini masih bertahan), pemerintah sering menggunakan agama sebagai alat untuk mensukseskan berbagai programnya. Di antaranya adalah persoalan Keluarga Berencana, kewajiban mencoblos, dan sebagainya. Dalam hal ini bagaimana pendapat Anda?**

Penggunaan agama yang dilakukan pemerintah untuk mensukseskan programnya menunjukkan hubungan yang tidak ideal antara agama dan negara di Indonesia. terlihat disini agama dipergunakan sebagai alat politik untuk mensukseskan program pemerintah. Hal ini jelas memperlihatkan terjadinya

pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama yang merupakan hak asasi manusia.

11. Bagaimanakah semestinya negara menempatkan posisinya dalam kontroversi di sekitar isu aliran kepercayaan: Kong Hu Chu, perkawinan antar agama, pendirian tempat ibadah?

Negara semestinya adil di dalam menempatkan posisinya terhadap kontroversi di sekitar isu aliran kepercayaan, konghucu, perkawinan antar agama, pendirian tempat ibadah. Bilamana perlu perundang-undangan maupun praktek hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan beragama diganti.

12. Bagaimanakah Anda merespon klaim yang mengisyaratkan adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih sektarian?

Klaim yang mengisyaratkan adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih sektarian tidaklah beralasan mengingat kebhinekaan yang kita miliki, pemaksaan ke arah sektarian dapat mengancam disintegrasi.

AGAMA DAN DEMOKRASI

13. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, sekarang ini banyak muncul berbagai macam partai politik dengan berbagai basis sosial yang salah satunya menggunakan basis agama. Bagaimana Anda memahami hal ini?

Berbagai macam partai politik yang muncul setelah berakhirnya rezim orde baru menunjukkan tidak adanya kebebasan berpolitik pada masa orde baru. Hal ini positif sejauh pendirian partai-parai politik tersebut konsisten dan tulus memperjuangkan kepentingan bersama untuk penyelenggaraan negara yng lebih demokratis terlepas basis/ asas dai partai politik yang didirikan tidak menjadi masalah.

GEREJA KATOLIK DAN POLITIK

14. Menurut Anda, apakah yang sudah diberikan oleh gereja Katholik sebagai sumbangan kepada kehidupan politik Indonesia?

Dari dulu hingga kini gereja Katolik telah banyak memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi kehidupan politik di Indonesia. Beberapa nama yang dapat disebut antra lain: Soegijapranata, Van Lith, I.J. Kasimo, dll. merupakan andil gereja Katolik dalam kehidupan politik.

15. Bagaimana Anda memandang keterlibatan biarawan Katholik dalam kehidupan politik di Indonesia?

Keterlibatan gereja, biarawan Katolik khususnya dalam kehidupan politik di Indonesia harus berada pada porsi moral, walaupun efeknya juga ke masalah politik. Secara moral dia harus berani mengatakan bahwa apa yang salah adalah salah dan harus berdiri tanpa mmihak golongan maupun serta berusaha menciptakan persaudaraan sejati.

16. Sampai sejauh mana keterlibatan tersebut diakui sebagai usaha mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat?

Sejauh keterlibatan itu memperjuangkan keadilan yang mengarah kepada persaudaraan sejati dalam kebersamaan yang damai dan saling mengasihi.

17. Bagaimanakah semestinya gereja Katolik menempatkan posisinya dalam perubahan yang sangat cepat yang terjadi belakangan ini?

Di dalam perubahan yang amat cepat yang terjadi belakangan ini gereja Katolik semestinya tetap berusaha mewujudkan persaudaraan sejati di tengah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang bermartabat.

WAWANCARA IV

1. Menurut Anda masalah-masalah apa sajakah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa “saat ini”?

Krisis besar. Orang begitu mudah terpancing untuk bikin kacau. Jadi masa tidak stabil. Dan kita bisa lihat, sudah lihat jelas sekali. Dari kami Antropolog sudah lihat itu nama. Boleh omong pada masa Soeharto. Semua menuju ke desintegrasi. Dan bahwa tidak ada harmoni antara kelompok etnis, kelompok agama, sekurang-kurangnya di beberapa daerah itu, tidak umum. Dan segala yang terjadi sekurang-kurangnya dalam satu tahun terakhir ini (1999) menunjukkan bahwa krisis makin mendalam. Selain itu ada orang yang mempunyai niat mengacaukan negara ini. Siapa? Tidak jelas. Tetapi saya pernah baca artikel di *Republika*, saya kira 3 atau 6 Maret tahun ini (1999), waduh itu di sana dia menulis, itu seorang sejarawan yang menganalisis metode pada masa Mojopahit. Nah, itu metode dari Mojopahit itu persis sama seperti sekarang. Orang tidak berani menolak sesuatu, juga tidak berani membunuh orang secara langsung yang tidak disukai. Jadi dibuat dengan cara ada kacau. Dikorbankan sekian banyak umat sendiri supaya kebetulan yang lain juga mati. Itu dibuat begitu. Apa yang tidak alami bulan Mei tahun lalu (1998). Nah itu identik. Jadi rezim Soeharto itu begitu. Jadi sejarawan itu menulis bahwa yang ditulis dalam buku sejarah untuk sekolah itu mitos. Sejarah di sekolah itu mitos mengenai Mojopahit. Mojopahit itu ada bersifat imperial.

2. Masyarakat ideal macam manakah yang Anda bayangkan yang semestinya diwujudkan di masa depan?

Nah, hidup dalam harapan. Motto utama yang ada dalam lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jelas ada perbedaan, seperti di setiap bangsa ada perbedaan. Cuma karena Indonesia itu bangsa besar, terdiri dari sekian banyak suku dan kelompok etnis, sekian banyak kelompok agama. Jelas sekali belum terintegrasi seperti negara yang sudah merdeka sejak 1.000 – 2.000 tahun. Itu jelas. Jasanya Soekarno saya lihat. Sekurang-kurangnya, dari sejarah saya tahu bahwa dia mempersatukan. Tetapi terkesan sekali pada awal saya baru tiba di Indonesia, baru 2-3 tahun saya sering ketemu dengan guru yang sudah pensiun di Flores. Dan kebanyakan mereka memuji Indonesia Serikat. Ya memuji bukan main. Saya Tanya, “Lho, apa kelebihan Indonesia Serikat?” “Romo, jelas sekali bisa uas diri sendiri.” Sekarang kita diurus oleh Jawa. Tidak diperhatikan beda budaya antara Jawa dan sini (Flores). Tidak diperhatikan *interest* kami di sini, kebutuhan dan kepentingan lokal. Semuanya sesuai politik Jakarta. Bagaimana Jakarta melihat kami. Selama saya disini 34 tahun itu makin jelas. Sebelum 34 tahun yang lalu saya tak ada disini tapi dari cerita orang itu ada begitu. Di masa Soeharto, awalnya bagus pembangunan. Tapi kian lama kita lihat korupsi dan apa saja itu muncul.

PLURALITAS AGAMA

- 3. Pluralitas agama merupakan tantangan khusus yang dihadapi negara-negara di dunia dewasa ini (tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan). Bagaimana pendapat Anda dengan kondisi keanekaragaman agama dan kepercayaan di Indonesia?**

Nah, seharusnya bangsa yang berbudaya itu menghormati keyakinan orang lain. Itu dasar. Kalau saya betul-betul mempunyai kebudayaan yang tinggi, saya menghormati klainan orang lain. Apakah itu etnis, agama, saya menghormati. Saya bisa mengatakan sebagai orang asing, banyak hal di Indonesia itu goblok. Saya sebagai orang Eropa, saya harus menyesuaikan diri. Empati. Saya sampai sekarang menyesuaikan diri. Nah, itu adalah minimum yang seharusnya ada dalam pengertian antar kelompok-kelompok, juga antara kelompok agama. Itu penyelesaian, kalau mau betul-betul integrasi, ya harus diakui. Tak ada orang lain dari mata saya. Maksudnya menghormati. Itu waktu saya dengar pemboman di Istiqlal. Itu kawan-kawan dan kami semua disini dan saya juga dapat telepon dari kawan, pastor semuanya. Bagaimana pun itu rumah ibadah. Bukan rumah ibadah saya, tapi rumah ibadah. Karena itu sesuatu yang suci dan tak dihormati. Nah, itu suatu tanda bahwa budaya Indonesia atau budaya, katakanlah budaya kekerasan, daripada akarnya atau kebudayaan Indonesia begitu merosot sehingga ada yang terciptanya situasi macam ini.

- 4. Di Indonesia, pemeluk agama Islam mencapai 90%, dan sisanya adalah pemeluk agama lainnya termasuk aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (BPS 1997). Angka tersebut memunculkan asumsi bahwa terdapat kaum mayoritas dan kaum minoritas dalam kehidupan beragama di Indonesia. Bagaimana evaluasi Anda terhadap isu ini?**

Biasanya kalau anda tahu dari Sosiologi, dari Antropologi malh Psikologi itu kelompok minoritas gampang sekali rasa terancam. Itu gampang kok, sebab terbentuk in-group, out-group. Out-group selalu dicurigai. Ada sesuatu yang aneh sekali kalau mayoritas menganggap diri terancam. Ada satu artikel bagus, saya dapat dari internet, dai seorang kawan kirim. Itu interest sekali, orang Islam sebagai tuan rumah di Indonesia itu interest sekali. Untuk apa ribut-ribut bikin partai memperjuangkan Islam karena sama sekali tidak diperhatikan. Masa tidak diperhatikan. Diperhatikan! Malah diatur mereka sebagai mayoritas tidak perlu bikin kongres bahwa presiden itu mesti Islam, mesti laki, mesti ini, mesti itu. Lho, rasa diri terancam itu pendiri partai Bulan Bintang militan. Ini karena Islam terancam. Islam terancam? Memang. Tunjukkan! Apakah orang Kristen membakar mesjid? Jadi Timtim karena mereka sudh jengkel. Tapi kenapa gereja itu dibakar sekaligus. Situbondo, Jakarta Barusan ini di Sulawesi Selatan. Ujungpandang. Gereja dengan partoral seluruhnya dibakar. Tak ada dalam berita, sama sekali tidak. Di lain tempat itu di Solo, gereja-gereja dilempar dengan batu. Pada hal pemuka agama sudah bilang, jangan pakai istiqlal sebagai alasan. Karena justru orang mau buat kacau. Itu saja tujuannya. Supaya orang Islam boleh hantam. Siapa ada di belakangnya? Kuran jelas. Tapi dari apa yang dikatakan oleh ahli bom itu saya jelas. Dia

tidak sebut nama. Pertama, siapa punya akses ke bahan peledak TNT? Siapa? Kedua, bom itu ditaruh begitu bagus, bukan di mesjid, karena kalau ditaruh di mesjid sendiri itu tidak memiliki efek seperti ada sekarang. Kalau mau merusak mesjid, dia bilang mesti ada 200 kilo. Jadi mesti bawa truk. Tapi mereka memperhitungkan persis efek ruang kosong. Dipasang di atas. Ruang kosong itu menimbulkan resonance dan efeknya dilipatgandakan. Sama seperti anda punya gitar atau apa atau biola. Itu bunyinya kecil sekali, tapi karena ada resonance itu kekuatannya puluhan kali lipat. Itu yang dipergunakan. Jadi itu mestinya ahlinya. Menurut ahli bom itu. Menurut saya itu cukup jelas. Provokatornya ada di luar negeri tapi orangnya ada di sini.

5. Bagaimanakah hubungan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini semestinya dilaksanakan?

Menghormati, saling menghormati. Khususnya mayoritas harus menghormati minoritas karena mereka berkuasa. Minoritas tidak bisa buat apa-apa. Mayoritas bisa mengancam minoritas. Nah itu, jadi dalam artikel yang saya sebut, orang Islam sebagai tuan rumah di Indonesia menunjukkan sikapnya terhadap yang bukan Islam dalam perilaku. Kalau saya terima seorang tamu, itu saya terima dengan ramah atau saya usir. Nah, kalau saya betul, ada pendidikan yang betul, saya terima dengan ramah. Tapi kalau mayoritas menganggap diri terancam, menganggap bahwa dia mesti dominasi dalam segala hal, ya eksisnya begitu. Ngambek. Barusan ada diskusi beberapa hari lalu. Masalahnya apa? Pendatang menguasai orang asli. Di Flores situasinya ada 20 tahun lalu kira-kira waktu saya ada di sana itu identik. Sama, invasi orang. BBM (Bugis, Buton, Makassar). Timor-Timur sama. Itu ada politik untuk mengislamkan Indonesia secara paksa. Saya tahu tekniknya di sana. Mendirikan mesjid di tempat dimana tidak ada satu orang muslim. Hanya tunjuk pada dunia, di Indonesia, tidak ada tempat dimana Islam tidak ada. Di Flores itu ada begitu, banyak orang Bugis dari dhulu kala mungkin 200-300 tahun, itu damai satu sama lain. Hidup berdamai. Di Sampit, tidak ada masalah. Datang pendatang bikin kacau. Waktu sesudah gempa kami itu begitu. Banyak orang dari luar masuk, sebagai tukang jual bakso, macam-macam. Tapi tujuannya hanya membikin kacau karena mereka mengamati dan dimana kita bisa... Akibatnya apa, satu orang dibunuh karena pelecehan... Karena sudah terus, terus, terus, jadi satu orang dibunuh, sebetulnya kebetulan. Pastor, sama pastor dapat juga karena membela orangnya. Besoknya satu orang pun tak ada, dan yang mengusir mereka itu orang Katolik sama muslim setempat. Muslim setempat usir mereka. Karena bilang, lho kita hidup di sini sudah per generasi tidak ada apa-apa, kita punya relasi baik, kenapa mesti kacau? Kamu datang bikin kacau, kami tidak mau. Dari dulu saya masih ingat. Saya tinggal di seminari, jadi orangnya banyak. Terakhir itu ada sampai 700 kira-kira, 700 mahasiswa. Tapi kalau makan? Jadi kami selalu pesan beras secukupnya. Yang membawa beras itu yang jadi leveran itu kebanyakan siapa, bapak haji. Iya, bapak haji dari pantai. Saya sendiri ngomong dengan dia. Saya ada bersama dia satu kali di kapal. Dia bawa kami ke daerah-daerah, keliling. Tak ada permusuhan sedikitpun. Dia

malah jadi baik untuk kami karena darah kami mau itu pulau-pulau diduduki oleh orang-orang muslim, orang Bugis. No problem. Kami diterima disana dengan mulia sekali. Memang, orang kebanyakan baru pertama kali ketemu dengan pastor-pastor Katolik. Jadi heran melihat kita. Bagaimana ya? Tapi bagus sekali, bagus sekali. Beliau sendiri bapak haji cerita pada saya "Kalau saya jatuh sakit, saya tidak pergi ke dokter atau ke puskesmas, saya pergi ke suster, yang punya poliklinik". Kenapa? Karena selain itu dia punya pasti bukan obat palsu masih dia doakan obat itu, sehingga pasti saya sembuh. Nah, begitu relasinya antara seorang haji dan rohaniwan Katolik. Kami juga tidak ada masalah Cina-pribumi, tidak ada itu. Cina kerjasama dengan Bugis, no problem. Nah, semestinya begitu. Karena misalnya di Flores itu mayoritasnya Katolik atau NTT umumnya mayoritasnya Kristen, ya Islam yang ada di sana sebaiknya menghormati. Kami minoritas, kami tidak agama Katolik tapi jangan kamu mengganggu kami. 14 tahun mereka adadi sana dan 14 kali jadi kacau. Sehingga sekarang orang Islam sendiri setempat, tidak mau terima orang Bugis lagi. Kenapa? Ya karena mereka omong terus terang, kalau kami ada masalah, terus terang, omong, menghadap. Kalau orang Madura datang, itu hanya dari belakang, dengan pisau tusuk di punggung. Dan mereka menguasai segala-galanya. Misalnya, di Ambon, itu gubenur baru buat kebodohan yang amat sangat besar. Yang dari segi sosiologis dan politis, itu kebodohan, dia harus dipecat. Semua pegawai Kristen diusir dan masuk semua Islam. Padahal mayoritasnya Kristen. Itu seperti bensin yang hanya tunggu... Di NTT setahu saya memang pegawainya mayoritas Kristen, entah Katolik entah Protestan. Mayoritasnya orang setempat. Tapi tidak berarti Islam tidak ada, tidak jadi pegawai di situ, ada. Kalau menganggap agama sebagai pesaing, itu tidak sehat. Coba lihat di Eropa sekarang. Hampir sama banyak mesjid daripada gereja. Padahal itu daerah Kristen. Cuma pendatangnya banyak sekali orang Turki, orang Afrika utara, di Perancis. Di lain tempat itu orang Turki, muslim. Negara mengakui bahwa mereka ada hak mempunyai tempat ibadah. Waktu belum ada tempat ibadah. Pada waktu ramadhan, gereja di... atau sebagian dijadikan tempat ibadah. Iya, silakan. Anda bisa berdoa di situ. Sya masih ingat cerita seorang pastur yang kunjungi umat di NTT. Kunjungi umat di satu daerah, dimana umatnya sedikit sekali, umat Katolik. Mayoritasnya Islam. Ia tidak ada gereja di sana, tidak ada sekolah, tidak ada tempat dimana bisa beribadah. Rumah itu terlalu kecil. Jadi apa, dia punya relasi baik sekali pemimpin umat Islam, pemuka umat Islam di tempat. Ini ketua tidak mempunyai kesulitan. Bapak pastor kumpulkan umatnya di mesjid. Pastur buat misa di mesjid. Nggak ada masalah. Ibadah sama ibadah, tidak menyembah berhala. Ini menyembah Tuhan yang sama. Cuma caranya lain. Itu, itu seharusnya begitu.

AGAMA DAN NEGARA

6. Bagaimana sifat hubungan antara agama dan negara yang ideal menurut anda?

Ada prinsip, dulu itu mayoritas itu jadi agama resmi. Dulu di Eropa, masih sekarang ada di banyak negara, ada agama resmi. Nah menurut saya itu tidak

bagus karena menimbulkan masalah dengan minoritas. Tapi ada 100 persen semua jadi anggota agama ini. Tapi, agama urus agama dan negara urus negara. Walaupun jangan bilang bahwa mereka terpisah sama sekali, mereka toh ada anggota umat ini atau umat itu. Supaya pegang pada prinsip moral. Tugasnya seorang ulama atau seorang pendeta atau sebagai siapa adalahewartakan moralnya, bagaimana seharusnya perilaku, keadilan, cinta atau minimum toleransi. Jadi mereka menjadi seperti hati nurani bangsa. Seperti anda lihat itu sebelum Pemilu 1997 itu ada Surat Gembala dari para Uskup. Jadi para Uskup menganggap sudah terlalu jauh perkembangannya, jadi stop. Sekarang harus dikatakan terus terang. Walaupun saya tahu dari redaktur surat. Itu redaksinya berubah 7 kali. Karena versinya pertama itu tajam sekali. Juga misalnya contoh hubungan antara agama dan negara. Jangan seorang pemimpin agama mengatakan "Kamu harus memilih orang ini sebagai presiden". Itu bukan tugas agama. Katakanlah, agama harus ada di atas partai. Maka di gereja Katolik terlarang. Di sana pastor tidak boleh menjadi anggota partai, apalagi anggota pemerintah, tidak boleh. Karena mereka ada di atasnya dan tugasnya itu bukan politik. Jadi hati nurani bangsa itu. Kalau katakana ada pemilihan entah menteri, atau partai atau orang calon sekarang menteri. Pilih orang yang punya integritas, yang jujur, tidak korup. Lihat apakah intelektual dia sanggup, apakah dia berani bicara atas nama kami. Nah, itu baru petunjuk umum. Kita nggak akan sebut orang. Itu salah. Tapi kadang-kadang terjadi. Di dalam Islam cukup kuat. Ulama-ulama bercampur langsung dengan politik praktis. Nah, di NTT kadang-kadang pastor juga ada tendensi macam itu. Sekarang sudah ditegur. Para uskup tidak mau karena dari Roma ada instruksi. Jangan rohaniwan campur...

7. Seberapa jauhkah gambaran ideal tersebut tercermin dalam kenyataannya di Indonesia?

Pengalaman saya, makin lama saya disini makin buruk situasinya. Indonesia dari dahulu kala dianggap sebagai negara yang sangat toleran. Ya saya punya kesan bahwa makin buruk, bukan makin bagus. Saya masih ingat waktu saya datang, 14 tahun yang lalu di Unair itu pada pokoknya tidak ada masalah. Masalahnya mulai pada waktu ICMI-sasi. Waktu di Unair jadi paksaan penduduk Jawa. Itu mulai masalah. Itu konkret satu contoh, 3 tahun lalu mereka mau usir saya. Saya sampai sekarang menyesal bahwa saya tidak pergi. Saya dihina bukan main. Jadi saya menganggap kepentingan mahasiswa entah S1 sampai S3 mesti lebih penting daripada kebodohan satu orang yang memutuskan ini. Jadi kemudian mulai jelek, saling mencurigai. ICMI atau ini atau Kristen yang bukan muslim, singkirkan. Dia jangan dipilih. Waktu Pak Dwi jadi Dekan itu dipersalahkan bahwa itu kemudian ternyata korupsi tidak ada dan orang yang demo dibayar. Tahu oleh siapa. Dimana mereka sekarang yang kebetulan yang jadi aktivis. Saya tidak keberatan kalau orang muslim lalu jadi anggota ICMI. Tapi saya tahu juga dari banyak mereka yang menjadi anggota ICMI orang yang pintar, yang jujur, ya kecewa. Kalau udah kacau agama sekarang itu tujuan, itu Habibie juga salah. Dan Amien Rais juga salah karena teriak-teriak. Betapa ributnya waktu Belo dapat hadiah Nobel. Bukan

main. Sampai itu harus diusir dari Indonesia, harus dicabut kewarganegaraannya. Atas dasar apa? Sekarang Belo jadi pahlawan nasional. Dan di Oslo seperti almarhum Romo Mangun tulis yaitu Gus Dur juga diundang tapi Gus Dur tidak ikut. Saya tidak tahu ada apa tempo hari. Kenapa dia tidak ikut? Romo Mangun tulis, karena tidak ada satu wakil pun dari pemerintah Indonesia, ada kesan seolah-olah RI ada duduk sebagai orang tertuduh. Ya, bahwa mereka itu malu muncul karena kelihatan Belo dapat hadiah Nobel karena mau mengurus situasi di Timtim secara damai. Padahal Indonesia mau mengurus dengan kekerasan. Berapa banyak kacau terjadi di situ? Terjadi kacau, siapa yang lari? BBM, demo. Karena mereka sudah siap. Tentara masuk, mereka masuk dan menguasai posisi kunci. Siapa mau terima? Sama seperti di Sambas. Orang-orang Madura pada waktu itu ada protek terbesar. Tahu siapa protektornya? Siapa penguasa besar pada waktu itu orang Madura disini? Pacarnya Tutut, Hartono. Iya. Itu beking seluruhnya kekacauan di Jatim itu mulai, ada Hartono ada disana. Itu prof siapa itu dari Hukum itu, orang Ambon itu. Sahetapy ngomong terus terang

- 8. Agama sebagai suatu bentuk kepercayaan dan budaya menyembah Tuhan mempunyai upacara ritual tertentu yang berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Perbedaan ini kadangkala secara tidak sadar menjadi persoalan antara pemeluk agama. Dengan berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang demokratis, bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut?**

Ya itu setiap agama mempunyai ritual berbeda. Itu harus diakui, harus diterima. Kalau saya toleran terhadap agama, saya harus konsekuen. Terima kasih bahwa mereka sembahyang lain daripada saya. Saya punya asisten, satupun bukan Katolik. Dan bukan hanya hidup berdamai, tapi saya rasa sangat akrab. Nita dengan Lusi itu muslim to. Ya tetap tidak ada masalah. Saya tahu bahwa Lusi misalnya sembahyang jam setengah enam sore, saya tidak telepon dia pada waktu itu, karena saya tahu sembahyang. Itu saya tidak ada masalah. Malah satu kali mereka atur sedikit kamar, tahu-tahu dengan dia atur kamar Lusi dapat Al-Quran disini. Saya punya ensiklopedi Islam disini. Banyak orang heran. Untuk apa ini? Iho, saya mau mengerti apa yang kamu percaya. Kalau ada pesta saya mau tahu apa yang kamu rayakan. Saya baca skripsi yang menyangkut agama Islam. Kalau saya harus menilai, saya harus tahu itu apa artinya. Al-Quran juga saya punya, dalam bahasa Jerman, saya baca. Untuk mengerti, kenapa, bagaimana. Nah, Lusi dapat Al-Quran di sini mau pinjam, saya bilang tidak. Saya buat duplikasi dan saya kasih. Jadi karena kesempatan libur, itu untuk dia kitab suci to. Silakan. Menurut agamamu, laksanakan agamamu sesuai kepercayaan, sesuai keyakinan. No problem

- 9. Kebebasan beribadah sering dianggap sebagai bagian dari hak yang paling asasi, bagaimanakah posisi negara selama ini tentang hal itu? Bagaimanakah dengan sekarang?**

Negara harus memberi kesempatan dan sarana. Itu hak dan kewajiban setiap negara. Kalau mau mengatakan bahwa HAM betul-betul dijalankan. Itu

Komnas HAM ditentukan saja untuk mengurus konflik. Tapi mengatakan pada pemerintah. Eh bapak presiden atau bapak menteri yang kamu putuskan itu tidak beres. Orang ada hak, itu hak asasi. Sampai sekarang Indonesia belum bisa melaksanakan itu. Sekurang-kurangnya belum bisa membaik. Betapa sulitnya membangun gereja di sini, di Jawa. Betapa sulitnya. Gereja apapun. Membangun mesjid di Flores, di mana ada mayoritas Katolik, tidak ada masalah. Cuma ada ya lokasinya. Jangan saling mengganggu. Di sini ada tendensi untuk tunjuk pada dunia keakraban agama. Jadi mesjid, gereja. Gereja dibangun langsung ada mesjid. Biar pun mesjid itu ukuran 2x2 tapi mesti ada tawa dan teriak supaya gereja ada gangguan. Seperti saya lihat mesjid besar di sini itu, di Jl. Darmo itu. Itu kalau Minggu dia berdo'a paling lama. Sampai jam 10-11. Kenapa? Karena dekat-dekat disana ada gereja-gereja. Hari Jumat pada waktu ini umat Islam beribadah, itu lonceng gereja tidak berbunyi.

Apakah benar-benar mengganggu. Itu tidak masalah. Kalau mesjid itu tidak mengganggu saya. Ya, kalau misalnya saya ada kuliah. Andaikan mesjid itu dekat, mulai teriak, ya saya tidak bisa beri kuliah. Sekarang to. Ya saya terganggu. Tapi saya tidak terganggu kalau saya tidak aktif. Mesjid berbunyi, di sini ada banyak, di kampung-kampung ini saya dengar itu. Saya tidak terganggu sama sekali. Ya, Islam punya waktu untuk sembahyang, ya sudah, silakan berdo'a. Itu juga ada masalah toleransi. Itu telah saya lihat toleransi itu. Kalau tidak toleran ya rasa terganggu.

Apa berarti negara perlu membuat peraturan khusus tentang hal ini?

Seharusnya, tapi juga tidak. Kalau sikap masyarakat, ada seperti saya katakan dan budaya Timur dengan mengerti dan punya toleransi dan empati tinggi, apakah saya harus musuh dengan tetangga kalau tetangga saya muslim. Ya sudah saja. Mereka mau muslim, oke, kenapa kita mau musuh, tidak ada alasan.

Berarti masalahnya menciptakan masyarakat yang berbudaya?

Ya itulah, betul-betul berbudaya. Yang menghormati hak orang lain. Apalagi mayoritas rasa terancam, itu lucu. 'Lucu' Cuma dalam hal ini harus mengerti bahwa kalau kita jadi agresif mau mati-matian menkristenkan semuanya, mengislamkan semuanya, ya reaksinya nanti jelek. Orang itu sudah punya keyakinan. Saya pidato tadi di Unair supaya semua mahasiswa jadi Katolik, saya ada. Dan kalau ada orang tertarik pada ini, silakan. Datang bicara. Ada kadang-kadang mahasiswa datang bicara. Saya tidak meyakinkan mereka bahwa kamu harus Katolik. Malah ada mahasiswa saya yang Islam, yang mau kawin campur. Ya kebetulan ada, ada ini, kepercayaan pada saya. Saya bilang, agama itu adalah sesuatu yang esensial. Sekarang kalau kamu satu pergi kiri, satu pergi kanan, anaknya punya kesan apa? Dari penelitian antara lain juga di Indonesia, nyata bahwa sebagian besar anak dari keluarga campur tidak mempunyai agama mana pun. Barusan saya mengalami, didiskusikan beberapa dosen di Antropolgi. Dengan efek samping dari ICMI-sasi, terhadap Islam ada reaksi di kalangan mahasiswa. Islam ada apa? Ada ICMI. Nggak percaya? FISIP, karena mereka paksaan. Dengan paksaan segala macam.

10. Pada masa lalu (bahkan beberapa orang percaya bahwa hal ini masih bertahan), pemerintah sering menggunakan agama sebagai alat untuk mensukseskan berbagai programnya. Di antaranya adalah persoalan Keluarga Berencana, kewajiban mencoblos, dan sebagainya. Dalam hal ini bagaimana pendapat Anda?

Nah, itu goblok. Jangan mempergunakan agama dalam kepentingan. Tanya, apakah program ini sesuai dengan agamamu? Ya di dalam program macam ini ya tanya para ulama dari masing-masing agama. Pendapat anda itu bagaimana? Boleh atau tidak boleh. Itu waktu KB mulai, sudah muai di Jawa, di Bali kemudian baru disebarkan. Ada seminar di Flores, saya diminta bicara. Saya ada dua tema. Tema pertama itu ada apakah itu betul ada loaded of pop. Jadi kelebihan penduduk nanti, seingat kita tidak bisa hidup lagi disana. Bisa ambil. Gitu saja Demokratis to. Kedua, apakah dari segi budaya, KB akan berhasil di NTT? Saya mengatakan bahwa tidak akan berhasil. Wah, aya dimarahi bukan main oleh pegawai-pegawai. Tidak mungkin itu, mesti berhasil. Dan sesudah 2-3 tahun ternyata malah tidak berhasil. Kenapa? Lawan budaya. Ya, mereka tidak mau pihak luar intervensi terhadap hal intim. Itu bukan urusan pemerintah, berapa banyak anak saya. Kalau saya mau 10 anak, saya akan punya 10 anak. Kalau saya mau satu anak, saya akan punya satu anak. Tidak usah presiden atur saya atau menteri. Kita tidak... Mereka sudah mempunyai KB dari dulu di Flores. Di sana mestinya jarak antara anak yang satu dengan yang lain kira-kira 3 tahun. Itu budaya mereka. Kenapa? Karena kalau lahir tahun berikutnya langsung, ya itu salah satunya harus mati. Karena ibu tidak bisa kasih susu lagi to, tidak bisa kasih ASI lagi. Nah, jadi sudah ada aturan dan coba lihat kalau ibunya hamil sebelum 2 tahun, itu laki-laki dicaci maki oleh seluruh keluarga. "Kamu itu seperti anjing! Begitu nalurimu muncul langsung mesti bersetubuh". Ada dalam budaya, tanpa keikutsertaan, tanpa apa. Nah kemudian dimasukkan KB A metode... dijelaskan. Saya waktu itu mulai ragu-ragu. Mungkin di kota jadi, tapi di desa. Justru berhasil di desa, di kota tidak. Antara guru-guru dan ini yang pindah dari masyarakat sendiri ke tempat lain. Kontrol sosial hilang. Nah, jadi sudah tidak ikut lagi tradisional. Sesudah KB A mereka tahu bahwa ibu punya masa subur dan kapan punya masa subur dan bisa menentukan mereka bisa ada hubungan seksual tanpa punya anak. Itu mereka terima. Tapi itu urusan suami-istri, bukan urusan pemerintah. Waktu tim kami. Saya waktu itu tidak mau setuju, tapi tim kami ada penelitian di Timor dan di Flores, dari pemerintah paksakan untuk tanya ikut KB atau tidak, kenapa tidak. Begitu sebut KB, habis wawancara. Orang tidak mau bicara lagi, tidak mau bicara lagi, selesai. Selama tidak muncul KB itu bagus sekali. Begitu muncul KB, selesai. Gereja atau tokoh agama tidak bisa menjelaskan, atpi jangan itu agama yang tanggung. Tokoh agama bisa menjelaskan, seperti di Flores, gereja yang atur. Itu punya yayasan. Itu ada aktivis dari Flores itu barusan ya 2 tahun lalu itu S2 hasil penelitian, misalnya pertemuan dengan umat, seperti katakanlah workshop atau seminari, seminar tentang iman... Karena anggota harus sebelum dan sesudahnya harus menjawab dan dia bilang, waduh. Kalau buat di satu tempat langsung umat mau di lain tempat juga dibuat. Karena mereka tidak tahu ~~dan~~ mereka tidak

mau tahu kalau datang petugas dari pemerintah. Mereka tidak mau tahu. Mesti datang petugas agama. Ya ini pegawai pemerintah, tapi taidak pernah datang sebagai pegawai pemerintah. Jadi, sebagai umat yang mau membantu. Sukses luar biasa. Tapi itu kan tugas rohaniwan. Rohaniwan, bisa sebagai animator, sebagai orang yang mendukung yang membuka kemungkinan menjadi petugas. Yang paling bagus adalah wanita. Masa kalau pastor harus omong bagaimana harus hubungan seksual padahal orang tahu, tidak kawin dia, ya tahu dari mana? Nah itu.

11. Bagaimanakah semestinya negara menempatkan posisinya dalam kontroversi di sekitar isu aliran kepercayaan: Kong Hu Chu, perkawinan antar agama, pendirian tempat ibadah?

Makanya saya omong dari awal menghormati kelainan orang. Kalau keyakinan itu hak asaasi ya hormati itu, hormati itu. Kalau orang mau membangun kuil silakan. Biar mereka sembahyang di sana, begitu. Itu terasa aneh sekali, seperti ada perbedaan di Indonesia itu antara agama dan religi. Ada beda. Coba baca ini Koentjaraningrat, Ia tulis beda antara agama dan religi. Apa bedanya? Agama itu yang punya kitab, punya wahyu, Religi itu kepercayaan apa saja. Itu menurut saya, saya tidak sebesar ini Koentjaraningrat, tapi saya banyak sekali bimbing skripsi dan sendiri saya berminat dengan masalah itu. Orang kafir pun yakin, ya kafir, bisa disebut kafir. Tapi orang punya kepercayaan sendiri, tradisional. Mereka yakin bahwa itu adalah wahyu karena itu berasal dari nenek moyangnya. Dan nenek moyangnya pasti dapat ini. Dan itu juga saya harus menghormati itu. Jangan bilang religi dan agama atau agama saja. Religi dan agama itu sama menurut saya. Nah itu yang dimaksudkan oleh kalangan Islam. Seperti orang Islam dari dahulu takut mengembangkan Antropologi dan Sosiologi Agama. Penelitian mengenai itu, "jangan itu". Agama itu adalah satu unsur budaya dan satu unsur sosial. Kita ada hak untuk meneliti bagaimana pengaruhnya. Dengan ini tidak mempersoalkan agama atau agama, tidak masuk teologi, tapi efek agama itu, kepercayaan itu bagaimana? Kalau orang bakar gereja apakah itu betul-betul dia percaya pada agamanya? Pada Tuhan, pegang pada agamanya? Atau itu nafsu? Saya punya kesan bahwa segala radikalisme yang ada, yang kita alami di sini, itu karena orang tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Tuhan, menyembah agamanya.

12. Bagaimanakah Anda merespon klaim yang mengisyaratkan adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih sektarian?

Oh, bahwa ada agama resmi. Pada awal saya sudah mengatakan, dulu itu ada konvensi macam ini. Tapi saya menganggap. Memang dalam Islam itu, dalam sejarahnya, bahwa politik dan agama itu adalah satu, tapi dahulu kala, Tapi interest-an sekali. Di Polandia juga ada Islam, orang Islam, asli. Ah, mereka bukan asli Polandia. Mereka Tar-Tar, dari pendatang sebenarnya, dari Asia yang kemudian menetap di sekitar Laut Hitam dan mereka banyak sekali menjadi tentara. Mereka menjadi tentara sewaan di kerajaan Polandia. Karena

berjasa sekali, raja memberikan mereka satu wilayah besar. Mereka boleh di sana itu, bebas. Membangun mesjid atau apa ini, silakan. Nah itu mereka masih ada waktu sesudah perang batas negara dipindahkan, jadi de facto tinggal 2 desa saja. Polandia masih ada di Polandia. Interest-an sekali. Mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi di Indonesia. Tidak bisa menerima. Karena di dalam Islam menurut mereka ada toleransi, sesuai aturan. Dan toleransi itu begitu jauh dari kedua belah pihak itu interest-an sekali. Dengan bangsa komunis di Polandia itu orang Islam tidak bisa naik haji. Susah, karena tidak bisa keluar negeri to, apalagi karena agama. Pastor-pastor tidak bisa keluar. Jadi apa, mereka sudah tidak punya ulama. Yang tua sudah hampir mati, tidak punya ulama. Maka salah satu yang menjadi ulama sudah belajar pada yang tua-tua. Di situ tidak punya titel resmi. Jadi dia studi di Akademi Teologi Katolik. Dia belajar di situ dan dapat ijazah dari Teologi. Tulis, tesisnya mengenai pengertian Islam dalam alinea pertama. Orang ini kanan baik sekali dengan profesor-profesor Katolik. Iya to. Itu kita bisa tahu dari nama, mereka itu turunan dari Tar-Tar. Karena namanya tidak bunyi Slavia, bukan Jerman, bukan Polandia bukan apa. Itu bunyinya sedikit asing. Kalau omong ya itu saya paham. Bahasa Arab mereka hanya tahu untuk sembahyang. Bahasa sendiri sudah lupa. Mereka sudah berapa ratus tahun itu hidup di situ. Sudah menjadi anggota integral dari Polandia. Konflik tidak pernah ada ada 2 mesjid, mesjid dari kayu, 200 tahun lalu dibangun, itu jadi monumen negara, dilindungi, tidak boleh dirubah, dikonservasi.

AGAMA DAN DEMOKRASI

13. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, sekarang ini banyak muncul berbagai macam partai politik dengan berbagai basis sosial yang salah satunya menggunakan basis agama. Bagaimana Anda memahami hal ini?

Saya selalu ada sedikit mencurigai. Jadi saya pribadi kalau Tanya saya, sekurang-kurangnya tidak terlalu antusias kalau agama terlalu masuk politik. Saya tidak terlalu antusias. Kita bisa tampak buat papan nama bisa memperjuangkan haknya. Sekarang agama Islam punya berapa itu. Nah itu. Masing-masing mau memperjuangkan haknya Islam, umatnya. Ada dari yang sangat, sangat toleran sampai ekstrem, agresif. Prinsip pegang, prinsip pegang tapi jangan terlalu menonjolkan diri. Menurut saya, sebagai salah satu contoh demokrasi yang betul itu adalah Inggris. Mereka punya demokrasi paling bagus. Kemudian Amerika. Apa ada di sana partai agama? Di Inggris pada awalnya memang ada, konflik agama, besar. Besar sekali. Tapi tidak ada, tidak ada masalahnya. Jadi saya menganggap sebaiknya kalau tidak ada begitu. Kalau tidak dilindungi. Saya orang tidak setuju untuk keyakinan saya pribadi. Kalau bisa memperjuangkan hak orang Islam kalau kamu masuk parlemen. Kamu bisa memperjuangkan hak orang Kristen kalau kamu masuk parlemen. Tapi tidak usah di... Dan kebodohan, salah satu kebodohan yang ada seperti dikembangkan di sini, disiplin partai. Itu sering dipakai. Jadi kalau pimpinan salah satu partai memutuskan ini, itu jadi semua anggota harus ikut aturan ini. Nah, itu bukan demokrasi. Karena keputusan anggota harus ikut aturan ini. Nah, itu bukan demokrasi. Karena keputusan diambil di atas. Itu bukan

demokrasi lagi. Dan dari aspek politis kalau kita lihat, kalau anda tanya misalnya Pak Ramlan, spesialis dalam hal ini, mayoritas dan minoritas dalam suatu negara itu hanya ada pada waktu pemilu. Pemilu selesai, tidak ada lagi mayoritas dan minoritas, semua adalah warga negara dengan hak sama dan kewajiban sama. Dan mayoritas seperti saya katakan, dari artikel ditulis oleh seorang muslim dan dia menilai pemimpin-pemimpin agama juga di dalamnya. Habibie itu punya nama jelek sekali sebagai muslim. Amien Rais punya nama jelek sekali. Adi Sasono, semua yang top-top ICMI itu, dia itu menilai mereka itu mendewakan agamanya. Karena dalam pelaksanaannya mereka korup dan sebagainya. Yang betul-betul ikut agama, agama Islam itu ada beberapa orang saja. Contohnya dia bilang Gus Dur, maka Gus Dur. Karena dia betul-betul mendalami agama, pegang pada prinsip agama, sangat toleran. Ya, ia menyembah Tuhan, bukan menyembah agamanya.

Bagaimana dengan anggapan bahwa Gus Dur plin plan?

Ya, kadang-kadang akhir-akhir ini dari pernyataannya. Tapi saya kira ia punya maksud tertentu dalam segala hal. Dia mau nasionalis, ia niat kepentingan bangsa. Kami di Polandia, ada belajar banyak sekali.

Kami dijajah, hampir selama Indonesia. Dari akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-20. Lalu setelah PD II kan bebas, lalu jatuh lagi di bawah, dijajah oleh Rusia selama 50 tahun baru merdeka tahun 1989. Nah itu disana pemimpin itu masyarakat, khususnya unsur agama disebut pastor, dan sebagainya. Penguasa datang dan penguasa pergi. Tapi bangsa bertahan. Dan harus ikut terus. Itu kebijakan Gus Dur. Hari ini ada Soeharto, besoknya ada Habibie, lusa mungkin Amien Rais. Lagi 5 tahun mungkin ada lagi orang lain. Pentingnya Indonesia jadi utuh dan berkembang dan jangan menghancurkan yang dia membangun dengan susah payah. Bahwa di Indonesia ada banyak ketidakadilan tapi apakah ada alasan untuk membenci mereka yang kaya. Atau yang kaya membenci mereka yang memperjuangkan keadilan sosial, kita berunding sebab saya tidak tahan misalnya caci maki orang Cina. Memang banyak Cina anak korup dan kepentingannya adalah duit. Jadi saya kenal seperti orang ini yang barusan masuk. Tapi ia luar biasa. Ia tidak punya apa-apa, kerja setengah mati. Yang lain yang jadi kaya, tapi sosial luar biasa. Saya dipanggil seorang, diminta saya menjadi anggota yayasan yang dia dirikan. Yayasan apa? Saya memiliki sekitar 8 ribu karyawan dalam perusahaan. Itu perusahaan saya. Diantaranya saya tahu ada orang yang pasti berbakat, anaknya. Tapi jelas sekali bahwa untuk studi mereka ada yang tidak mampu. Jadi saya mendirikan yayasan Hong's Institute untuk anak karyawan saya supaya bisa studi. Waktu ada muncel dari kalangan mahasiswa Katolik, yang punya, yang tidak mempunyai kesulitan daengan dana, dengan hidup, datang pada saya. Romo, kami ada cukup banyak kawan-kawan yang tidak mampu lagi lanjutkan studi. Bagaimana kalau kita cari funds? Saya ambil uang dari mana? Karena mereka kira saya akan cari uang. Saya coba dari luar negeri, gagal. Saya pergi ke sini, kenalan yang saya tahu, Cina yang tertutup karena kaya, tanpa kesulitan. Tanpa kesulitan, 18 mahasiswa dapat bantuan. Kalau

anda punya kebutuhan anda juga bisa dapat. Untuk sementara saya mau, saya omong dengan Bu Hariyadi, saya mau usahakan untuk semua mahasiswa yang betul-betul. Karena dari luar negeri mereka tolak. Jadi untuk sementara ya kalangan Katolik. Tapi kalau kebetulan ada yang bukan Katolik, betul-betul adalah keadaan susah, saya tidak berkeberatan. Selama ada dana, dan orang itu mungkin tidak percaya. Saya ditelepon oleh seseorang, saya tidak kenal. Katanya, "Romo mau membantu mahasiswa yang tidak mampu?" "Iya." "Kapan saya bisa ketemu Romo?" Kita menentukan waktu. Dia muncul satu kali di sini sebelum saya keluar. Keluar dan dari... studi. Saya bilang, "Saya mau tahan lama. Kamu mau ikuti tata tertib?" Itu yang tertulis di sana, tidak perlu di kertas. Asal dipergunakan untuk mahasiswa yang betul-betul membutuhkan. Dan itu bukan konglomerat. Jadi dia karena keyakinan agama, dia punya uang dan ada rang yang punya kebutuhan.

GEREJA KATOLIK DAN POLITIK

14. Menurut Anda, apakah yang sudah diberikan oleh gereja Katolik sebagai sumbangan kepada kehidupan politik Indonesia?

Nah, kalau anda lihat dari dahulu kala, dari awal kemerdekaan itu ada Partai Katolik. Dan gereja sendiri tidak terlibat politik. Walaupun pada awal saya tahu karena misalnya di Flores, di Timor, tidak ada kaum intelektual, paling-paling guru dan pastor. Jadi pada awalnya ada beberapa pastor yang menjadi anggota parlemen, mewakili Flores dalam Indonesia Serikat. Juga masih dari Golkar, ada pastor. Kemudian dilarang. Uskup tidak setuju, Roma tidak setuju. Tapi sumbangan melalui anggota gereja, bagus. Itu salah satu orang yang perlu dijunjung tinggi, saya tidak tahu, anda juga tidak kenal, Pak Kasimo. Itu pendiri partai Katolik. Orang yang hidup hanya untuk bangsa, ia punya satu rumah yang jelek walaupun jadi menteri sekian lama. Aktivis, anggota parlemen. Ya rumahnya bukan kondo, tapi rumah rakyat biasa. RSS tapi rumah rakyat biasa. Hadir di mana-mana memperjuangkan hak misalnya orang kecil untuk dapat, bukan hanya orang Katolik, petani, dsb. Di Flores, dari dahulu kala ada IPP (Ikatan Petani Pancasila). Pernah dengar anda? Nah, mereka buat apa? Kebetulan 2 pastor ada terlibat di situ, karena mereka spesialis agronomi. Jadi gereja di Flores, uskup-uskup waktu dengar ada dapat misionaris dari luar itu mereka minta, "Saya perlu ahli Antropologi." Nah, datangkan orang dengan pendidikan ini. Sebab menurut pengertian Katolik khususnya sesudah... adalah membangun manusia, seluruh. Bukan hanya mengkonveksi, menjadi Katolik, selesai. Manusia mesti hidup, jadi majukan dia. Nah, jadi itu munculnya suster-suster membuka kursus, sekolah. Bukan hanya sekolah untuk baca dan ini tapi sekolah keterampilan. Sebelum Kartini muncul, suster-suster di Flores sudah menyiapkan wanita untuk hidup lebih, untuk naikan mutu rumah tangga. Belajar masak sehat, pelihara anak, gizi. Itu sudah mereka buat. Padahal berlalu. Di Jawa, di Flores, di mana saja. Nah itu, ada contoh boleh juga anda ambil saya sebagai contoh. Saya diambil dari tugasnya itu sebenarnya. Itu gereja jauh lebih penting. Airlangga membutuhkan dengan honor yang tidak cukup untuk hidup. Masih dibenci dan

mau diusir. Karena saya lihat itu, saya punya tugas utama itu adalah mahasiswa. Saya ada tugas utama. Sekarang saya punya asisten. Dari awal saya bilang sama mereka, saya anggap, saya punya tugas, supaya anda maju. Dan saya menekan, sampai ada dosen-dosen lain iri karena asisten saya bisa studi di luar negeri. Ya kamu iri karena Prof Glinka urus. Padahal kita tidak urus apa-apa. Hanya saya kenal beberapa orang macam-macam negara. Nah itu saya tanya kawan. Bagaimana sahabat kamu bisa terima itu asisten saya, buat doktorat bisa apa tidak? Saya bisa katakan, kamu bisa bikin doktorat karena saya disini to? Saya tahu kamu disini tidak punya fasilitas. Dan saya sendiri seorang diri. Tapi kita punya literatur, kita ada fasilitas. Selain itu kalau dia belajar pada orang lain, itu dia hanya jadi lebih kaya. Dengan sengaja saya tidak kirim mereka semua ke Amerika supaya janganlah dia di satu model. Ada di Jerman, ada di Amerika, ada disini, ada di Australia. Makin banyak wawasannya makin luas. Itu saja sumbangan saya sebagai orang gereja. Cuma saya tidak tulis bahwa atas nama gereja. Itu banyak sekali. Sebelum mulai segala aksi pembangunan di Flores sudah ada rencana besar. Jauh sebelumnya, masih pada masa Soekarno. Secara sistematis, pertanian, irigasi, terasiring, pelayanan kesehatan. Satu persatu, mulai dari dasar. Bukan bika ini di kota, tidak, di desa. Suster itu tidak seperti disini. Biara 30 suster, 2 sekolah. Di sana itu ada 3 suster dengan masyarakat. Satu itu perawat mungkin bidan. Yang lain itu ajak ibu masak sehat, pelihara anak. Yang lain ajar jahit. Tidak usah pura-pura seperti Adi Sasono sekarang ini tiba-tiba masyarakat dananya hilangnya. Nanti kalau diperhatikan, kamu agama apa. Mau masuk sekolah kita, silakan. Berapa banyak lulusan yang ada dari sini. Semua orang Islam yang saya ketemu. Atau sekurang-kurangnya bukan Kristen. Menghormati para Bruder yang ngajar disini bukanmain. Itu mereka tidak. Tanya kamu agama apa. Pokoknya kamu cakap, silakan. Itu sumbangan itu, tidak usah politik, didik masyarakat supaya pintar.

15. Bagaimana Anda memandang keterlibatan biarawan Katholik dalam kehidupan politik di Indonesia?

Nah itu kalau demonstrasi itu saya sangat benci. Kalau lawan ketidakadilan itu saya setuju. Kalau saya bukan WNA, saya pasti juga ikut. Yang dipukul. Seperti coba lihat Romo Sandi dan dia... Apa yang dia bilang. Ya kita anggota partai. Ia dari dulu kala ia mengurus anak terlantar, orang yang tidak punya pekerjaan. Itu baru usaha. Kemudian dia lihat ketidakadilan ya... sampai Soeharto benci dia. Romo bangun, tidak teriak-teriak besar politik. Orang mau diusir dari Yogya, ia pindah ke sana, tinggal diantara mereka. Nah, itu membela keadilan, membela keadilan. Mau lihat itu dari segi politik, pasti penguasa akan lihat itu campur politik. Tidak, keadilan, keadilan sosial. Kalau kamu diberi angka, nilai di sekolah, di universitas. Karena kamu Katolik, jadi tidak bisa dapat lebih dari 60. Dan yang bukan, pakai jilbab itu bisa 80 ke atas. Nah, itu kalau saya tahu ada aturan semacam itu saya keluar dari universitas itu. Saya tidak tahu anak saya itu agama apa. Mahasiswa saya. Itu kepentingan dosen. Kadang-kadang saya lihat nama. Oh iya itu depannya Kristen. Atau rupanya ini bukan, Islam. Tapi saya sama saja. Jadi, itu adalah sumbangan

kecil-kecilan dari saya. Itu kalau mau lihat itu adalah politik, mempersiapkan bangsa untuk kemerdekaan, untuk kemajuan, dsb. Soekarno orang muslim tapi menjunjung gereja Katolik tinggi. Tahu kenapa? Ia dibuang di Flores. Nah, di Flores, orang misionaris Katolik. Satu-satunya intelektual dengan mana mereka bisa diskusi. Itu pastor Belanda jadi kawannya. Pastor Jerman jadi kawannya. Sehingga waktu Soekarno pertama kali berkunjung sebagai presiden, berkunjung ke Flores, pastor-pastor berdiri di belakang, di pelabuhan. Jauh-jauh di belakang. Waktu dia turun di sana, mau terima resmi. Stop, pergi jalan, pergi ke belakang, ambil 2 temannya, pastor. Dibawa sampai ke depan, silakan terima resmi. Berapa banyak pemimpin, orang yang betul-betul berjasa itu dididik oleh mereka. Franz Seda itu tidak jadi apa-apa kalau bukan gereja Mangara Srahaan, tidak jadi apa-apa tanpa gereja. Saya bisa sebut nama banyak sekali tokoh nasional, tokoh regional, dsb. Saya Bantu mahasiswa bukan baru sekarang tapi puluhan tahun lalu. Dan selalu ada yang tahu kalau saya Bantu mahasiswa, mereka kasih uang. Sekarang mereka jadi orang besar. Itu saya anggap investasi yang paling aman. 100% berhasil. Saya misalnya waktu saya mau diusir itu, saya baru lihat berapa banyak teman membela saya, memusuhi. Itu mayoritas profesor-profesor itu orang muslim. Tapi tidak setuju dengan ini. Nomer satu Pak Tandyo. Kenapa Pak Tandyo tidak mau diperpanjang masa jabatannya? Protes, gara-gara ICM. Pak Tandyo terima siapa saja. Dan Pak Tandyo berusaha supaya orang yang betul berbakat, maju. Yang mau kerja. Yang malas ya tidak usah. Pak Tandyo tidak tanya itu kamu agama apa. Pak Adi menganjurkan saya, saya datang. Pak Tandyo waktu itu Dekan, terima saya. Bapak Glinka, saya hanya bisa bayar sekian, maaf. Kami senang sekali karena mau Bantu, ya saya Bantu. Banyak profesor tidak tahu tentang itu. Tidak mau percaya bahwa saya dapat honor dengan honor sekian. Pada awal 14 tahun yang lalu, saya dapat 200, itu pada waktu itu. Jadi pada waktu itu udah banyak. Saya sekarang dapat 348. Nah itu dalam situasi gini, itu adalah separo dari 200. Kalau saya ada pertemuan internasional, kawan-kawan juga tidak mau percaya. "You're crazy." "You're crazy." Saya masih tahun lalu ditawarkan untuk pindah ke Australi. Kalau saya dapat 5300 dollar per bulan. Uang 300 ribu rupiah. Dan masih dipotong tempo hari, angkutan. Padahal mereka tidak tahu latar belakang. Saya pada awalnya tidak ada taksi, belum ada taksi di Surabaya. Saya datang dengan becak. Kadang-kadang terlambat. Nah, padahal dia Tanya, "Pak Glinka naik apa?" "Becak." Profesor naik becak. Gejala apa ini? Itu mahkota jatuh dari kepala saya karena naik becak. Nah itu kemudian Pak Tandyo bilang "Pak Glinka kami hanya bisa bayar sekian. Kami tidak bisa bayar angkutan khusus. Kami beri angkutan." Akhirnya dengan jadi orang yang tidak tahu latar belakangnya bikin ribut. Machsoen Ali. Selalu ada maksud supaya saya berhenti, supaya berhenti bayar. Saya mengajar kosong. Naik taksi, bayar lagi untuk universitas. Karena saya rasa rugi. Tapi kalau saya egoistis, saya menyesali saya sampai sekarang masih ada disini. Untung bahwa sekarang Dekannya tahu, ya menghargai. Sumbangan itu yang saya berikan untuk fakultas itu, dan banyak sekali. Mereka banyak pastor yang mengajar dengan gaji sedikit. Berapa banyak suster kita. Tanya dibayar. Mendidik anak, tinggal di desa. Itu masih

diinterpretasi sebagai kristianisasi. Mau Bantu orang kecil, kristianisasi. Itu satu contoh bagus. Ada seorang berbakat, seorang arsitek di Jawa Tengah, di Yogya. Tomo mangan berusaha agar dia dapat beasiswa di luar negeri. Wah, itu orang muslim. "Tapi Romo kalau kemudian saya tamat, saya mesti masuk Katolik." "Jangan!" Katolik rugi dan Islam rugi. Lha kalau kamu keluar dari Islam, Islam rugi. Kalau kamu masuk Katolik tanpa keyakinan, Katolik juga rugi." Banyak kita dipersalahkan begitu. Pasti kamu bayar. Saya tidak berani membaptis orang yang masuk Katolik karena dibayar. Saya tidak akan membaptis. Kalau pembaptisannya tidak sah. Rugi dari dua belah pihak.

16. Sampai sejauh mana keterlibatan tersebut diakui sebagai usaha mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat?

17. Bagaimanakah semestinya gereja Katholik menempatkan posisinya dalam perubahan yang sangat cepat yang terjadi belakangan ini?

Kalau anda lihat pernyataan-pernyataan para uskup itu selalu resmi. Itu gereja sebagai pimpinan gereja. Kami dari bawah kadang-kadang sedikit kritik karena kadang kurang cepat bereaksi. Kurang cepat bereaksi. Tapi akhir-akhir ini sudah ada. Jadi para uskup sudah omong jelas. Seperti misalnya hanya surat yang terakhir. Yang ada itu Paskah. Kebetulan saya simpan. Tapi juga ada reaksi lebih-lebih lbek. Ini ada reaksi. Kadang-kadang kumpulan pastor itu buat keputusan. Cuma ada yang berani, ada yang kurang berani. Ada yang terbuka dan kurang terbuka. Bisa beradaptasi cepat atau tidak. Seperti Romo Kurto, aktif sekali itu cari persahabatan. Jadi kerukunan beragama. Room Sandiawan berkecimpung dengan orang miskin, tidak Tanya agama apa. Dengan orang yang tertindas. Dan di banyak tempat, ada mahasiswa dengan kebutuhan, ya kita coba untuk Bantu mereka. Dan sekarang ya meyakinkan umat kamu harus pilih siapa dan dia tak sebut nama. Orangny siapa? Jangan pilih yang koruptor yang sudah terbukti kerja sama dengan koruptor dari dahulu kala, ya sebaiknya jangan pilih.

Sulit melihat sosok ideal?

Ya memang, karena manusia ideal tidak ada. Tapi kita harus memperjuangkan yang bisa. Yang dalam situasi ini yang paling baik. Sering kami diskusi disini bahwa ada calon, calon gubernur dari Kristen. Ada beberapa katakan, lebih baik jangan. Karena mayoritas disini itu Islam. Dia susah. Buat apa saja membantu gereja akan dipersoalkan. Orang Islam yang jujur lebih penting daripada yang lain. Kalau saya mesti pilih orang Katolik yang korup atau orang Islam yang jujur, saya pilih orang Islam yang jujur. Yang ideal tidak bisa. Gereja itu juga tersusun bukan dari orang Kudus. Selama kita di dunia ini, kita akan dosa. Dalam segala macam hal itu karena ada segala macam kekurangan. Kita berusaha dan agama membantu, memberi motivasi, menaikkan harap bahwa kita percaya bahwa ada rahmat Tuhan yang membantu kita melalui doa, melalui apa ibadah dsb. Tapi kita-kita telah membuat dosa. Kita harus bertobat terus. Kita sering-sering dalam khotbah

menekankan. Gereja itu kumpulan orang yang berdosa. Cuma yang mau berusaha jadi suci. Bila selalu berhasil. Tapi selalu harus berusaha. Jadi, sedikit orang jujur, orang yang lurus tadi. Orang yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok sempit. Itu orang belajar ini, kita perlu.

WAWANCARA V

1. Menurut Anda masalah-masalah apa sajakah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa “saat ini”?

Sekarang ini yang jelas kan masalah politik. Soal legitimasi dari pemerintah yang ada. Kemudian juga ada masalah ekonomi. Ekonomi kan berkaitan dengan masalah politik yang mendasar tadi ya. Belum lagi kita menghadapi masalah pemilu nanti. Diharapkan lewat pemilu nanti terjadi pergantian pemerintahan yang secara baik. Jadi, selain masalah politik, juga masalah ekonomi.

Kemudian di bidang politik, dulu partainya sedikit sekarang partainya banyak. Itu kan menjadi masalah besar. Ya orang tidak terbiasa berdemokrasi di situ untuk menghargai pendapat. Itu kan sulit disini, di Indonesia harus belajar. Kemudian juga masalah tadi di seputar korupsi, kolusi. Nah, itu menjadi masalah yang luas sekali. Dan saya lihat juga ada ini sekarang masalah beragama yang juga ada kaitannya dengan politik juga, ekonomi, dan sebagainya karena dulu kan sering pemerintah kan menggunakan agama untuk diperalat. Jadi masalahnya kompleks sekali kira-kira. Saya kira itulah masalah-masalah yang akan menjadi masalah besar di tahun-tahun mendatang.

2. Masyarakat ideal macam manakah yang Anda bayangkan yang semestinya diwujudkan di masa depan?

Sebenarnya kalau sudah dilaksanakan semua sudah ideal sekali sebenarnya. Sekarang ini pengertian dalam persepsi saja. Dengan adanya penghargaan pada manusia. Tadi soal kehidupan, soal HAM ya tadi dalam politik. Jadi kalau itu dilaksanakan sudah baik itu ya. Saya kira tidak akan jauh beda dari itu kalau itu benar dilaksanakan. Sekarang ini karena hanya dilaksanakan sebagai slogan tidak dilaksanakan karena bahayanya nilai itunya. Yang saya takutkan muncul ide jadi negara Islam, terkadang ide itu muncul. Jadi bahayanya sekarang kalau itu hanya dipakai kedok saja, hanya dipakai untuk stempel tapi tidak di... dengan sebaik-baiknya.

Pada dasarnya sudah memadai kemudian tadi kan sikap belum jelas, seperti presiden harus dibatasi, itu kan belum jelas. Belum dirumuskan dengan baik, kalau dibatasi mungkin dia bisa baik. Kemudian juga pemilahan fungsi kekuasaan dia antara eksekutif, yudikatif, legislatif sekarang kan campur-campur ya. Legislatif dicampuri eksekutif. Yudikatif juga tidak mandiri dia. Dan kemudian kekuasaan lebih bertumpu pada presiden. Atur semuanya dia. Padahal teorinya kan presiden dibawah MPR tapi kan MPR tak berdaya.

PLURALITAS AGAMA

3. Pluralitas agama merupakan tantangan khusus yang dihadapi negara-negara di dunia dewasa ini (tidak terkecuali dengan Indonesia yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan). Bagaimana pendapat Anda dengan kondisi keanekaragaman agama dan kepercayaan di Indonesia?

Masalah agama itu saya sendiri juga heran. Kalau dulu-dulu itu tidak ada masalah kemudian sekarang karena itu dipicu oleh politisi-politisi sekarang kemudian tegang masalah agama itu. Itu dilihat sejak peristiwa di Situbondo itu terus meningkat. Sepertinya ada orang yang sengaja menggunakan isu agama itu untuk politik itu ya. dipolitisir. Demikian juga sering itu menjadi alat kelompok Islam untuk memojokkan kelompok yang lain. Sebenarnya kalau masyarakat biasa itu nggak ada masalah. Tapi lalu ada orang-orang tertentu yang mungkin menyalahkan agama ya. Jadi dikait-kaitkan dengan agama. Pada hal itu masalah agama an sich, dikait-kaitkan dengan agama.

- 4. Di Indonesia, pemeluk agama Islam mencapai 90%, dan sisanya adalah pemeluk agama lainnya termasuk aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (BPS 1997). Angka tersebut memunculkan asumsi bahwa terdapat kaum mayoritas dan kaum minoritas dalam kehidupan beragama di Indonesia. Bagaimana evaluasi Anda terhadap isu ini?**

Itu sebenarnya nggak betul. Lebih kurang dari itu. Itu ada manipulasi karena mereka takut kalau mereka berkurang. Disini juga ada kurang atau lebih dalam statistik. Harusnya tidak 90% dia itu, kurang dari itu. Ya sekitar 70%. Tapi itu... Sebenarnya kalau dalam konsep negara kesatuan, nggak ada mayoritas-minoritas. Harusnya kan sama. Saya kira sudah menyimpang dari ideal kebersamaan kita ya. Tidak boleh ada mayoritas, minoritas. Harusnya. Dan ini sebetulnya dalam praktek kan begitu ya. Dalam praktek dibeda-bedakan. Disini untuk mendirikan tempat ibadah itu kan dipersulit.

- 5. Bagaimanakah hubungan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini semestinya dilaksanakan?**

Hubungan yang bisa dijalankan harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian tak hanya itu kita ada kerjasama. Hemat saya kalau masalah agama saja dipersoalkan, pasti dimasalahkan. Jadi, tidak usah dimasalahkan. Sekarang ini dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan itu mengada-ada, sehingga kemudian orang cari-cari masalah. Dan juga begini sering ada masalah diasumsikan dapat diselesaikan dengan agama. Sebetulnya nggak betul ya. Setiap ada kerusuhan selalu dihubungkan dengan agama, masalah kenakalan anak dipanggil ke agama. Kan seharusnya dipanggil kan orang tuanya. Sepertinya agama dipakai, diperalat oleh pemerintah, misalnya untuk KB, pemuka agama dipanggil untuk disuruh motivasi, kemudian juga tempo hari waktu... Jadi agama itu diperalat. Seolah-olah agama itu dengan agama selesai. Sehingga ada kesan agama itu bisa menyelesaikan semua. Padahal kan tidak. Justru mungkin masalah di arus bawah yang mesti diselesaikan, misalnya masalah keadilan.

AGAMA DAN NEGARA

- 6. Bagaimana sifat hubungan antara agama dan negara yang ideal menurut anda?**

Nah, ini sering di Indonesia dikatakan bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Ini nggak jelas mau ke mana. Saya pikir negara itu banyak

mencampuri urusan agama. Jadi biarkan agama itu berkembang. Nah, itu tadi gagasan bukan negara agama, bukan negara sekuler, itu nggak jelas sebenarnya. Ada kecenderungan negara itu mau mengatur agama dalam berbagai hal. Saya kira biarkan saja, dalam arti negara itu menjamin, melindungi tapi tidak perlu banyak mengatur. Banyak aturan-aturan. Memang itu sering mungkin karena demi umat Islam mayoritas itu. Katanya negara Pancasila itu bukan negara agama juga bukan negara sekuler. Tapi kan nggak jelas ya. Itu yang sering dikatakan pejabat ya. Kadang-kadang saya juga tidak tahu juga. Pokoknya asal bukan negara sekuler juga bukan negara agama. Kayak apa itu? Iha inilah kekaburan nilai ya yang menyebabkan... Justru lebih dekat ke negara agama. Itu kesan saya. Dimana ada ...

7. Seberapa jauhkah gambaran ideal tersebut tercermin dalam kenyataannya di Indonesia?

-

8. Agama sebagai suatu bentuk kepercayaan dan budaya menyembah Tuhan mempunyai upacara ritual tertentu yang berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Perbedaan ini kadang kala secara tidak sadar menjadi persoalan antara pemeluk agama. Dengan mendasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang demokratis, bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut?

Itu jelas. Yang penting bagaimana bisa saling menghargai dan menerima perbedaan tadi. Perbedaan antar umat beragama itu. Kalau kita memahami tiap agama kan beda cara beribadahnya. Agama Islam lain dari Katolik, demikian pula dari Kristen, dari Hindu dan dari Budha. Jadi kita tidak tersinggung kalau melihat orang beribadah lain dengan kita. Tidak usah lalu jadi marah kalau berbeda - mengakui kebhinekaan tadi. Saya pikir dengan pendekatan bersama, seperti misalnya lonceng tidak perlu dibunyikan setiap jam. Kemudian juga soal pengeras suara. Itu di dalam pendekatan lebih dekat.

Negara perlu dilibatkan?

Ya bisa tapi harus netral

9. Kebebasan beribadah sering dianggap sebagai bagian dari hak yang paling asasi, bagaimanakah posisi negara selama ini tentang hal itu? Bagaimanakah dengan sekarang?

Ya saya kira negara itu tidak usah mengatur. Saya kira negara itu terlalu banyak campur tangan dalam agama. Saya juga kasihan umat Islam, khotbahnya disensor karena dikaitkan dengan agama. Kalau Katolik mungkin nggak berani. Jadi di agama-agama lain harus perlu banyak membina, dan sebagainya. Negara itu sebagai fasilitator saja, membina. Serahkan pada pemeluk agama masing-masing. Agama praktis menjadi alatnya Islam untuk... Di sini kan korporatis. Semua diatur oleh negara. Jadi ada kecenderungan negara mengatur semuanya itu. Termasuk itu... Negara terlalu banyak mencampuri saya pikir.

- 10. Pada masa lalu (bahkan beberapa orang percaya bahwa hal ini masih bertahan), pemerintah sering menggunakan agama sebagai alat untuk mensukseskan berbagai programnya. Di antaranya adalah persoalan Keluarga Berencana, kewajiban mencoblos, dan sebagainya. Dalam hal ini bagaimana pendapat Anda?**

Sekarang juga masih digunakan. Tempo hari kita diundang untuk menjadi anggota Dewan Keamanan, tapi kami menolak. Tidak masuk dalam Dewan Keamanan. Pemuka-pemuka agama itu, kita menolak. Ada itu untuk legitimasi saja. Kita menolak di KWI, HAM yang lain menerima itu istilahnya. Takut tadi kan begitu saya. Jadi kita dites apakah suatu waktu kita diminta mendukung. Jadi untuk legitimasi dia. Kemudian waktu kerusuhan Ambon itu dia minta, tapi setelah banyak hal lain untuk memberi stempel bahwa Katolik ikut mendukung. Mungkin kalau pemimpin agama sudah duduk dianggap sudah mendukung. Tapi itu bahayanya kalau pemimpin agama tidak duduk lagi. Jadi pada keadaan apa yang diputuskan oleh pemerintah kalau mereka terkooptasi dengan perintah dia.

- 11. Bagaimanakah semestinya negara menempatkan posisinya dalam kontroversi di sekitar isu aliran kepercayaan: Kong Hu Chu, perkawinan antar agama, pendirian tempat ibadah?**

Saya kira negara disini itu menurut pendapat seperti Islam. Kebanyakan itu dari Islam. Islam kan nggak setuju. Itu bukan rahasia untuk itu. Waktu diumumkan bersyarat, kamu juga bersyarat seperti dia. Kebetulan kan ada lalu dihapus karena itu sama untuk Islam. Sebetulnya dari Islam terus dikembalikan ke ibunya masing-masing. Kemudian Khong sendiri bukan agama. Disini juga ada pressure dari mayoritas muslim kan tidak menghendaki adanya kepercayaan.

- 12. Bagaimanakah Anda merespon klaim yang mengisyaratkan adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih sektarian?**

Bisa jadi kalau tadi masing-masing atau juga ada yang ngotot biasanya sudah sektarian dia. Karena kita ambil satu juga banyak pendapat itu ya yang tidak perlu sama juga. Kalau mereka bersatu kan ekuivalen berat. Pemahamannya yang nggak sama.

Dialog agama?

Saya harapkan dialog itu sepenuhnya dari bawah tidak harus dari atas. Sekarang mungkin perlu lebih banyak dialog-dialog antar agama yang muncul dari bawah. Tidak perlu selalu dari atas. Kalau memang dari bawah ya bagus. Dari bawah dari pribadi, itu lebih baik daripada kalau semua itu harus dari atas. Karena begini ya, sekarang itu banyak berguna untuk tim proyek saja. Nah, proyek itu kan uang, berupa duit. Lalu kalau tidak ada uangnya tidak jalan. Karena itu perlu dialog di kalangan Islam. Kemudian di kelompok Muhammadiyah, seperti saya dengan Gus Dur itu sering ketemu. Itu tidak ada

sulit karena pribadi. Tidak usah menunggu. Karena kalau diproyekkan kan selalu menunggu dari atas. Diusahakan yang penting akrab. Diusahakan untuk menjadi negara yang plural. Yang penting yang bawah itu jangan dimatikan, harus didukung. Sekarang mungkin tidak hanya dialog di suatu forum tapi juga bisa kerjasama yang konkret. Mungkin membantu... membantu orang Islam. Jadi ketika dalam forum resmi tapi yang penting dalam pergaulan sehari-hari itu yang lebih penting. Dialog tidak hanya terbatas pada pertemuan seperti itu, yang informal mungkin ya.

AGAMA DAN DEMOKRASI

13. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, sekarang ini banyak muncul berbagai macam partai politik dengan berbagai basis sosial yang salah satunya menggunakan basis agama. Bagaimana Anda memahami hal ini?

Kalau saya lebih baik tidak usah menggunakan basis agama, yang luas saja ya saya pikir. Karena kalau agama digunakan itu bisa menyebabkan perombakan dalam agama. Kalau partai kan kita bicara untuk kepentingan umum ya, tidak usah berdasar agama. Itu kalau partai berbasis agama akan mengkotak-kotakkan. Pada dasarnya partai-partai tersebut akan hilang. Pada akhirnya masyarakat akan menifar sendiri. Partai tidak boleh mengatasnamakan gereja dalam berpolitik. Menggunakan label Katolik jug enggak boleh.

GEREJA KATOLIK DAN POLITIK

14. Menurut Anda, apakah yang sudah diberikan oleh gereja Katholik sebagai sumbangan kepada kehidupan politik Indonesia?

Gereja disini adalah kepastian hirarki. Kita juga adalah umat ya. Jadi, katakanlah gereja itu kan tidak hanya... tapi juga ada umat. Saya kira umat Katolik kan sudah ikut serta. Kalau kita lihat mulai dari perjuangan kemerdekaan. Kita lihat banyak orang Katolik ikut di pertempuran, kemudian orang Katolik yang bekerja sebagai guru, sebagai... juga ikut menyumbang. Dan itu tidak harus ikut dalam partai tapi kan dengan ikut membangun kan bisa itu ya. Artinya ikut nyumbang dia. Kemudian juga lewat orang-orang kita yang ikut membangun bangsa. Ya kita kembangkan pemikiran-pemikiran itu, seperti kita terbitkan Surat Gembala tentang pemilu tempo hari. Kan kita tidak berpolitik langsung ya. Keterlibatan dalam politik memajukan umat untuk ikut berpolitik, mendorong umat. Kita juga dimintai pendapat-pendapat soal... seperti korupsi.

15. Bagaimana Anda memandang keterlibatan biarawan Katholik dalam kehidupan politik di Indonesia?

Sekarang nggak ada yang terlibat politik praktis, nggak aa ya. Tapi cuma masalah megitu kan masalah HAM. Masalah HAM itu sendiri tidak sama dengan masalah politik. Jadi orang sendiri sering mengacaukan soal HAM itu adalah soal politik. Padahal tidak. Seperti Romo Sandiawan, itu dia tidak berpolitik tapi dalam arti dia tidak ikut parpol tapi hanya ikut perjuangan HAM. Romo Mangun juga begitu. Tapi orang sering mengacaukan kalau orang bergerak di pembelaan, advokasi itu sama dengan politik.

Politik kan berkaitan dengan kehidupan bangsa. Yang Romo Mangun kalau dia ikut adalah sebuah perbuatan kekuasaan itu ya. Partai. Jadi partai kan dia kan wakil. Tapi kalau dia concern dengan masalah-masalah kemasyarakatan itu bukan politik. Kan sudah ada aturan kan, seorang Romo tidak boleh ikut berpolitik. Memang dulu di awal-awal ada Romo yang menjadi anggota DPR. Kalau sekarang tidak ada lagi itu. Bahkan KWI ditawari jadi anggota DPR pun nggak mau. Kalau masuk struktur pemerintahan dianggap ya sudah nggak ada. Cuma irang itu mengacaukan. Jadi waktu ikut Romo Sandiawan dianggap saya berpolitik. Pada hal waktu itu saya hanya dalam level kemanusiaan saja. Seperti Romo Mangun begitu nongol kan dihadapkan pada politik dia. Seperti Belo, dia membela orang Timor karena mereka tidak bisa ngomong, dia ngomong. Jadi membela hak orang Timor dan yang dianiaya. Itu kan dalam ekrangka hak asasi bukan politik. Jadi, orang sering menyangkutkan dengan politik. Yang jelas Uskup Belo, Romo Mangun, Romo Mudji Sutrisno, van Lith, Romo Sandiawan kalau dia hidup, itu levelnya masih dalam hak asasi. Ya mestinya dia ikut menjadi ketua partai. Ngurus partai, saya kita itu praktis ya. Jadi anggota DPR. Kalau dalam forum-forum dialog politik itu nggak apa-apa. Dia punya pemikiran nggak apa-apa. Kalau di praktis dia akan menjadi anggota DPR, dalam politik atau dalam pemilu. Seperti ini dalam pemilu. Saya diminta, ikut aja masuk jadi pengawas pemilu. Kan pengawas.

Kalau ikut demo?

Iha demo itu kan dalam rangka hak asasi itu kan. Demo itu kan dalam rangka HAM. Kalau parpol itu kan perebutan kekuasaan. Karena kalau dia ikut partai itu, Iha umatnya kan juga akan ikut partai lain. Misalnya masuk Golkar, terus sebagian ada yang masuk PDI-P. Bagaimana dengan yang tidak ikut PDI-P. Maka itu saya tidak membolehkan Romo untuk ikut ke dalam partai manapun, sebagai moderator, dan sebagainya. Nggak boleh dia, larang dia.

Jadi Romo juga nggak boleh ikut pemilu?

Oh lain, pemilu kan hak. Justru dianjurkan ikut. Justru dengan pemilu itu kita ikut ngatur. Itu kan lain. Justru sebaiknya ikut.

16. Sampai sejauh mana keterlibatan tersebut diakui sebagai usaha mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat?

Dalam politik tidak boleh tapi disini boleh-boleh aja dia mendidik umat untuk bervisi. Jadi begini, yang awam harus berpolitik. Romo nggak boleh praktis. Kalau awam sudah harus ya, umat Katolik. Makanya harus ikut concern dengan masalah negeri ini. Karena kalau politik praktis kan menyangkut kekuasaan ya. Karena dulu kan gereja pernah ada Romo yang pernah jadi gubernur. Oh itu abad pertengahan.